



PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN SERUYAN

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP) DINAS SOSIAL TAHUN 2025



#BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

**#bangga
melayani
bangsa**

☎ Sekretariat :
🌐 Jl. M. Hatta Kuala Pembuang
📍 <https://dinsos.seruyankab.go.id>



LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP)

TAHUN 2025

Abstract

ikhtisar pencapaian sasaran strategis, perencanaan kinerja dan keberhasilan / kegagalan target kinerja, serta efektivitas anggaran selama tahun 2025

Dinas Sosial Kabupaten Seruyan



KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Sosial Kabupaten Seruyan Tahun 2025 disusun berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2025. LKjIP Dinas Sosial Kabupaten Seruyan Tahun 2025 merupakan bentuk akuntabilitas publik dari pelaksanaan tugas dan fungsi dan penggunaan anggaran yang dipercayakan kepada setiap instansi Pemerintah.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjIP) Tahun 2025 diwarnai agenda efisiensi anggaran, refocusing dan realokasi anggaran untuk penanganan Perberdayaan Sosial, Rehabilitasi Sosial, Perlindungan dan Jaminan Sosial dan Penanganan Bencana serta Penunjang Urusan Administrasi Perkantoran. Sumber Daya yang dimiliki Pemerintah Daerah difokuskan untuk mendukung pelayanan dasar urusan wajib bidang Sosial berupa penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial dalam bentuk pemberian bantuan dan jaminan sosial, memaksimalkan potensi dan sumberdaya sosial, mengembalikan fungsi sosial (rehabilitasi) serta upaya pemulihan ekonomi dari dampak inflasi kenaikan harga sembako/BBM. Sebagai jajaran Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Seruyan, Dinas Sosial Kabupaten Seruyan tetap mengupayakan optimalisasi capaian target kinerja dinas untuk mendukung capaian kinerja sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kabupaten Seruyan Tahun 2025-2026.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) merupakan gambaran capaian kinerja Dinas Sosial Kabupaten Seruyan Tahun 2025. Beberapa hal yang tercantum dalam LKjIP antara lain tentang struktur organisasi, sumber daya, isu strategis, perencanaan kinerja dan capaian kinerja. LKjIP Tahun 2025 juga menjadi salah satu bahan evaluasi untuk perbaikan kinerja di tahun berikutnya. Secara umum capaian kinerja Dinas Sosial Kabupaten Seruyan Tahun 2025 telah memenuhi target yang telah ditetapkan. Hasil



kinerja ini tercapai atas kerja sama yang baik dari seluruh pegawai dan stakeholders terkait.

Tujuan penyusunan laporan ini adalah untuk memberikan gambaran tingkat pencapaian instansi yang mengidentifikasi tingkat keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis berdasarkan indikator-indikator yang ditetapkan. Diharapkan penyajian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini dapat menjadi bahan evaluasi untuk perbaikan kinerja agar lebih berorientasi pada hasil, relevan, efektif, efisien dan berkelanjutan di masa mendatang.



Kuala Pembuang, 20 Februari 2025
Kepala Dinas Sosial,

HALIDAH, S.Pi
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 19731004 200604 2 017



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	vi
DAFTAR GAMBAR	viii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Gambaran Umum Organisasi	2
1.2.1 Tugas dan Fungsi	2
1.2.2 Struktur Organisasi	3
1.3 Dukungan Sumber Daya	4
1.3.1 Dukungan Sumber Daya Manusia	4
1.3.2 Dukungan Sumber Daya Sarana dan Prasarana	6
1.3.2.1 Aset yang dikelola	6
1.3.2.2 Produk Layanan Dinas Sosial	7
1.3.2.3 Kotak / Form Layanan dan Aduan, Website dan Media Sosial	8
1.3.2.4 Jaringan online Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation (SIKS-NG) Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN)	10
1.3.3 Dukungan Anggaran	13
1.3.4 Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)	14
1.3.5 Lembaga Kesejahteraan Sosial	14
1.4 Isu Strategis	15
1.5 Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	17
BAB II PERENCANAAN KINERJA	19
2.1 Perjanjian Kinerja Tahun 2025	19
2.1.1 Indikator Kinerja Utama (IKU)	21
2.1.2 Indikator Kinerja Kunci (IKK)	23



2.1.3	Penjenjangan Kinerja (cascading) Tahun 2025	24
2.2	Perencanaan Kinerja Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Sosial Tahun 2025	31
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....		33
3.1	Capaian Kinerja Dinas Sosial Tahun 2025	35
3.1.1	Perbandingan Antara Target Dan Realisasi Kinerja Tahun 2025.....	35
3.1.2	Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun 2025 Dengan Tahun 2024 Dan Beberapa Tahun Terakhir.....	39
3.1.3	Membandingkan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun 2025 Dengan Target Jangka Menengah Yang Terdapat Dalam Dokumen Perencanaan Strategis Dinas Sosial	42
3.1.4	Membandingkan Realisasi Kinerja Tahun 2025 Dengan Standar Nasional	45
3.1.5	Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Atau Peningkatan /Penurunan Kinerja Serta Alternative Solusi Yang Telah Dilakukan.....	46
3.1.6	Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	49
3.1.7	Analisis Program/Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan Atau Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja.....	50
3.2	Realisasi Anggaran Dinas Sosial Tahun 2025.....	54
3.3	Capaian Kinerja Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Sosial Tahun 2025 (Capaian Kinerja Lainnya)	61
3.4	Capaian Upaya Pengentasan Kemiskinan Tahun 2025	63
3.5	Capaian Indeks Kesejahteraan Sosial (IKESOS) Kabupaten Seruyan tahun 2025	68
BAB IV PENUTUP		71
4.1	Kesimpulan	71
4.2	Rekomendasi Peningkatan Kinerja.....	74



LAMPIRAN :

1. REKAPITULASI PENANGANAN PPKS, 12 PEMERLU ATENSI SOSIAL (PAS) JANUARI-DESEMBER 2025
2. LAPORAN HASIL EVALUASI SISTEM AKUNTABILITAS INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP) TAHUN ANGGARAN 2025 DINAS SOSIAL
3. LAPORAN REALISASI ANGGARAN DINAS SOSIAL TAHUN 2025
4. SPJ FUNGSIONAL BULAN DESEMBER 2025 DINAS SOSIAL



DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Daftar Existing Dinas Sosial Per 1 Januari 2026.....	5
Tabel 1.2	Aset Dinas Sosial.....	6
Tabel 1.3	Layanan Publik Dinas Sosial	8
Tabel 1.4	Data Desil 1-5 DTSEN tahun 2025	12
Tabel 1.5	Perbandingan Anggaran Tahun 2025 dan 2024	13
Tabel 1.6	Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PPKS) Tahun 2025..	14
Tabel 1.7	Target dan Realisasi Capaian Kinerja Pelayanan LKS 2025	15
Tabel 1.8	Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Tahun 2025 ..	18
Tabel 2.1	Tujuan dan Sasaran Renstra Dinas Sosial Tahun 2025-2029 ...	21
Tabel 2.2	Perjanjian Kinerja (PK) Esselon II Dinas Sosial Tahun 2025	22
Tabel 2.3	Perjanjian Kinerja (PK) Esselon III Dinas Sosial Tahun 2025	23
Tabel 2.4	Penjajangan Kinerja (cascading) Tahun 2025	25
Tabel 2.5	Target SPM Bidang Sosial Tahun 2025	32
Tabel 3.1	Skala Nilai Peringkat Kinerja	33
Tabel 3.2	Skala Nilai Peringkat Kinerja SAKIP.....	34
Tabel 3.3	Tujuan dan Sasaran Renstra Tahun 2025-2029	34
Tabel 3.4	Perbandingan antara target dan realisasi kinerja Tahun 2025 ..	35
Tabel 3.5	Perbandingan Capaian Kinerja Sasaran ke 1 Dari Tahun 2020-2025	39
Tabel 3.6	Perbandingan Capaian Kinerja Sasaran ke 2 Dari Tahun 2022-2025	41
Tabel 3.7	Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2025 Dengan Target Jangka Menengah / Renstra.....	42
Tabel 3.8	Perbandingan realisasi kinerja Dinas Sosial Kabupaten Seruyan, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah dan Kemensos	45
Tabel 3.9	Capaian Tujuan dan Sasaran Renstra Tahun 2024 dan 2025 ...	46
Tabel 3.10	Permasalahan dan rencana tindak lanjut.....	47



Tabel 3.11 Efisiensi Penggunaan Sumber Daya.....	49
Tabel 3.12 Analisis Program Kegiatan yang mendukung keberhasilan / kegagalan	51
Tabel 3.13 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Daerah TA 2025	54
Tabel 3.14 Perbandingan Anggaran dan Realisasi Belanja TA 2025 dan 2024	55
Tabel 3.15 Rincian Realisasi Belanja Per Program Kegiatan Dan Sub Kegiatan Dinas Sosial Kabupaten Seruyan TA. 2025	58
Tabel 3.16 Realisasi SPM Bidang Sosial Tahun 2025	62
Tabel 3.17 Data Kemiskinan Kabupaten Seruyan	63
Tabel 3.18 Laporan Aksi RB Tematik Pengentasan Kemiskinan Tahun 2025	66
Tabel 3.19 Indeks Kesejahteraan Sosial (Ikesos) Provinsi Kalimantan Tengah per Dimensi	69
Tabel 3.20 Indeks Kesejahteraan Sosial (Ikesos) Kabupaten Seruyan Tahun 2025.....	69
Tabel 3.21 Kriteria Indeks Kesejahteraan Sosial (Ikesos)	69



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Bagan Struktur Organisasi Dinas Sosial Kabupaten Seruyan .	4
Gambar 1.2	Media Sosial	9
Gambar 1.3	Tampilan Aplikasi SIKS NG DTSEN	12
Gambar 1.4	12 Pemerlu Atensi Sosial (PAS).....	17
Gambar 2.1	Teks Perjanjian Kinerja Dinas Sosial tahun 2025	19
Gambar 2.2	Pohon Kinerja Dinas Sosial Tahun 2025-2029	25
Gambar 3.1	Grafik Perbandingan Capaian Kinerja Sasaran ke 1 Dari Tahun 2020-2025	40
Gambar 3.2	Grafik Perbandingan Capaian Kinerja Sasaran ke 2 Dari Tahun 2022-2025	41
Gambar 3.3	Grafik Anggaran dan Realisasi Belanja Dinas Sosial TA 2025	55
Gambar 3.4	Grafik Data Kemiskinan Kabupaten Seruyan Tahun 2022-2025	64



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) adalah rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah. Sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, bahwa setiap instansi pemerintah diwajibkan melaporkan segala aktivitas yang dilaksanakan dan di capai sebagai bentuk implementasi terhadap pelaksanaan SAKIP dan wujud pertanggungjawaban dalam mencapai misi dan tujuan organisasi perangkat daerah.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Sosial Tahun 2025 merupakan bagian dari pertanggungjawaban sebagai Instansi Pemerintah dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Dinas Sosial sebagai pendukung administratif dan tata kelola sebuah lembaga pemerintah daerah berkewajiban menerapkan tata pemerintahan yang baik (good governance) sebagai harapan semua pihak.

Maksud dan tujuan penyusunan LKjIP ini adalah untuk menilai dan mengevaluasi pencapaian kinerja pada Dinas Sosial sepanjang tahun 2025, juga untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Kinerja Tahunan dan Perjanjian Kinerja Tahun 2025.

Sebagai perangkat daerah yang membidangi urusan sosial, Dinas



Sosial terus berupaya meningkatkan taraf kesejahteraan, kualitas dan kelangsungan hidup fakir miskin, kelompok rentan dan orang tidak mampu, sehingga dapat berkontribusi dalam penurunan angka kemiskinan.

Pelaksanaan program dan kegiatan diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, melalui dua strategi utama yaitu mengurangi beban pengeluaran dan meningkatkan pendapatan. Selain itu dilakukan pula upaya untuk meningkatkan profesionalisme dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

1.2 GAMBARAN UMUM ORGANISASI

1.2.1 TUGAS DAN FUNGSI

Organisasi Perangkat Daerah Dinas Sosial Kabupaten Seruyan dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Seruyan, dan diatur tata kelola organisasinya berdasarkan Peraturan Bupati Seruyan Nomor 20 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan fungsi serta Tata Kerja pada Dinas Sosial Kabupaten Seruyan.

Dinas Sosial Kabupaten Seruyan merupakan unsur pelaksana urusan wajib pelayanan dasar pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah, mempunyai tugas membantu Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah disektor Kesejahteraan Sosial.

Dinas Sosial Kabupaten Seruyan mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang sosial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dinas Sosial Kabupaten Seruyan melaksanakan Fungsi sebagai berikut :



- a. Pemberdayaan Sosial Komunitas Adat Terpencil (KAT);
- b. Pengumpulan Sumbangan dalam daerah;
- c. Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah;
- d. Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di daerah untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal;
- e. Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial;
- f. Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial;
- g. Pemeliharaan Anak-anak terlantar;
- h. Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah;
- i. Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial;
- j. Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana; dan
- k. Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional.

1.2.2 STRUKTUR ORGANISASI

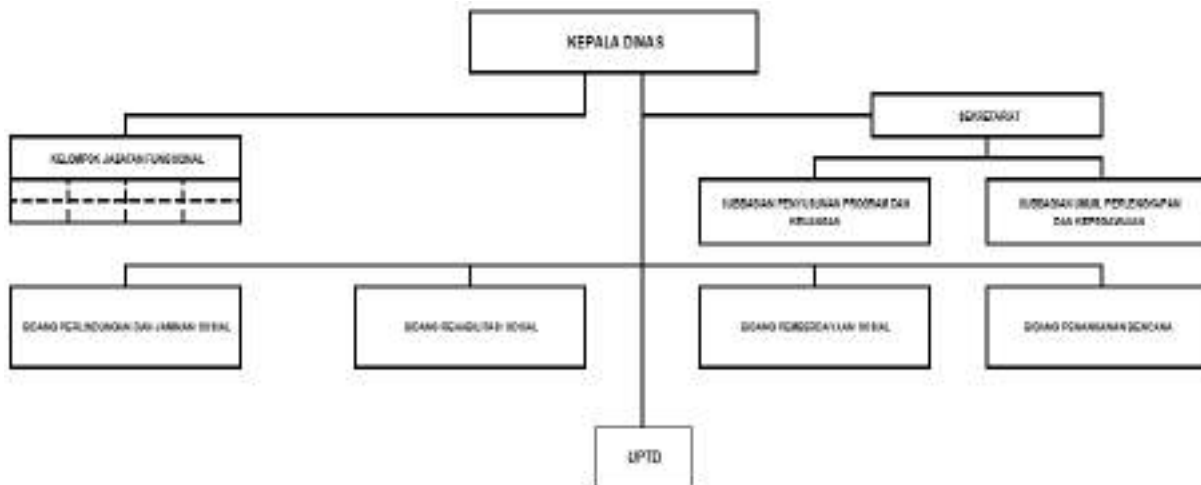
Dalam menjalankan tugas dan fungsinya Dinas Sosial Kabupaten Seruyan mempunyai Susunan Organisasi sebagai berikut :

- a. Kepala Dinas.
- b. Sekretariat, terdiri atas:
 - 1) Subbagian Penyusunan Program dan Keuangan; dan
 - 2) Subbagian Umum, Perlengkapan dan Kepegawaian.
- c. Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial;
- d. Bidang Rehabilitasi Sosial;
- e. Bidang Pemberdayaan Sosial;
- f. Bidang Penanganan Bencana;



- g. Kelompok Jabatan Fungsional;
- h. Kelompok Jabatan Pelaksana; dan
- i. UPTD.

Gambar 1.1
Bagan Struktur Organisasi Dinas Sosial Kabupaten Seruyan



1.3 DUKUNGAN SUMBER DAYA

1.3.1 Dukungan Sumber Daya Manusia

Dukungan Sumber Daya Manusia Aparatur Sipil Negara (ASN) pada Dinas Sosial Kabupaten Seruyan yang berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebanyak 22 (dua puluh dua) orang, Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) sebanyak 4 (empat) orang dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu sebanyak 16 (enam belas) orang dengan rincian sebagai berikut :

Menurut eselon terdiri dari :

Eselon IV : 2 orang

Eselon III : 5 orang

Eselon II : 1 orang

Menurut golongan terdiri dari :

Golongan IV : 6 orang

Golongan III : 14 orang

Golongan II : 2 orang

Menurut pendidikan terdiri dari :



SLTA : 14 orang
D.III : 4 orang
S-1 : 21 orang
S-2 : 4 orang

Menurut jenis kelamin terdiri dari :

Laki-laki : 18 orang
Perempuan : 25 orang

Dibidang sumber daya manusia, jumlah pegawai yang ada pada Dinas Sosial Kabupaten Seruyan per Januari 2026 sebagaimana tersaji pada tabel 2.1 dibawah ini :

Tabel 1.1
Daftar Existing Dinas Sosial Per 1 Januari 2026

NO	NAMA JABATAN	STATUS ASN			KELAS JABATAN
		PNS	PPPK	PPPK PW	
1	KEPALA DINAS	1	-	-	14
2	PEKERJA SOSIAL MADYA	-	-	-	11
3	PEKERJA SOSIAL MUDA	4	-	-	10
4	PEKERJA SOSIAL PERTAMA	-	-	-	8
5	PEKERJA SOSIAL PELAKSANA TERAMPIL	-	-	-	6
6	PEKERJA SOSIAL PELAKSANA PEMULA	1	-	-	5
7	PENGGERAK SWADAYA MASYARAKAT MUDA	-	-	-	9
8	PERENCANA MADYA	-	-	-	11
9	PERENCANA MUDA	-	-	-	10
10	PERENCANA PERTAMA	-	-	-	8
11	PRANATA KOMPUTER PELAKSANA LANJUTAN	-	-	-	7
12	PRANATA KOMPUTER PELAKSANA	-	-	-	6
13	PRANATA KOMPUTER TTERAMPIL	1	-	-	7
14	SEKRETARIS	1	-	-	13
15	KEPALA SUB BAGIAN PENYUSUNAN PROGRAM DAN KEUANGAN	1	-	-	9
16	PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN	3	-	-	7
17	PENGOLAH DATA DAN INFORMASI	-	-	-	6
18	PENGADMINISTRASI PERKANTORAN	-	1	-	5
19	PENATA LAYANAN OPERASIONAL	-	-	2	
20	PENGELOLA LAYANAN OPERASIONAL	-	-	-	
21	OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL	-	-	-	
22	KEPALA SUB BAGIAN UMUM, PERLENGKAPAN DAN KEPEGAWAIAN	1	-	-	9
23	PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN	-	2	-	7
24	PENGOLAH DATA DAN INFORMASI	-	-	-	6
25	PENGADMINISTRASI PERKANTORAN	-	1	-	5
26	PENATA LAYANAN OPERASIONAL	-	-	-	
27	PENGELOLA LAYANAN OPERASIONAL	-	-	-	
28	OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL	-	-	2	
29	KEPALA BIDANG PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	1	-	-	11



30	PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN	1	-	-	7
31	PENGOLAH DATA DAN INFORMASI	1	-	-	6
32	PENGADMINISTRASI PERKANTORAN	1	-	-	5
33	PENATA LAYANAN OPERASIONAL	-	-	-	
34	PENGELOLA LAYANAN OPERASIONAL	-	-	-	
35	OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL	-	-	2	
36	KEPALA BIDANG REHABILITASI SOSIAL	1	-	-	11
37	PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN	-	-	-	7
38	PENGOLAH DATA DAN INFORMASI	-	-	-	6
39	PENGADMINISTRASI PERKANTORAN	-	-	-	5
40	PENATA LAYANAN OPERASIONAL	-	-	1	
41	PENGELOLA LAYANAN OPERASIONAL	-	-	-	
42	OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL	-	-	3	
43	KEPALA BIDANG PEMBERDAYAAN SOSIAL	1	-	-	11
44	PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN	-	-	-	7
45	PENGOLAH DATA DAN INFORMASI	-	-	-	6
46	PENGADMINISTRASI PERKANTORAN	-	-	-	5
47	PENATA LAYANAN OPERASIONAL	-	-	1	
48	PENGELOLA LAYANAN OPERASIONAL	-	-	1	
49	OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL	-	-	1	
50	KEPALA BIDANG PENANGANAN BENCANA	1	-	-	11
51	PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN	-	-	-	7
52	PENGOLAH DATA DAN INFORMASI	-	-	-	6
53	PENGADMINISTRASI PERKANTORAN	2	-	-	5
54	PENATA LAYANAN OPERASIONAL	-	-	2	
55	PENGELOLA LAYANAN OPERASIONAL	-	-	1	
56	OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL	-	-	-	
JUMLAH		22	4	16	

1.3.2 Dukungan Sumber Daya Sarana dan Prasarana

1.3.2.1 Aset yang dikelola

Dukungan Sumber Daya Sarana dan Prasarana Dinas Sosial pada tahun 2025 berupa harta / aset yang dikelola sebesar Rp 6.146.199.026,00 untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi dinas, dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 1.2
Aset Dinas Sosial

No.	Klasifikasi	Nilai Aset Tetap
1	Tanah	1.287.994.500
2	Peralatan dan Mesin	2.953.012.580
3	Gedung dan Bangunan	5.867.889.250
4	Jalan, Irigasi dan Bangunan	3.173.368.100
Jumlah		13.282.264.430

Secara rinci barang sarana prasarana milik Dinas Sosial yang mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Sosial



antara lain 4 (empat) bidang tanah Taman Makam Pahlawan, 1 (satu) bidang tanah peruntukan Sekolah Rakyat (SR), Kendaraan operasional Dinas Sosial Kabupaten Seruyan yakni 1 (satu) unit kendaraan roda empat (minibus) kendaraan dinas jabatan, 2 (dua) unit kendaraan roda empat Hilux, 1 (satu) unit DUMLAP, 1 (satu) unit truk bak terbuka, 2 (dua) unit kendaraan operasional Reaksi Cepat dan 10 (sepuluh) unit kendaraan roda dua. Kendaraan operasional Dinas Sosial sebagian besar didapat dari pengadaan tahun 2010, sehingga biaya pemeliharaan semakin besar tiap tahunnya.

Kebutuhan ruangan kantor umum belum tersedia secara lengkap yakni ruang rapat, ruang mushola, ruang menyusui dan ruang arsip. Untuk ketersediaan ruangan kerja berbanding dengan rasio pegawai masih belum mencukupi. Adapun perlengkapan kantor berupa meja, kursi, lemari, filling cabinet, pendingin ruangan, alat pemadam kebakaran, CCTV dan lain-lain sudah tersedia dalam kondisi baik. Rasio personal komputer/laptop dibanding jumlah pegawai mendekati 1 : 2. Dengan demikian ketersediaan sarana dan prasarana belum memadai. Terutama untuk personal computer, laptop dan ruang kerja kantor.

1.3.2.2 Produk Layanan Dinas Sosial

Dalam meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat dan dukungan terhadap proses pencapaian Kinerja, Dinas Sosial Kabupaten Seruyan mempunyai 6 list produk layanan yang diharapkan dapat meningkatkan pelayanan publik kinerja Dinas, yaitu sebagai berikut :



Tabel 1.3
Layanan Publik Dinas Sosial

NO	PELAYANAN PUBLIK	PELAKSANA
1	Layanan Pengumpulan Sumbangan (PUB) Undian Gratis Berhadiah (UGB)	Bidang Pemberdayaan Sosial
2	Layanan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial (LKS)	Bidang Pemberdayaan Sosial
3	Layanan Penyediaan Permakanan, Sandang Dan Alat Bantu Untuk PPKS	Bidang Rehabilitasi Sosial
4	Layanan Kedaruratan Rehabilitasi Sosial	Bidang Rehabilitasi Sosial
5	Layanan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Program Keluarga Harapan Dan Program Sembako	Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial
6	Layanan Kedaruratan Dan Logistik Bencana	Bidang Penanganan Bencana

1.3.2.3 Kotak / form Layanan dan aduan, Website Dan Media Sosial

Instrumen pendukung penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP) di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Seruyan dapat dilihat pada Website : <http://dinsos.seruyan@gmail.com>, Media Sosial Facebook Dinas Sosial Seruyan dan Media Sosial Instagram @dinsos_seruyan yang menyajikan informasi Dinas Sosial Kabupaten Seruyan.

Terdapat juga kotak layanan aduan dan form layanan aduan, serta layanan aduan online melalui website, facebook dan instagram Dinas Sosial yang diharapkan dapat menampung kebutuhan layanan atas masalah, aduan, kritis dan saran dari masyarakat dalam pelaksanaan peningkatan kesejahteraan sosial sesuai tugas dan fungsi Dinas Sosial.

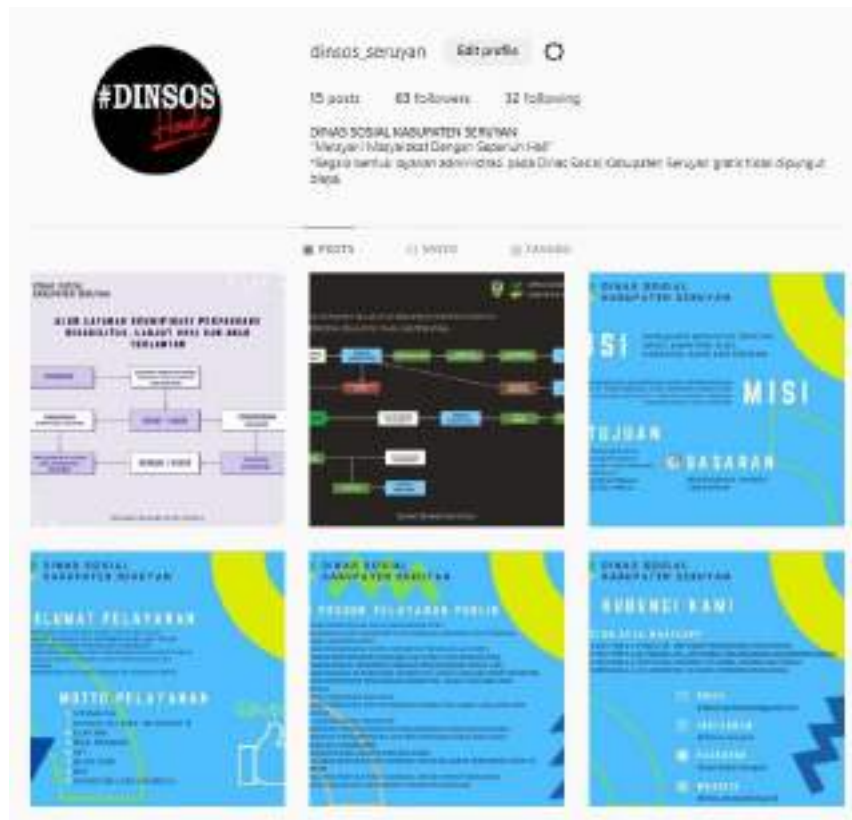


Gambar 1.2
Media Sosial



Website dan Media Sosial (Medsos) Dinas Sosial Kabupaten Seruyan





1.3.2.4 Jaringan online Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation (SIKS-NG) Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN)

DTSEN adalah singkatan dari Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional, sebuah sistem basis data terpadu milik Pemerintah Indonesia yang memuat informasi kondisi sosial, ekonomi, dan tingkat kesejahteraan seluruh penduduk. Sistem ini resmi diperkenalkan melalui Inpres No. 4 Tahun 2025 sebagai basis data utama untuk penyaluran berbagai program bantuan sosial (bansos) dan pelayanan publik.

DTSEN hadir untuk menggantikan sistem lama seperti DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial) guna menciptakan satu pintu data nasional yang lebih akurat dan tepat sasaran.



Transisi perubahan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) menjadi Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) yang merupakan penggabungan dari beberapa data terkait kesejahteraan sosial, seperti Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), Regsosek, dan P3KE, mengakibatkan data yang dikelola Dinas Sosial meningkat dan perlu verifikasi dan validasi data kembali dengan ground check (GC) ke lapangan.

Ada dua jalur pemutakhiran data yaitu jalur formal dan jalur partisipasi. jalur formal ini sangat strategis karena melibatkan RT, RW, kepala desa, secara berjenjang dari tingkat pedesaan / kelurahan, kecamatan, kabupaten / kotamadya, gubernur, sampai pada Menteri Sosial. Jalur partisipasi adalah adanya partisipasi dari masyarakat yang dibuka seluas-luasnya, baik lewat aplikasi, command center (pusat komando), WhatsApp, pendamping PKH hingga relawan sosial.

Dalam sistem Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN), Desil adalah metode pemeringkatan kesejahteraan yang membagi seluruh populasi rumah tangga ke dalam 10 kelompok sama besar (masing-masing 10%). Mengklasifikasikan rumah tangga ke dalam desil kesejahteraan (Desil 1-10). Prioritas bansos reguler (seperti PKH, Sembako dan PBI) diberikan kepada masyarakat di Desil 1 hingga Desil 5.

Pada tahun 2025 Pengelolaan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) Desil yang dikelola oleh Dinas Sosial Kabupaten Seruyan sebanyak 81.994 Jiwa dan yang menerima Bantuan Sosial Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Sosial Program Sembako, Bantuan Sosial Bantuan Sosial (PBI) Jaminan Kesehatan JKN, Bantuan Sosial Atensi dan Bansos Lainnya sebanyak 51.729 Jiwa.



Tabel 1.4
Data Desil 1-5 DTSEN tahun 2025

NO	DESIL	JIWA	BANSOS	NON BANSOS
1	DESIL 1	10.624	8.871	1.753
2	DESIL 2	16.473	13.675	2.798
3	DESIL 3	18.083	14.626	3.457
4	DESIL 4	18.723	9.618	9.105
5	DESIL 5	18.091	4.939	13.152
JUMLAH		81.994	51.729	30.265

Gambar 1.3
Tampilan Aplikasi SIKS NG DTSEN





Cara mengecek dan memperbarui data DTSEN :

1. Cek Mandiri: Dapat dilakukan melalui website resmi Cek Bansos Kemensos dengan memasukkan data wilayah sesuai KTP.
2. Pendaftaran/Perubahan Data: Jika terjadi perubahan kondisi ekonomi atau belum terdata, warga dapat melapor ke Kantor Dinas Sosial atau melalui mekanisme musyawarah desa/kelurahan.
3. Aplikasi Resmi: Gunakan aplikasi "Cek Bansos" untuk fitur usul sanggah jika menemukan data yang tidak sesuai di lapangan.

1.3.3 Dukungan Anggaran

Dukungan anggaran untuk melaksanakan tugas dan fungsi Dinas Sosial kabupaten Seruyan berasal dari APBD Daerah kabupaten Seruyan. Untuk tahun 2025 dibanding tahun 2024 terdapat penurunan anggaran belanja sebesar Rp.(2.350.335.672,00) atau 26,60%. Rincian dukungan anggaran untuk Belanja Operasional dan Belanja Modal Dinas Sosial berdasarkan jenis belanja adalah sebagai berikut :

Tabel 1.5
Perbandingan Anggaran Tahun 2025 dan 2024

URAIAN	ANGGARAN 2025	ANGGARAN 2024	SELISIH	%
BELANJA DAERAH	6.485.074.328,00	8.835.410.000,00	(2.350.335.672,00)	(26,60)
BELANJA OPERASI	6.375.890.528,00	8.731.366.100,00	(2.355.475.572,00)	(26,98)
Belanja Pegawai	3.656.400.247,00	3.616.383.708,00	40.016.539,00	1,11
Belanja Barang dan Jasa	2.344.690.281,00	4.205.446.292,00	(1.860.756.011,00)	(44,25)
Belanja Hibah	300.000.000,00	43.363.600,00	256.636.400,00	591,82
Belanja Bantuan Sosial	74.800.000,00	866.172.500,00	(791.372.500,00)	(91,36)
BELANJA MODAL	109.183.800,00	104.043.900,00	5.139.900,00	4,94
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	109.183.800,00	104.043.900,00	5.139.900,00	4,94
JUMLAH BELANJA	6.485.074.328,00	8.835.410.000,00	(2.350.335.672,00)	(26,60)



1.3.4 Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)

Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disebut PSKS adalah perseorangan, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang dapat berperan serta untuk menjaga, menciptakan, mendukung, dan memperkuat penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Data Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang dibina oleh Dinas Sosial Kabupaten Seruyan selama tahun 2025 adalah sebagai berikut :

Tabel 1.6
Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PPKS) Tahun 2025

NO	POTENSI DAN SUMBER KESEJAHTERAAN SOSIAL	JUMLAH	SERTIKAT KOMPETENSI / AKREDITASI	SUMBER DATA	KETERANGAN
1	Pekerja Sosial (Profesional)	5	1	Data Peksos Dinsos Tahun 2025	1 Orang Peksos Murni, 4 orang Peksos Penyetaraan (Sekretariat Dinas Sosial)
2	Pekerja Sosial Masyarakat (PSM)	7	3	Data PSM Kab. Seruyan	Dayasos Dinsos
3	Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK)	10	3	SK Kemensos tt TKSK	Dayasos Dinsos
4	Penyuluh Sosial Masyarakat (Pensosmas)	3	3	Data Pensosmas Dinsos Tahun 2025	Dayasos Dinsos
5	Pendamping Program Keluarga Harapan (PKH)	5	5	Data SDM Kesejahteraan Sosial 2025	Dayasos Dinsos
6	Pendamping Rehabilitasi Sosial	1	1	Data SDM Kesejahteraan Sosial 2025	Dayasos Dinsos
7	Relawan Sosial	2	2	Data SDM Kesejahteraan Sosial 2025	Dayasos Dinsos
8	Pelopor Perdamaian	3	0	Data SDM Kesejahteraan Sosial 2025	Penanganan Bencana
9	Taruna siaga Bencana (TAGANA)	65	65	SK Tagana	Penanganan Bencana
10	Kampung Siaga Bencana (KSB)	2	0	SK KSB	Penanganan Bencana
11	Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS)	10	4	Daftar Direktori LKS LKSA	Dayasos Dinsos
12	Karang taruna	59	0	Data BNBA Karang Taruna Kab. Seruyan	Dayasos Dinsos
13	Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	1	0	SK Bupati tentang LK3	Dayasos Dinsos
14	Keluarga pioner	5	0	Data keluarga pioneer	Dayasos Dinsos
15	Wahana Kesejahteraan Sosial Keluarga Berbasis Masyarakat (WKSMBM)	0	0	n/a	Dayasos Dinsos
16	Wanita Pemimpin Kesejahteraan Sosial (WPKS)	0	0	n/a	Dayasos Dinsos
17	Dunia Usaha	4	0	Data Dunia Usaha Penyelenggara Kessos / CSR	Dayasos Dinsos
JUMLAH PSKS		182	87		

1.3.5 Lembaga Kesejahteraan Sosial

Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) adalah organisasi sosial yang dibentuk oleh masyarakat untuk menyelenggarakan pelayanan kesejahteraan sosial bagi Pemerlu Pelayanan



Kesejahteraan Sosial (PPKS). Berdasarkan regulasi terbaru (termasuk Permensos No. 5 Tahun 2024), LKS berada di bawah pembinaan teknis dan pengawasan Dinas Sosial di tingkat Kabupaten dan Provinsi. Sarana Sosial berupa Lembaga Kesejahteraan Sosial yang terdiri dari LKS dan LKSA sangat penting karena sebagai wadah untuk mendapatkan layanan kesejahteraan untuk masyarakat dan anak-anak tidak mampu atau tidak memiliki keluarga, berikut data LKS yang terdapat di Kabupaten Seruyan :

Tabel 1.7
Target dan Realisasi Capaian Kinerja Pelayanan LKS 2025

LKS	Capaian Kinerja Pelayanan					
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA)	4	5	5	6	8	8
Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS)					1	2

Pada tahun 2025 Lembaga Kesejahteraan Sosial terdaftar di Dinas Sosial berjumlah 10 LKS yang terdiri dari LKSA Nuruzh zholam, LKSA Mahad Hidayatul Amin, LKSA Hj. Maskacil, LKSA Al Mustaghfirin, LKSA Hidayatul Salikin, LKSA Rodatul Tolibin, LKSA Darul Madani, LKSA Al Ma'arif, Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) dan LKS Seruyan Peduli.

1.4 ISU STRATEGIS

Eksistensi sebuah institusi bergantung sejauh mana institusi tersebut mampu menangkap dan merespon isu strategis dengan berbagai kebijakan dan tindakan yang tepat. Secara umum isu strategis dapat bersumber dari lingkungan eksternal maupun lingkungan internal. Isu-isu strategis Dinas Sosial dijabarkan sebagai berikut :

1. Optimalisasi Perlindungan Dan Jaminan Sosial.

Peningkatan Sistem Perlindungan dan Jaminan Sosial yang optimal sebagai antisipasi Peningkatan Jumlah Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) di Kabupaten Seruyan



2. Optimalisasi Pelayanan Dasar Rehabilitasi Sosial

Adapun yang akan dilakukan berupa penerapan standar pelayanan minimal (SPM) bidang sosial dengan memberikan pelayanan dasar kesehatan dan sosial. Penyempurnaan perencanaan dan penganggaran dalam mendukung pelaksanaan Program Kegiatan Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sosial;

3. Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)

Perlunya Peningkatan kapasitas, kualitas, kuantitas dan pemerataan SDM Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial dan Lembaga Sosial dalam penyelenggara pelayanan kesejahteraan sosial sebagai bentuk dukungan keterlibatan dalam penyelenggaraan kegiatan sosial. Keberadaan pendamping kesejahteraan sosial menjadi salah satu aspek terpenting untuk memastikan bahwa program kesejahteraan sosial sudah terlaksana dengan baik. Dinas Sosial memiliki beberapa pendamping seperti pendamping rehabilitasi sosial, pendampingan Program Keluarga Harapan (PKH). Namun dalam pelaksanaannya pendampingan yang dilakukan tidak optimal serta belum adanya mekanisme pendampingan dan monitoring lanjutan yang valid dan komprehensif.

4. Peningkatan Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS)

Melakukan perbaikan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) SIK-NG berupa pengelolaan data (verifikasi, validasi dan pemutakhiran DTKS), pengelolaan informasi kesejahteraan sosial, fasilitasi bantuan sosial dan kesejahteraan keluarga, sosialisasi bantuan sosial pengembangan ekonomi, peningkatan keaktifan potensi sumber kesejahteraan sosial (PSKS) dan penanganan sistem layanan terpadu penanganan kemiskinan (SLRT).

5. Penurunan Angka Kemiskinan

Tugas Dinas Sosial sebagai salah satu perangkat daerah yang sasaran strategisnya mendukung program pengentasan kemiskinan di Kabupaten Seruyan, dimana target penurunan Tingkat Kemiskinan



sesuai Rencana Pembangunan Daerah (RPJMD) Kabupaten Seruyan Periode Tahun 2025-2029 sebesar 6,36 dari baseline kondisi awal tahun 2024 sebesar 7,08.

1.5 PEMERLU PELAYANAN KESEJAHTERAAN SOSIAL (PPKS)

Renstra (Rencana Strategis) Dinas Sosial merupakan dokumen yang memuat tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, dan program kegiatan untuk memberikan layanan kesejahteraan sosial kepada masyarakat. Kelompok sasaran layanan Renstra Dinas Sosial Kabupaten Seruyan adalah Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS).

UU Kesejahteraan Sosial mendefinisikan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) sebagai perseorangan, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan, atau gangguan tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya, sehingga memerlukan pelayanan sosial untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Pelayanan sosial ini mencakup berbagai bentuk bantuan, baik materiil maupun non-materiil, untuk meningkatkan kualitas hidup dan kemandirian PPKS.

Kelompok sasaran layanan Renstra Dinas Sosial 12 PAS dapat dikategorikan sebagai berikut:

Gambar 1.4
12 Pemerlu Atensi Sosial (PAS)





Data Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang terdata dan tertangani oleh Dinas Sosial Kabupaten Seruyan selama Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

Tabel 1.8
Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Tahun 2025

NO	12 KELOMPOK PEMERLU ATENSI SOSIAL (12 PAS)	TERDATA	TERTANGANI	BIDANG TEKNIS	
1	ANAK - ANAK RENTAN	1. Balita terlantar	0	0	Rehabilitasi Sosial
		2. Anak terlantar	15	15	Rehabilitasi Sosial
		3. Anak berhadapan dengan hukum (ABH)	17	17	Rehabilitasi Sosial
		4. Anak difable,	44	44	Rehabilitasi Sosial
		5. Anak korban tindak kekerasan,	13	13	Rehabilitasi Sosial
		6. Anak jalanan,	0	0	Rehabilitasi Sosial
		7. Anak yang memerlukan perlindungan khusus (AMPK)	23	23	Rehabilitasi Sosial
		8. Anak Yatim Piatu (YAPI)	25	25	Rehabilitasi Sosial
2	DIFABEL	9. Penyandang Disabilitas	320	156	Rehabilitasi Sosial
3	LANSIA TERLANTAR	10. Lanjut Usia Terlantar / Miskin	1694	220	Rehabilitasi Sosial
4	BERPENDAPATAN RENDAH	11. Gelandangan / OT	2	2	Rehabilitasi Sosial
		12. Pengemis	1	1	Rehabilitasi Sosial
		13. Pemulung	3	3	Rehabilitasi Sosial
5	KORBAN BENCANA	14. Bencana Alam	1235	1235	Penanganan Bencana
		15. Bencana Sosial	156	156	Penanganan Bencana
6	AFIRMASIS KHUSUS	16. Kelompok Adat Terpencil (KAT)	tdk ada	tdk ada	Pemberdayaan Sosial
7	WARGA BINAAN / Bekas Warga Binaan Lembaga Pemasyarakatan (BWBLP)	17. Narapidana (NAPI)	0	0	Rehabilitasi Sosial
		18. Narapidana Teroris (NAPITER)	0	0	Rehabilitasi Sosial
8	KORBAN KEKERASAN	19. Korban tindak kekerasan	0	0	Rehabilitasi Sosial
		20. Korban trafficking	0	0	Rehabilitasi Sosial
		21. Pekerja migran bermasalah sosial	2	2	Rehabilitasi Sosial
9	KORBAN NAPZA DAN HIV/AIDS	22. Korban penyalahgunaan NAPZA	0	0	Rehabilitasi Sosial
		23. Penderita HIV/AIDS	0	0	Rehabilitasi Sosial
10	BERMASALAH SOSIAL	24. Kelompok minoritas	0	0	Rehabilitasi Sosial
		25. Keluarga bermasalah sosial psikologis	3	3	Resos dan Dayasos
11	PEREMPUAN RENTAN	26. Perempuan yang rawan ekonomi (WRSE)	20	20	Rehabilitasi Sosial
		27. Tuna Susila	0	0	Rehabilitasi Sosial
12	FAKIR MISKIN	28. Fakir Miskin / rentan (penerima bansos)	51.729	51.729	Perlindungan dan Jaminan Sosial
JUMLAH			55.302	53.664	



BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1 PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Perjanjian kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (*outcome*) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup *outcome* yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

Dari Rencana Strategis Dinas Sosial untuk mendukung pencapaian sasaran Menurunnya Kemiskinan di Kabupaten Seruyan dengan fokus pada penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) di Kabupaten Seruyan, maka di susunlah penjenjangan kinerja (*cascading*) Dinas Sosial.

Fungsi utama *cascading* (penjenjangan) kinerja adalah menurunkan sasaran strategis pimpinan ke level yang lebih rendah (unit/pegawai) guna memastikan keselarasan, fokus kegiatan, dan akuntabilitas. Proses ini membangun hubungan sebab-akibat (*logika if-then*) dari tujuan strategis ke aktivitas operasional, sehingga memudahkan pengukuran kinerja dan optimalisasi sumber daya. Penjenjangan kinerja dilakukan melalui pohon kinerja (*pokin*) yang menjabarkan hasil ke faktor kunci keberhasilan (*critical success factor*) hingga ke indikator kinerja individu.



Dari cascading (penjenjangan) kinerja Dinas Sosial maka ditetapkan Perjanjian Kinerja tahun 2025 antara Kepala Dinas Sosial dengan Bupati Kabupaten Seruyan. Untuk selanjutnya Perjanjian Kinerja tersebut diturunkan dalam perjanjian kinerja internal berjenjang dari Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Jabatan Administrator, Jabatan Pengawas, Jabatan Fungsional Tertentu (JFT) sampai dengan Jabatan Fungsional Umum (JFU).

Berikut Perjanjian Kinerja antara Kepala Dinas Sosial dengan Bupati Kabupaten Seruyan Tahun 2025 berdasarkan Indikator Kinerja Utama (IKU) tahun 2025-2029 :

**Gambar 2.1
Teks Perjanjian Kinerja Dinas Sosial tahun 2025**

PERNYATAAN PEGAWAI KINERJA



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil yang dilaksanakan di bawah ini:

Nama : ANGGA SE
Jabatan : Kepala Dinas Sosial

Sebagai pejabat dijabat pejabat pertama

Nama : DJAINUDDIN MOOR
Jabatan : Pl. Bupati Seruyan

Sebelum atasannya pejabat pertama, sebagaimana dijabat pejabat kedua

Pejabat pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang selarasnya sesuai dengan perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan, pelaksanaan dan capaian pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pejabat kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Banda Pongor, Januari 2025

Pejabat Kedua
Pl. Bupati Seruyan


DJAINUDDIN MOOR

Pejabat Pertama
Kepala Dinas Sosial


ANGGA SE
Pembina Utama Muda (IV/c)
MP. 19680405 198703 1 001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya Pemangangan Pemenuh Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	Persentase Pemenuh Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang Tertarget	100%
2.	Meningkatnya Kualitas Layanan Perangkat Daerah	Nilai JAKIP Perangkat Daerah	94

No.	Program/Kegiatan	Anggaran	Keterangan (APBD/APBN)
1.	Program Pemberdayaan Sosial	Rp. 243.609.189	APBD
2.	Program Penguasaan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan	Rp. 1.699.000	APBD
3.	Program Rehabilitasi Sosial	Rp. 344.300.000	APBD
4.	Program Perlindungan Dan Justice Sosial	Rp. 308.006.000	APBD
5.	Program Penguasaan Bencana	Rp. 334.569.500	APBD
6.	Program Pengabdian Tenaga Pelaksana	Rp. 50.390.000	APBD
7.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 5.175.895.820	APBD

Pejabat Kedua
Pl. Bupati Seruyan


DJAINUDDIN MOOR

Pejabat Pertama
Kepala Dinas Sosial


ANGGA SE
Pembina Utama Muda (IV/c)
MP. 19680405 198703 1 001



Sehubungan dengan ditetapkannya Rencana Strategis Perangkat Daerah yang sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2025-2029 dengan Peraturan Bupati Nomor 26 tahun 2025 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah tahun 2025-2029 tanggal 19 September 2025 dan Peraturan Bupati Nomor 37 tahun 2025 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2025-2029 tanggal 21 Desember 2025, serta adanya mutasi pejabat eselon II pada tanggal 10 Oktober 2025, maka ada penyesuaian terhadap target indikator penunjang dan perubahan pejabat eselon II (Kepala Dinas) yang memperpanjang kinerja Dinas Sosial pada tahun 2025 dari JPT Pratama ANGGA,SE digantikan dengan JPT Pratama HALIDAH, S.Pi.

Perumusan tujuan (*intermediate outcome*) dan sasaran Rencana Stategis Dinas Sosial tahun 2025-2029 dengan relevansi terhadap Sasaran RPJMD :

Tabel 2.1
Tujuan dan Sasaran Renstra Dinas Sosial Tahun 2025-2029

NSPK SASARAN RPJMD YG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET TAHUN						K E T
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
Menurunnya kemiskinan (Misi I, Sasaran ke-5)	Menurunkan Jumlah Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)		Indikator Tujuan : Persentase Penurunan Jumlah Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	95%	90%	85%	80%	75%	75%	
		Meningkatkan Penanganan terhadap Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	Indikator Sasaran : Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang Tertangani	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
		Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Dinas Sosial Kabupaten Seruyan	Indikator Sasaran : Nilai SAKIP Dinas Sosial	58	60	62	64	66	66	

2.1.1 Indikator Kinerja Utama (IKU)

Berikut Indikator Kinerja Utama (IKU) yang menjadi Perjanjian Kinerja (PK) Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama untuk tahun 2025 sesuai tabel :



Tabel 2.2
Perjanjian Kinerja (PK) Eselon II Dinas Sosial Tahun 2025

NO	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	IKU YANG MENJADI PK	TARGET	DEFINISI OPERASIONAL / FORMULASI PERHITUNGAN	PENANGGUNG JAWAB
1.	Menurunkan Jumlah Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	Meningkatkan Penanganan terhadap Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang Tertangani	100%	<p>Definisi Operasional : Perhitungan jumlah PPKS yang telah menerima pelayanan sosial, dibagi dengan total PPKS yang teridentifikasi, kemudian dikalikan seratus persen, yang menunjukkan efektivitas intervensi sosial dalam memenuhi kebutuhan dasar mereka</p> <p>Formulasi Perhitungan: Jumlah PPKS yang mendapat penanganan -----x 100% Jumlah PPKS yang terdata di Kabupaten Seruyan</p>	ESS. II
		Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Dinas Sosial Kabupaten Seruyan	Nilai SAKIP Dinas Sosial	58	<p>Definisi Operasional : Hasil Penilaian akuntabilitas instansi Pemerintah, yang merupakan integrasi dari perencanaan, penganggaran dan pelaporan kinerja yang selaras dengan pelaksanaan akuntabilitas</p> <p>Formulasi Perhitungan: Hasil Evaluasi SAKIP dari APIP</p>	ESS. II

Definisi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) sebagai perseorangan, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan, atau gangguan tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya, sehingga memerlukan pelayanan sosial untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Pelayanan sosial yang dilaksanakan mencakup berbagai bentuk bantuan, baik materiil maupun non-materiil, untuk meningkatkan kualitas hidup dan kemandirian PPKS.

Perjanjian Kinerja ke-1 Meningkatkan Penanganan terhadap Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) dengan Indikator Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang Tertangani, ditetapkan target 100% (seratus persen) pada tahun 2025. Diharapkan kelompok sasaran 12 PAS dapat terdata dan tertangani secara optimal selama jangka waktu 5 (lima) tahun dan jumlah PPKS bisa menurun secara signifikan sesuai dengan Tujuan Renstra Dinas Sosial.

Perjanjian Kinerja ke-2 Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Dinas Sosial Kabupaten Seruyan, dengan Indikator Nilai SAKIP Dinas Sosial, ditetapkan target meningkat secara bertahap dalam



setiap tahun dengan target Nilai 58 (CC) di tahun 2025. Di harapkan peningkatan kualitas pelayanan publik pelayanan sosial dan adminitrasi baik dari segi SDM, anggaran dan sarana / prasarana dapat mendukung tercapainya peningkatan pelayanan kesejahteraan sosial dari Dinas Sosial Kabupaten Seruyan.

Untuk Tujuan Dinas Sosial Menurunkan Jumlah Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) akan masuk ke dalam Perjanjian Kinerja (PK) tahun kelima / tahun terakhir (2029).

2.1.1 Indikator Kinerja Kunci (IKK)

Penjenjangan sasaran strategis pimpinan ke level yang lebih rendah (unit/pegawai) guna memastikan keselarasan, fokus kegiatan dan memudahkan pengukuran kinerja dan optimalisasi sumber daya. Berikut Indikator Kinerja Kunci (IKK) sesuai Inmendagri Nomor 2 tahun 2025 yang mengatur terkait Outcome program urusan sosial, yang dijadikan Perjanjian Kinerja (PK) Jabatan Administrator untuk tahun 2025, sesuai tabel.

Tabel 2.3
Perjanjian Kinerja (PK) Esselon III Dinas Sosial Tahun 2025

NO	SASARAN	IKK YANG MENJADI PK	SATUAN	TARGET	PENANGGUNG JAWAB (ESS.III)
1	Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran pada Unit Kerja	Persentase Unit Kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi Perkantoran	%	100	Sekretaris
2	Meningkatnya pemberdayaan sosial	Persentase SDM Kesejahteraan Sosial yang meningkat kompetensinya dalam pelayanan sosial	%	100	Kabid Pemberdayaan Sosial
3	Meningkatnya pemberdayaan sosial	Persentase Lembaga di Bidang Kesejahteraan Sosial yang meningkat kualitasnya dalam Pelayanan Sosial	%	100	Kabid Pemberdayaan Sosial
4	Meningkatnya pemberdayaan sosial	Persentase Penyelenggara PUB /UGB yang tertib perizinan Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten Seruyan	%	100	Kabid Pemberdayaan Sosial
5	Meningkatnya layanan penanganan warga negara migran korban tindak kekerasan	Persentase Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang tertangani	%	100	Kabid Rehabilitasi Sosial
6	Meningkatnya Rehabilitasi Sosial	Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	%	100	Kabid Rehabilitasi Sosial
7	Meningkatnya Rehabilitasi Sosial	Persentase Anak Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	%	100	Kabid Rehabilitasi Sosial
8	Meningkatnya Rehabilitasi Sosial	Persentase Lanjut Usia Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	%	100	Kabid Rehabilitasi Sosial



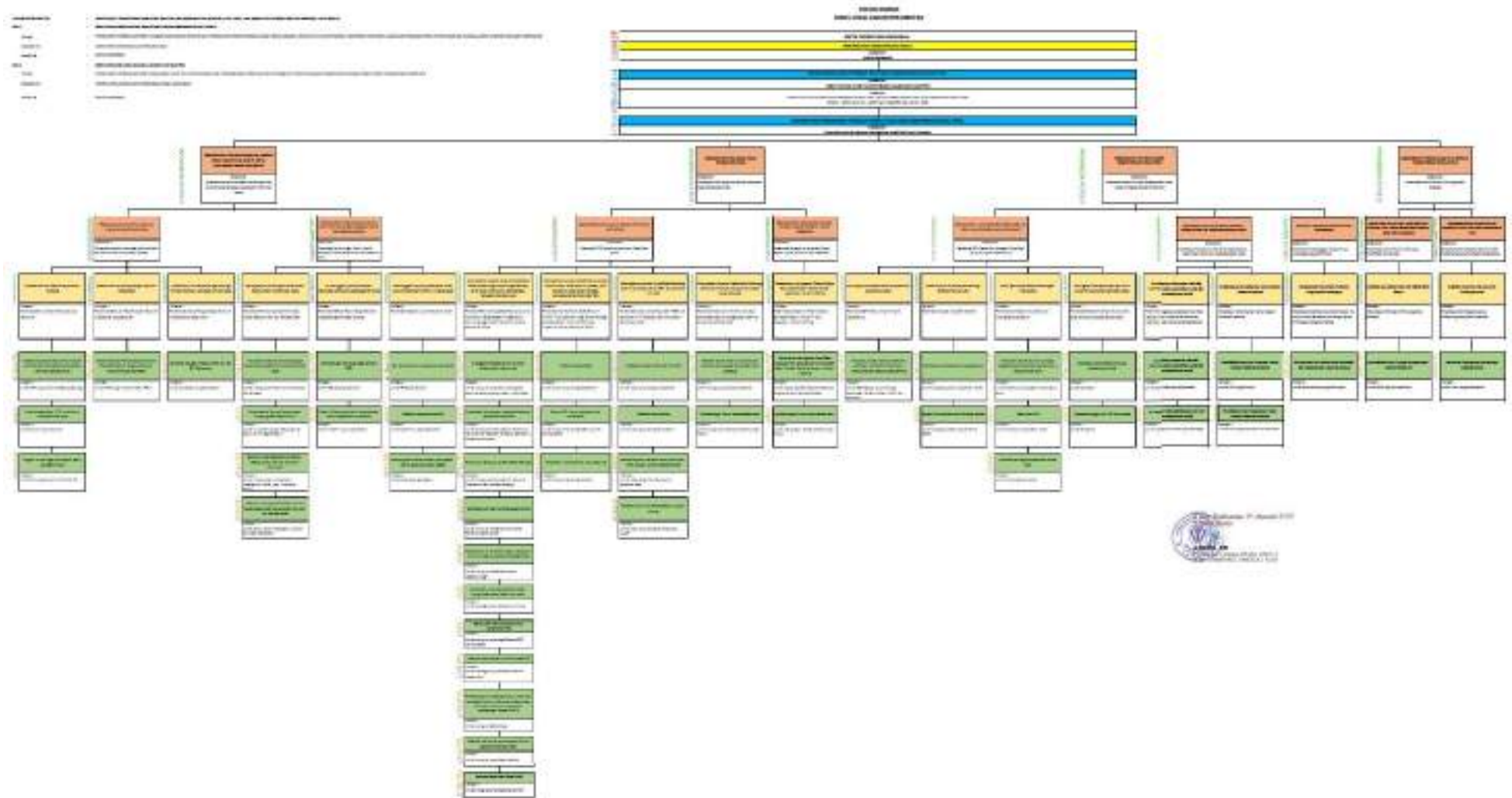
9	Meningkatnya Rehabilitasi Sosial	Persentase Gelandang dan Pengemis yang terpenuhi kebutuhannya	%	100	Kabid Rehabilitasi Sosial
10	Meningkatnya Rehabilitasi Sosial	Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) lainnya di luar HIV/AIDS dan NAPZA yang terpenuhi kebutuhannya	%	100	Kabid Rehabilitasi Sosial
11	Meningkatnya Perlindungan dan Jaminan Sosial	Persentase Penerima Manfaat yang terpenuhi kebutuhannya	%	100	Kabid Perlindungan dan Jaminan Sosial
12	Meningkatnya Perlindungan dan Jaminan Sosial	Persentase Penerima Manfaat yang meningkat Kemandirian Ekonomi	%	100	Kabid Perlindungan dan Jaminan Sosial
13	Meningkatnya Perlindungan dan Jaminan Sosial	Persentase Daerah yang melaksanakan Pengelolaan dan Pendataan Data Fakir Miskin	%	70	Kabid Perlindungan dan Jaminan Sosial
14	Meningkatnya Perlindungan dan Jaminan Sosial	Persentase Keluarga Miskin dan Rentan Penerima Perlindungan Sosial yang Tergraduasi dari Kemiskinan	%	1	Kabid Perlindungan dan Jaminan Sosial
15	Meningkatkan perlindungan sosial korban bencana	Persentase Korban Bencana Alam, Sosial dan / non Alam yang terpenuhi kebutuhan dasar pada saat dan setelah tanggap darurat bencana	%	100	Kabid Penanganan Bencana
16	Meningkatkan perlindungan sosial korban bencana	Persentase Masyarakat di daerah rawan bencana yang meningkat kesiapsiagaannya	%	100	Kabid Penanganan Bencana
17	Meningkatkan perlindungan sosial korban bencana	Persentase Korban Bencana yang mendapatkan Layanan Pemulihan Sosial	%	100	Kabid Penanganan Bencana
18	Meningkatnya tata kelola Taman Makam Pahlawan	Persentase Taman Makam Pahlawan yang terkelola dengan baik	%	100	Kabid Pemberdayaan Sosial
19	Meningkatnya Rehabilitasi Sosial	Jumlah Warga Negara Penyandang Disabilitas yang Memperoleh rehabilitasi Sosial di Luar Panti (SPM)	orang	46	Kabid Rehabilitasi Sosial
20	Meningkatnya Rehabilitasi Sosial	Jumlah Warga Negara Anak terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti (SPM)	orang	16	Kabid Rehabilitasi Sosial
21	Meningkatnya Rehabilitasi Sosial	Jumlah Warga Negara lanjut Usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti (SPM)	orang	12	Kabid Rehabilitasi Sosial
22	Meningkatnya Rehabilitasi Sosial	Jumlah Warga Negara/Gelandangan dan pengemis yang mendapatkan rehabilitasi sosial di luar panti	orang	4	Kabid Rehabilitasi Sosial
23	Meningkatkan perlindungan sosial korban bencana	Jumlah warga negara korban bencana Kab/kota yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana kab/kota (SPM)	orang	200	Kabid Rehabilitasi Sosial

2.1.3 Penjenjangan Kinerja (Cascading) tahun 2025

Penjenjangan kinerja dilakukan melalui pohon kinerja (pokin) yang menjabarkan hasil ke faktor kunci keberhasilan (*critical success factor*) hingga ke indikator kinerja individu. Berikut Tabel Pohon kinerja Dinas Sosial Tahun 2025-2029 :



Gambar 2.2
Pohon Kinerja Dinas Sosial Tahun 2025-2029





Penjenjangan kinerja selanjutnya hingga ke indikator kinerja individu menyesuaikan dengan cascading dengan pengaturan perjanjian kinerja internal, sesuai tabel berikut :

Tabel 2.4
Penjenjangan Kinerja (cascading) Tahun 2025

TUJUAN	SASARAN IKU / PK Ess II	SASARAN (OUTCOME) /IKK /PK Ess III	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	SASARAN (OUTPUT) /PK Ess IV / JPT / JFU	INDIKATOR	TARGET KINERJA	ANGGARAN
Menurunkan Jumlah Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)					Indikator Tujuan : Persentase Penurunan Jumlah Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	95 %	6.485.074.328
	Meningkatkan Penanganan terhadap Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)				Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang Tertangani	100 %	1.244.431.200
		Meningkatnya pemberdayaan sosial	Program Pemberdayaan Sosial		1. Persentase SDM Kesejahteraan Sosial yang meningkat kompetensinya dalam pelayanan sosial	100 %	482.160.100
					2. Persentase Lembaga di Bidang Sosial yang meningkat kualitasnya dalam Pelayanan Sosial	100 %	
					3. Persentase Penyelenggara PUB /UGB yang tertib perizinan Pengumpulan Sumbangan	100 %	
			Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Terlaksananya Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Rekomendasi Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Sumbangan Uang atau Barang	100 %	18.944.000
			Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	20 dokumen	18.944.000
			Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/ Kota	Terlaksananya Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/ Kota	100 %	463.216.100
			Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Meningkatnya Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang Mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	10 Orang	18.106.600,00
			Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Meningkatnya Kapasitas Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	10 Orang	11.228.000,00
			Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Meningkatnya Kapasitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Keluarga yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	2 Keluarga	18.935.500
			Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Meningkatnya Kapasitas Lembaga Kesejahteraan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	6 Lembaga	410.406.000
			Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	Meningkatnya Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Sumber Daya Manusia dan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) yang mendapatkan Peningkatan Kapasitas dan fasilitas dalam penanganan kasus Kewenangan Kabupaten/Kota	2 Sertifikat	4.540.000
		Meningkatnya layanan	Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan		Persentase warga Negara migran korban tindak kekerasan yang tertangani	100 %	2.663.000



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP)
Dinas Sosial Kabupaten Serang Tahun 2025

		penanganan warga negara migran korban tindak kekerasan						
			Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/ Kelurahan Asal	Terlaksananya Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/ Kelurahan Asal	Persentase Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang dipulangkan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/ Kelurahan Asal	100	%	2.663.000
			Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal	Terfasilitasinya Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan Dalam dan Luar Negeri dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal Kewenangan Kabupaten /Kota	Jumlah Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan Dalam dan Luar Negeri yang dipulangkan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal Kewenangan Kabupaten/Kota	3	Orang	2.663.000,00
		Meningkatnya Rehabilitasi Sosial	Program Rehabilitasi Sosial		1. Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	100	%	259.008.000
					2. Persentase Anak Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	100	%	
					3. Persentase Lanjut Usia Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	100	%	
					4. Persentase Gelandangan Pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	100	%	
					5. Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) lainnya di luar HIV/AIDS dan NAPZA yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	100	%	
			Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar serta Gelandangan Pengemis di Luar Pantai Sosial	Terlaksananya Layanan Rehabilitasi Sosial Dasar yang diberikan kepada Penyandang Disabilitas terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar serta Gelandangan Pengemis diluar pantai	Persentase Layanan dasar yang dipenuhi bagi Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, dan Gelandangan Pengemis di Luar Pantai Sosial	100	%	214.975.500
			Penyediaan Permakanaan	Terpenuhinya Kebutuhan Permakanaan Per Orang Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanaan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	140	Orang	43.604.000
			Penyediaan Sandang	Tersedianya Pakaian dan Kelengkapan Lainnya dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota	25	Orang	3.696.500
			Penyediaan Alat Bantu	Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	20	Orang	45.239.000
			Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	23	Orang	39.723.000
			Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Terlaksananya Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	5	Orang	15.613.000
			Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	Terlaksananya Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	10	Orang	39.513.000
			Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota	10	Orang	10.500.000
			Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	Terlaksananya Pemberian Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota	5	Orang	1.979.000
			Pemberian Layanan Kedaruratan	Terlaksananya Pemberian Layanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota	10	Orang	200.000
			Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	5	Orang	400.000
			Pemberian Layanan Rujukan	Terlaksananya Pemberian Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	5	Orang	14.108.000
			Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak	Terpenuhinya Orang yang Membutuhkan Pembuatan Dokumen Kependudukan bagi Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Gelandangan dan Pengemis Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Dokumen Kependudukan bagi Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Gelandangan dan Pengemis Kewenangan Kabupaten/Kota	7	Orang	400.000



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP)
Dinas Sosial Kabupaten Seruyan Tahun 2025

			Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/ AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	Terlaksananya Layanan Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/ AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	Persentase Layanan yang dipenuhi bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/ AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	100	Persen	44.032.500
			Penyediaan Permakanaan	Terpenuhinya Kebutuhan Permakanaan Per Orang Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanaan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	20	Orang	5.310.000
			Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA	Terlaksananya Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Peserta dalam Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA Kewenangan Kabupaten/Kota	7	Orang	34.188.500
			Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	Terlaksananya Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	1	Dokumen	4.534.000
		Meningkatnya Perlindungan dan Jaminan Sosial	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial		1. Persentase Penerima Manfaat yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	100	%	221.566.000
					2. Persentase Penerima Manfaat yang meningkat Kemandirian Ekonomi	100	%	
					3. Persentase Daerah yang melaksanakan Pengelolaan dan Pendataan Data Fakir Miskin	70	%	
					4. Persentase Keluarga Miskin dan Rentan Penerima Perlindungan Sosial yang Tergraduasi dari Kemiskinan	1	%	
			Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten /Kota	Tersedianya Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten /Kota	Persentase Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten /Kota	100	%	221.566.000
			Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten /Kota yang Didata	40.000	Orang	60.271.000
			Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Terlaksananya Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Penerima Manfaat (PM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	7.814	Keluarga	49.459.000
			Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Terlaksananya Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	50	Orang	6.070.000
			Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Kabupaten/Kota	18.084	Keluarga	105.766.000
		Meningkatkan perlindungan sosial korban bencana	Program Penanganan Bencana		1. Persentase Korban Bencana Alam, Sosial dan / non Alam yang terpenuhi kebutuhan dasar pada saat dan setelah tanggap darurat bencana	100	%	279.034.100
					2. Persentase Masyarakat di daerah rawan bencana yang meningkat kesiapsiagaannya	100	%	
					3. Persentase Korban Bencana yang mendapatkan Layanan Pemulihan Sosial	100	%	
			Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/ Kota	Terlaksananya Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/ Kota	Persentase Layanan dasar yang dipenuhi bagi Korban Bencana Alam dan Sosial Pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana Kab/Kota	100	%	219.012.100
			Penyediaan Makanan	Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Permakanaan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanaan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota	100	Orang	53.654.000
			Penyediaan Sandang	Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	60	Orang	58.023.300
			Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	Tersedianya Tempat Pengungsian Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Tempat Pengungsian Kewenangan Kabupaten/Kota	10	Unit	15.321.000
			Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Kabupaten/Kota	20	Orang	75.801.000
			Pelayanan Dukungan Psikososial	Terpenuhinya Pelayanan Dukungan Psikososial bagi Korban Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Kabupaten/Kota	100	Orang	16.212.800



**Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP)
Dinas Sosial Kabupaten Seruyan Tahun 2025**

			Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/ Kota	Terlaksananya Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/ Kota	Persentase KSB dan Taruna Siaga Bencana yang siap siaga terhadap bencana yang Kab/Kota	100	%	60.022.000
			Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana	Terlaksananya Kampung yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Kampung yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten /Kota	2	Kampung	26.836.000
			Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Terpenuhi Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	69	Orang	33.186.000
	Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Dinas Sosial Kabupaten Seruyan				Indikator Sasaran : Nilai SAKIP Dinas Sosial	60 (B)	angka	5.240.643.128
		Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran pada Unit Kerja	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota		Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran pada Unit Kerja	100	%	5.187.444.928
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah dengan baik	Persentase Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah (%)	100	%	3.656.400.247
			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	25	Orang /bulan	3.656.400.247
			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pegawai yang Memperoleh Pelayanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100	%	35.928.000
			Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	63	Paket	27.675.000
			Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	10	Orang	8.253.000
			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100	%	659.842.850
			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2	Paket	14.176.400
			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2	Paket	218.321.750
			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	2	Paket	20.716.000
			Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2	Paket	33.713.000
			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2	Paket	77.256.700
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	50	Laporan	295.659.000
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Terpenuhi Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100	%	693.169.231
			Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya Laporan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	800	Laporan	15.015.000
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Laporan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1	Laporan	68.369.958
			Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Laporan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3	Laporan	20.520.000
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1	Laporan	589.264.273
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	%	142.104.600
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	10	Unit	76.424.100



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP)
Dinas Sosial Kabupaten Seruyan Tahun 2025

			Dinas Jabatan				
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	4 Unit	65.680.500
		Meningkatnya tata kelola Taman Makam Pahlawan	Pengelolaan Taman Makam Pahlawan		Persentase Taman Makam Pahlawan yang dikelola dengan baik	100 %	53.198.200
			Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/ Kot	Terlaksananya Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/ Kota.	Persentase Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/ Kota	100 %	53.198.200
			Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Terlaksananya Rehabilitasi serta Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Rehabilitasi serta Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	2 Dokumen	39.522.200
			Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharannya pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten/Kota	1 Makam	8.464.000
			Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	1 Makam	5.212.000



2.2 PERENCANAAN KINERJA STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM) BIDANG SOSIAL TAHUN 2025

Upaya mewujudkan kesejahteraan sosial telah tercantum dalam Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial. Rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial dan perlindungan sosial termasuk dalam upaya penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Berdasarkan lampiran Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, dalam pembagian kewenangannya maka kebijakan umum SPM Bidang Sosial Kabupaten/Kota yaitu :

1. Rehabilitasi Sosial Dasar di Luar Panti (bagi Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Gelandangan dan Pengemis); serta
2. Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Provinsi

Penerapan Norma, Standar, Prosedur, Dan Kriteria (NSPK) SPM Sosial sesuai dengan Permendagri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM). Pengumpulan data sesuai dengan Standar Teknis SPM ditujukan untuk pencapaian 100 seratus persen dari Target dan Indikator Kinerja pencapaian SPM setiap tahun.

SPM Bidang Sosial merupakan penjabaran dari target yang telah ditetapkan oleh Kementerian Sosial RI berdasarkan Peraturan Menteri Sosial RI Nomor Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota. SPM Bidang Sosial kabupaten/Kota mencakup 5 (lima) pelayanan dasar yaitu :

1. Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di Luar Panti;
2. Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Luar Panti;
3. Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di Luar Panti;
4. Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti; dan



5. Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota

Adapun rencana penerapan SPM Bidang Sosial tahun 2025 dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 2.5
Target SPM Bidang Sosial Tahun 2025

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target Penerima Layanan (orang)	Target NSPK
			thn 2025	Thn 2025
1.	Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti	Jumlah Warga Negara penyandang disabilitas yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	30	100 %
2.	Rehabilitasi sosial dasar anak telantar di luar panti	Jumlah Warga Negara anak telantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	16	100 %
3.	Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti	Jumlah Warga Negara lanjut usia telantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	10	100 %
4.	Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti	Jumlah Warga Negara/ gelandangan dan pengemis yang mendapatkan rehabilitasi sosial di luar panti	4	100 %
5.	Perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana Kabupaten/Kota.	Jumlah Warga Negara korban bencana Kab/Kota yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana Kabupaten/Kota.	200	100 %



BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) adalah dokumen pertanggungjawaban tahunan yang disusun Dinas Sosial, merinci keberhasilan/kegagalan pencapaian perencanaan kinerja berdasarkan target kinerja (kuantitatif) dan penggunaan anggaran. LKjIP merupakan perwujudan transparan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP) yang terintegrasi dengan perencanaan dan penganggaran.

Dengan menyajikan capaian kinerja Dinas Sosial untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis Dinas Sosial sesuai dengan hasil pengukuran kinerja Dinas Sosial. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja.

Dinas Sosial Kabupaten Seruyan telah melaksanakan pengukuran kinerja atas kinerja yang diperjanjikan Kepala Dinas Sosial Kabupaten Seruyan dengan Bupati Seruyan tahun 2025. Pengukuran Sasaran Kinerja mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah dengan skala nilai peringkat kinerja sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3.1
Skala Nilai Peringkat Kinerja

No	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
1.	$91 \leq 100$	Sangat Baik
2.	$76 \leq 90$	Tinggi
3.	$66 \leq 75$	Sedang
4.	$51 \leq 65$	Rendah
5.	≤ 50	Sangat Rendah

Untuk skala nilai peringkat kinerja penilaian sasaran kinerja kedua mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 Tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dengan skala nilai peringkat kinerja sebagaimana tabel berikut:



Tabel 3.2
Skala Nilai Peringkat Kinerja SAKIP

No	Interval Nilai	Predikat	Interpretasi
1.	> 90 - 100	AA	Sangat memuaskan
2.	> 80 - 90	A	Memuaskan
3.	> 70 - 80	BB	Sangat baik
4.	> 60 - 70	B	Baik
5.	> 50 - 60	CC	Cukup (memadai)
6.	> 30 - 50	C	Kurang
7.	0 - 30	D	Sangat kurang

Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisis pencapaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang diharapkan.

Rencana Strategis Dinas Sosial tahun 2025-2029 berpedoman pada Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 1 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2025-2029. Yang kemudian menjadi dasar dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) 2025, Rencana Kinerja Tahunan (RKT) 2025 dan Rencana Aksi Kinerja (RAK) Tahun 2025 serta perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2025 yang kemudian diukur pencapaiannya secara periodik dalam Laporan Kinerja.

Berikut perumusan tujuan (*intermediate outcome*) dan sasaran Rencana Strategis Dinas Sosial tahun 2025-2029 dengan relevansi terhadap Sasaran RPJMD :

Tabel 3.3
Tujuan dan Sasaran Renstra Tahun 2025-2029

NSPK SASARAN RPJMD YG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET TAHUN						K E T
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
Menurunnya kemiskinan (Misi I, Sasaran ke-5)	Menurunkan Jumlah Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)		Indikator Tujuan : Persentase Penurunan Jumlah Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	95%	90%	85%	80%	75%	75%	
		Meningkatkan Penanganan terhadap Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	Indikator Sasaran : Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang Tertangani	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
		Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Dinas Sosial Kabupaten Seruyan	Indikator Sasaran : Nilai SAKIP Dinas Sosial	58	60	62	64	66	66	



3.1 CAPAIAN KINERJA TAHUN 2025

Analisis dan evaluasi terhadap capaian kinerja Dinas Sosial Kabupaten Seruyan Tahun 2025 dilakukan dengan cara menganalisis capaian kinerja untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis yang telah ditetapkan. Pelaporan Kinerja didasarkan pada Perjanjian Kinerja Dinas Sosial Kabupaten Seruyan Tahun 2025, telah ditetapkan 2 (dua) sasaran dan 2 (dua) indikator kinerja.

3.1.1 Perbandingan Antara Target Dan Realisasi Kinerja Tahun 2025

Perbandingan antara target dan realisasi kinerja Tahun 2025 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel 3.4
Perbandingan antara target dan realisasi kinerja Tahun 2025

NO.	TUJUAN	SASARAN KINERJA (IKU)	INDIKATOR	SATUAN	TARGET	REALISASI CAPAIAN	KRITERIA CAPAIAN
1	Menurunkan Jumlah Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	Meningkatkan Penanganan terhadap Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang Tertangani	%	100	97,04	Sangat Baik
2		Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Dinas Sosial Kabupaten Seruyan	Nilai SAKIP Dinas Sosial	Angka	58	60,70	Baik

Sasaran Kinerja 1, Meningkatkan Penanganan terhadap Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)

Indikator :

Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang Tertangani

Definisi Operasional :

Perhitungan jumlah PPKS yang telah menerima pelayanan sosial, dibagi dengan total PPKS yang teridentifikasi, kemudian dikalikan seratus persen, yang menunjukkan efektivitas intervensi sosial dalam memenuhi kebutuhan dasar mereka.

Formulasi Perhitungan :

$$\frac{\sum \text{PPKS yang mendapat penanganan}}{\sum \text{PPKS di Kabupaten Seruyan tahun n}} \times 100 \% = \frac{53.664}{55.302} \times 100 \% = 97,04\%$$



Capaian realisasi kinerja Dinas Sosial pada tahun 2025 mencapai 97,04% dari target kinerja 100% termasuk dalam kategori **Sangat Baik** meskipun mungkin upaya yang dilakukan belum optimal. Dengan perhitungan Penanganan terhadap PPKS sebanyak 53.664 orang dari target PPKS yang terdata 55.302 orang. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar target kinerja utama telah tercapai sesuai perencanaan.

Penanganan terhadap Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial yang menjadi sasaran utama program dan layanan kesejahteraan sosial dikategorikan dalam 12 kelompok Pemerlu Atensi Sosial (12 PAS). Kelompok-kelompok ini membutuhkan perhatian khusus dalam mendapatkan perlindungan sosial dan jaminan kesejahteraan. **Peningkatan kualitas layanan** yang telah dilakukan oleh Dinas Sosial meliputi pemenuhan hidup layak (kebutuhan dasar), dukungan psikososial dengan pendampingan oleh pekerja sosial (Peksos) dan peningkatan kapasitas melalui pelatihan keterampilan, bantuan sosial dan bantuan modal usaha untuk kemandirian. Secara umum pelayanan sosial yang telah dilaksanakan Dinas Sosial pada tahun 2025 terhadap 12 kelompok rentan berupa :

1. **anak-anak rentan**, berupa pelayanan sosial pemenuhan kebutuhan dasar (pelayanan SPM) bagi anak terlantar/ anak difabel / anak yatim piatu (YAPI), pendampingan penyelesaian kasus untuk anak bermasalah hukum (ABH)/ anak korban tindak kekerasan/ anak yang memerlukan perlindungan khusus (AMPK), pelatihan bagi anak putus sekolah dan bantuan sosial untuk anak rentan. Jumlah PPKS yang ditangani 137 orang anak.
2. **difabel**, berupa pelayanan sosial pemenuhan kebutuhan dasar (pelayanan SPM) bagi penyandang disabilitas, pemberian alat bantu untuk penyandang disabilitas fisik, layanan kedaruratan,



rujukan, rehabilitasi dan reunifikasi untuk penyandang disabilitas mental dan bantuan sosial untuk penyandang disabilitas. Jumlah PPKS yang ditangani 156 orang.

3. **lansia telantar**, berupa pelayanan sosial pemenuhan kebutuhan dasar (pelayanan SPM) bagi lansia, layanan kedaruratan, rujukan, rehabilitasi, reunifikasi dan bantuan sosial untuk lansia. Jumlah PPKS yang ditangani 220 orang.
4. **berpendapatan rendah**, berupa pelayanan sosial pemenuhan kebutuhan dasar (pelayanan SPM) bagi gelandangan / pengemis / pemulung, layanan kedaruratan, rujukan, rehabilitasi, reunifikasi dan bantuan sosial untuk gepeng. Jumlah PPKS yang ditangani 6 orang.
5. **korban bencana**, berupa pelayanan sosial pemenuhan kebutuhan dasar (pelayanan SPM) penyediaan makanan dan sandang bagi korban bencana alam/ bencana sosial, Bantuan Sosial bagi Kelompok Rentan, Pelayanan Dukungan Psikososial / trauma healing, mitigasi bencana melalui pembinaan KSB dan TAGANA. Jumlah PPKS yang ditangani 1391 orang.
6. **mereka yang membutuhkan afirmasi khusus**, tidak ada Kelompok Adat Terpencil (KAT) di Kabupaten Seruyan.
7. **warga binaan**, tidak ada data warga binaan Narapidana (Napi) dan Narapidana Teroris (Napiter).
8. **korban kekerasan**, berupa pelayanan sosial fasilitasi penelusuran Keluarga dan Reunifikasi Keluarga (pemulangan ke daerah asal) untuk Pekerja Migran Bermasalah Sosial / Korban Tindak Kekerasan / korban trafficking dan pendampingan khusus penyelesaian kasus. Jumlah PPKS yang ditangani 2 orang / kasus kejadian.
9. **korban NAPZA dan HIV/AIDS**, koordinasi dengan Dinas Sosial dan Puskesmas untuk kerahasiaan data dan bentuk bantuan sosial yang bisa disalurkan (kebutuhan dasar / penguatan ekonomi).



10. **masyarakat yang bermasalah sosial**, berupa pemberian pelayanan konsultasi, konseling, pemberian/penyebarnya informasi, penjangkauan, advokasi (pendampingan khusus penyelesaian kasus) dan pemberdayaan keluarga serta rujukan ke lembaga pelayanan lainnya. Jumlah PPKS yang ditangani 3 keluarga / kasus aduan.
11. **perempuan rentan**, berupa pelayanan pemberian pelatihan ketrampilan, bantuan sosial kewirausahaan untuk kemandirian Perempuan yang rawan ekonomi (WRSE). Jumlah PPKS yang ditangani 20 orang.
12. **fakir miskin**, berupa perlindungan dan jaminan sosial untuk penduduk yang masuk peringkat kesejahteraan desil 1-5 DTSEN, penyaluran Bansos PKH, Program Sembako, PBI JKN KIS, Bansos YAPI dan Bansos Lainnya, pemutakhiran data KPM agar bansos tepat sasaran, Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga (P2K2) untuk kemandirian keluarga. Jumlah PPKS yang ditangani 51.729 orang.

Sasaran Kinerja 2, Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Dinas Sosial Kabupaten Seruyan

Indikator :

Nilai SAKIP Dinas Sosial

Definisi Operasional :

Hasil Penilaian akuntabilitas instansi Pemerintah, yang merupakan integrasi dari perencanaan, penganggaran dan pelaporan kinerja yang selaras dengan pelaksanaan akuntabilitas

Formulasi Perhitungan:

Hasil Evaluasi SAKIP dari APIP = 60,70

Pada Tahun 2025 capaian kinerja pelayanan urusan administrasi penunjang terealisasi nilai 60,70 dari target kinerja 58. Dengan predikat B interpretasi “Baik”. Dengan predikat SAKIP Baik terdapat gambaran bahwa Akuntabilitas Kinerja pada Dinas Sosial



sudah baik pada 1/3 unit kerja, khususnya pada unit kerja utama., namun demikian masih perlu sedikit perbaikan pada unit kerja serta komitmen dalam manajemen kinerja.

Rekomendasi perbaikan SAKIP dari hasil LHE SAKIP Dinas Sosial telah ditindaklanjuti dengan mengoptimalkan konsultasi dan koordinasi dengan APIP dan BAPPEDA yang menjadi leading sektor perencanaan, pemantauan dan evaluasi. Serta melakukan tindak lanjut perbaikan administrasi atas rekomendasi Tim Penilaian SAKIP Kabupaten Seruyan.

3.1.2 Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun 2025 Dengan Tahun 2024 Dan Beberapa Tahun Terakhir

Perbandingan antara capaian kinerja tahun ini dengan beberapa tahun terakhir berdasarkan indikator kinerja Sasaran ke 1 dari tahun 2020 -2025.

Tabel 3.5
Perbandingan Capaian Kinerja Sasaran ke 1 Dari Tahun 2020-2025

SASARAN	CAPAIAN KINERJA					
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Meningkatkan Penanganan terhadap Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Indikator (2024-2025): Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang Tertangani	n.a	n.a	n.a	n.a	95,76%	97,04%
Meningkatkan Penanganan terhadap Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Indikator (2020-2023): Jumlah Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang Tertangani	25.626 orang	29.147 orang	79.673 orang	50.001 orang	41.893 orang	53.664 orang



Gambar 3.1
Grafik Perbandingan Capaian Kinerja Sasaran ke 1 Dari Tahun 2020-2025



Dari grafik dapat terlihat terjadi peningkatan PPKS pada tahun 2022 namun mulai menurun pada tahun 2023-2024 namun naik kembali pada tahun 2025. Peningkatan Jumlah Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang ditangani dari tahun 2020-2022 disebabkan dampak pandemic covid 19, dampak inflasi kenaikan kebutuhan pokok, kenaikan harga BBM, kejadian bencana sosial / konflik sosial dan terjadinya bencana alam banjir.

Pada tahun 2022 jumlah PPKS meningkat tinggi disebabkan adanya kebijakan dari kementerian sosial memasukan data penerima bantuan BLT warga terdampak covid 19 ke dalam Data Fakir Miskin DTKS dan dampak besar Bencana Alam Banjir.

Pada tahun 2023 dan 2024 PPKS yang ditangani mulai menurun dengan adanya verifikasi dan validasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial dan pada 2 tahun terakhir bencana alam yang terjadi tidak berdampak besar.

Pada tahun 2025 kembali terjadi kenaikan jumlah PPKS yang ditangani yang dipengaruhi oleh dampak dari Transisi perubahan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) menjadi Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) yang merupakan penggabungan dari beberapa data terkait kesejahteraan sosial, seperti Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), Regsosek, dan P3KE, mengakibatkan data penerima bansos yang dikelola Dinas Sosial meningkat dari 41.046 orang menjadi 51.729 orang, serta



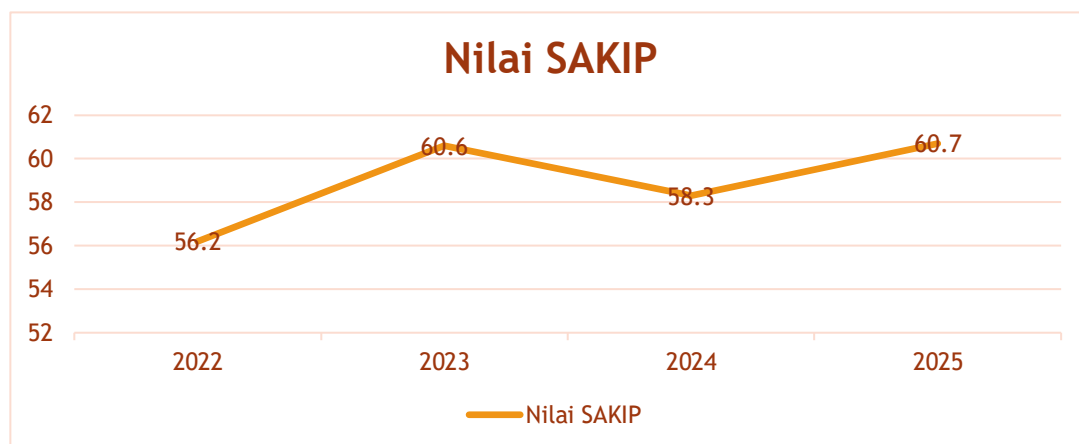
terjadi bencana alam banjir dan kebakaran yang berdampak pada 1.391 orang.

Berikut perbandingan antara capaian kinerja tahun ini dengan beberapa tahun terakhir berdasarkan indikator kinerja Sasaran ke 2 dari tahun 2022 -2025 :

Tabel 3.6
Perbandingan Capaian Kinerja Sasaran ke 2 Dari Tahun 2022-2025

SASARAN	CAPAIAN KINERJA			
	2022	2023	2024	2025
Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Dinas Sosial Kabupaten Seruyan Indikator : Nilai SAKIP Dinas Sosial	56,20	60,60	58,30	60,70

Gambar 3.2
Grafik Perbandingan Capaian Kinerja Sasaran ke 2 Dari Tahun 2022-2025



Dari grafik dapat terlihat terjadi kenaikan dan penurunan Nilai SAKIP Dinas Sosial dari tahun 2022 sampai tahun 2025. Penurunan nilai SAKIP disebabkan adanya kelemahan dalam penyusunan, kualitas dan implementasi SAKIP dalam tahun penilaian 2022 dan 2024. Nilai SAKIP kembali naik pada penilaian selanjutnya tahun 2023 dan 2025 disebabkan adanya upaya perbaikan administrasi dan tindak lanjut atas Rekomendasi perbaikan SAKIP dari hasil LHE SAKIP Dinas Sosial, serta mengoptimalkan konsultasi dan koordinasi dengan APIP dan BAPPEDA yang menjadi leading sektor perencanaan, pemantauan



dan evaluasi.

3.1.3 Membandingkan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun 2025 Dengan Target Jangka Menengah Yang Terdapat Dalam Dokumen Perencanaan Strategis Dinas Sosial

Berdasarkan Dokumen Rencana Strategis periode Tahun 2025-2029 yang disajikan pada sasaran merupakan pelaksanaan Tahun pertama dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Seruyan Tahun 2025-2029.

Tabel 3.7
Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2025
Dengan Target Jangka Menengah / Renstra

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	SATUAN	TARGET 2025	REALISASI CAPAIAN 2025	TARGET RENSTRA TAHUN KE-1	CAPAIAN KEMAJUAN / KEMUNDURAN
1	Meningkatkan Penanganan terhadap Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang Tertangani	%	100	97,04	100	-2,96
2	Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Dinas Sosial Kabupaten Seruyan	Nilai SAKIP Dinas Sosial	Angka	58	60,70	60,70	2,30

Sasaran Kinerja 1, Meningkatkan Penanganan terhadap Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)

Untuk Tahun ke-1 pencapaian kinerja jangka menengah Renstra 2025-2029 target kinerja penanganan PPKS terealisasi 97,04% dari target kinerja 100%, target tidak tercapai sebesar minus 2,96%. Dengan perhitungan Penanganan terhadap PPKS sebanyak 53.664 orang dari target PPKS yang terdata 55.302 orang. Berikut data penanganan terhadap Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial 12 PAS :

- 1. anak-anak rentan**, jumlah PPKS yang terdata 137 orang dan ditangani pada tahun pertama Renstra 137 orang anak, capaian 100%.
- 2. difabel**, jumlah PPKS yang terdata 320 orang dan ditangani



pada tahun pertama Renstra 156 orang, capaian 48,75%. Penanganan terhadap difabel menyesuaikan dengan kemampuan anggaran dan kasus permintaan layanan pada tahun 2025. Rencana penanganan difabel dilakukan secara bertahap selama 5 tahun perencanaan. Karena sebagian besar permintaan alat bantu untuk penyandang disabilitas fisik, layanan kedaruratan, rujukan, rehabilitasi dan reunifikasi untuk penyandang disabilitas mental telah dipenuhi pada tahun sebelumnya, maka penanganan difabel tidak harus tercapai 100% per tahun.

- 3. lansia**, jumlah PPKS yang terdata 1.694 orang dan ditangani pada tahun pertama Renstra 220 orang, capaian 12,99%. Penanganan terhadap lansia menyesuaikan dengan kemampuan anggaran dan kasus permintaan layanan pada tahun 2025. Rencana penanganan lansia dilakukan secara bertahap selama 5 tahun perencanaan. Karena sebagian besar kebutuhan dasar (pelayanan SPM) bagi lansia, layanan kedaruratan, rujukan, rehabilitasi, reunifikasi dan bantuan sosial untuk lansia telah dipenuhi pada tahun sebelumnya, maka penanganan lansia tidak harus tercapai 100% per tahun.
- 4. berpendapatan rendah**, berupa pelayanan sosial bagi gelandangan / pengemis / pemulung / Orang Terlantar (OT). Jumlah PPKS yang terdata 6 orang dan ditangani pada tahun pertama Renstra 6 orang, capaian 100%.
- 5. korban bencana**, berupa pelayanan sosial bagi korban bencana alam/ bencana sosial, jumlah PPKS yang terdata 1391 orang dan ditangani pada tahun pertama Renstra 1391 orang, capaian 100%.
- 6. mereka yang membutuhkan afirmasi khusus**, tidak ada Kelompok Adat Terpencil (KAT) di Kabupaten Seruyan.
- 7. warga binaan**, tidak ada data warga binaan Narapidana (Napi) dan Narapidana Teroris (Napiter).



- 8. korban kekerasan**, berupa pelayanan sosial bagi Pekerja Migran Bermasalah Sosial / Korban Tindak Kekerasan / korban trafficking , jumlah PPKS yang terdata 2 orang dan ditangani pada tahun pertama Renstra 2 orang / kasus kejadian, capaian 100%.
- 9. korban NAPZA dan HIV/AIDS**, koordinasi dengan Dinas Sosial dan Puskesmas untuk kerahasiaan data dan bentuk bantuan sosial yang bisa disalurkan (kebutuhan dasar / penguatan ekonomi).
- 10. masyarakat yang bermasalah sosial**, berupa pemberian pelayanan konsultasi, konseling, pemberian/penyebarluasan informasi, penjangkauan, advokasi (pendampingan khusus penyelesaian kasus) dan pemberdayaan keluarga serta rujukan ke lembaga pelayanan lainnya. Jumlah PPKS yang terdata 3 keluarga dan ditangani pada tahun pertama Renstra 3 keluarga / kasus aduan, capaian 100%.
- 11. perempuan rentan**, berupa pelayanan pemberian pelatihan ketrampilan, bantuan sosial kewirausahaan untuk kemandirian Perempuan yang rawan ekonomi (WRSE). Jumlah PPKS yang terdata 20 orang dan ditangani pada tahun pertama Renstra 20 orang, capaian 100%.
- 12. fakir miskin**, berupa perlindungan dan jaminan sosial untuk penduduk yang masuk peringkat kesejahteraan desil 1-5 DTSEN, penyaluran Bansos PKH, Program Sembako, PBI JKN KIS, Bansos YAPI dan Bansos Lainnya, pemutakhiran data KPM agar bansos tepat sasaran, Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga (P2K2) untuk kemandirian keluarga. Jumlah PPKS penerima bansos yang terdata 51.729 orang dan ditangani pada tahun pertama Renstra 51.729 orang, capaian 100%.



Sasaran Kinerja 2, Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Dinas Sosial Kabupaten Seruyan

Untuk Tahun ke-1 pencapaian kinerja jangka menengah Renstra 2025-2029 target kinerja Nilai SAKIP terealisasi 60,70 (B) dari target kinerja 58 (CC), melampaui sebesar 2,30 angka.

Terdapat gambaran bahwa AKIP Dinas Sosial cukup baik, namun demikian masih banyak perlu perbaikan walaupun tidak mendasar khususnya akuntabilitas kinerja pada Dinas Sosial.

3.1.4 Membandingkan realisasi kinerja tahun 2025 dengan standar nasional

Perbandingan pencapaian sasaran kinerja Dinas Sosial dibandingkan dengan capaian kinerja dari Tingkat provinsi Kalimantan Tengah dan kabupaten Kotawaringin Timur sebagai berikut :

Tabel 3.8
Perbandingan realisasi kinerja Dinas Sosial Kabupaten Seruyan, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah dan Kemensos

NO	SASARAN	INDIKATOR	REALISASI			
			KAB SERUYAN	KAB KOTAWARINGIN TIMUR	PROV. KALTENG	NASIONAL (Kemensos)
1	Meningkatkan Penanganan terhadap Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang Tertangani	97,04%	101,76%	100%	tidak dapat diperbandingkan
2	Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Dinas Sosial Kabupaten Seruyan	Nilai SAKIP Dinas Sosial	60,70	66,88	71,16	70,41

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa capaian kinerja Dinas Sosial Kabupaten Seruyan masih belum maksimal, hal ini perlu menjadi perhatian agar kedepannya pengambilan kebijakan dalam pelaksanaan pelayanan kesejahteraan sosial lebih memperhatikan isu-isu dan kondisi yang terjadi dalam masyarakat, penguatan data bantuan sosial tepat sasaran, antisipasi / persiapan untuk menyelesaikan permasalahan pelayanan sosial yang bersifat insidentil dan perbaikan akuntabilitas kinerja serta



peningkatan kualitas pelayanan publik.

3.1.5 Analisis Penyebab Keberhasilan /Kegagalan Atau Peningkatan /Penurunan Kinerja Serta Alternative Solusi Yang Telah Dilakukan

Tabel 3.9
Capaian Tujuan dan Sasaran Renstra Tahun 2024 dan 2025

NSPK SASARAN RPJMD YG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET TAHUN		CAPAIAN TAHUN		KET
				2024	2025	2024	2025	
Menurunnya kemiskinan (Misi I, Sasaran ke-5)	Menurunkan Jumlah Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)		Indikator Tujuan : Persentase Penurunan Jumlah Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	-	95%	-	128%	Tidak tercapai
		Meningkatkan Penanganan terhadap Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	Indikator Sasaran : Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang Tertangani	100%	100%	95,76%	97,04%	Tidak tercapai
		Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Dinas Sosial Kabupaten Seruyan	Indikator Sasaran : Nilai SAKIP Dinas Sosial	B	58	CC	60,70	Melampaui target

Secara umum pada tahun pertama pelaksanaan Renstra 2025 -2029, Tujuan Dinas Sosial untuk Menurunkan Jumlah Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) masih **belum tercapai**, hal ini dipengaruhi oleh banyak faktor dan perlu menjadi perhatian dalam penentuan kebijakan sebagai upaya tindak lanjut penyelesaian permasalahan di tahun 2026. Terdapat peningkatan jumlah PPKS dari tahun sebelumnya 2024 sebanyak 41.893 orang berbanding jumlah PPKS tahun 2025 sebanyak 53.664 orang, dengan kenaikan sebesar 30%.

Sasaran Kinerja ke 1 Dinas Sosial untuk Meningkatkan Penanganan terhadap Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) masih belum tercapai, capaian realisasi kinerja Dinas Sosial pada tahun 2025 mencapai 97,04%. Terdapat peningkatan persentase penanganan PPKS sebesar 1,28% dari tahun sebelumnya 2024 sebanyak 95,76%. Dengan perhitungan Penanganan terhadap PPKS sebanyak 53.664 orang berbanding tahun 2024 sebanyak 41.893 orang.

Sasaran Kinerja ke 2 Dinas Sosial untuk Meningkatkan



Akuntabilitas Kinerja Dinas Sosial Kabupaten Seruyan, capaian melampaui target, capaian realisasi Nilai SAKIP tahun 2025 terealisasi 60,70 dibandingkan dengan capaian tahun 2024 terealisasi 58 (CC). Menggambarkan bahwa Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Dinas Sosial cukup baik, namun demikian masih banyak perlu perbaikan walaupun tidak mendasar khususnya akuntabilitas kinerja pada Dinas Sosial.

Berikut beberapa permasalahan penyebab keberhasilan / kegagalan capaian kinerja sesuai target dan rencana tindak lanjut :

Tabel 3.10
Permasalahan dan rencana tindak lanjut

FAKTOR	PENYEBAB KEBERHASILAN / KEGAGALAN	SOLUSI / RENCANA TINDAK LANJUT
DATA	Transisi perubahan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) menjadi Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) yang merupakan penggabungan dari beberapa data terkait kesejahteraan sosial, seperti Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), Regsosek, dan P3KE, mengakibatkan data yang dikelola Dinas Sosial meningkat dan perlu verifikasi dan validasi data kembali.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Koordinasi dengan Desa / Kelurahan / Kecamatan untuk pemutakhiran data mandiri 2. Pelatihan operator desa 3. Verifikasi dan validasi langsung (ground check)
	Pengelolaan Data : BNBA penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis belum akurat sehingga memerlukan assesment ulang atau Verifikasi dan Validasi (verivali) ulang. Karena banyak penerima layanan SPM bersifat <i>insidental</i> sehingga menyulitkan perhitungan kebutuhan dan pada akhirnya antara target dan realisasi terdapat perbedaan. Data belum sepenuhnya terintegrasi dalam DTSEN	Integrasi Data : Penggunaan DTSEN yang lebih dinamis untuk menentukan sasaran penerima layanan dasar (seperti disabilitas terlantar, anak telantar, lansia terlantar dan gepeng) agar lebih akurat.
	Masih ada beberapa Kluster 12 PAS yang belum tertangani yaitu kelompok korban NAPZA dan HIV/AIDS dan warga binaan (Napi/Napiter) karena data yang sensitif / rahasia, PPKS yang tidak mau di akses .	<ol style="list-style-type: none"> 1. Koordinasi dengan Dinas Kesehatan, lembaga pemasyarakatan dan kepolisian 2. Treatment khusus pemberian layanan sosial yang tidak diekspose (terjaga kerahasiaannya)
SUMBER DAYA (SDM DAN SARPRAS)	Minim SDM : Rasio SDM Kesejahteraan Sosial yang tidak sebanding dengan jumlah PPKS	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengusulan rekrutmen SDM Kessos ke Kemensos dan BKPSDM 2. Peningkatan Kapasitas SDM Kesejahteraan Sosial untuk optimalisasi pelayanan sosial melalui pembinaan dan pelatihan 3. Uji Kompetensi (UKOM) SDM Kesejahteraan Sosial
	Aplikasi : Belum terbentuk Sistem Pemutakhiran Data Mandiri dan aplikasi penyaluran bansos. (Mempelajari sistem update data yang melibatkan relawan dan perangkat desa walaupun Dinas sosial sdh ada operator SIKS NG desa/kelurahan)	Upaya Digitalisasi data, penyaluran dan monitoring bansos, agar bansos tepat sasaran, tepat waktu dan tepat guna
	Aplikasi : Digitalisasi Layanan Pengaduan untuk Pelayanan SPM Sosial	Upaya Digitalisasi Layanan dan Aduan SPM



	Sarana : Belum tersedianya rumah singgah atau shelter sementara bagi ppks sehingga terkadang kesulitan ketika mengevakuasi atau memberikan pelayanan bagi klien ppks disebabkan : minimnya anggaran dalam Pembangunan rumah singgah, keterbatasan SDM professional, belum adanya Perda / Perbup yang mengatur pelayanan rumah singgah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyusunan perda / perbup Rumah Singgah 2. Pengajuan Nota Dinas untuk pembangunan rumah singgah 3. Pengusulan rekrutment pekerja sosial untuk rumah singgah
	Prasarana :Kondisi Kendaraan Operasional untuk penyaluran Bantuan Korban Bencana yang tidak maksimal Tenda pengungsi dalam kondisi kurang layak	<ol style="list-style-type: none"> 1. Upaya pemeliharaan 2. pengajuan proposal ke kemensos untuk bantuan kendaraan operasional bencana
	Belum terbentuk Sistem Layanan Rujukan Terpadu (SLRT)	Perlunya Infrastruktur Operasional dan Peraturan Bupati Kabupaten Seruyan sehingga memiliki SLRT dalam menunjang pelayanan Sosial,Kesehatan dan Pendidikan
	Bentuk adanya Tim Reaksi Cepat (TRC) pelayanan SPM di tingkat desa / kelurahan / kecamatan, sehingga semua permasalahan sosial langsung ke Dinas Sosial	Koordinasi ke desa/kelurahan / kecamatan untuk pembentukan TRC yang menjadi ujung tombak penanganan permasalahan sosial
	Belum ada Pembentukan Sekolah Rakyat	Upaya Sosialisasi SR, Pendataan Calon Siswa SR, dan proses pembentukan SR Perintis
PENGANGGARAN	Anggaran untuk pelaksanaan program kegiatan dinas sosial terbatas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Optimalisasi anggaran 2. Pengajuan Proposal kerjasama dan proposal bansos ke BBPPKS, Sentra Rehabilitasi dan Kemensos 3. Pengajuan nota dinas penambahan anggaran APBD
KEBIJAKAN DAN REGULASI	Inpres No. 4 Tahun 2025 tentang DTSEN, Inpres No. 8 Tahun 2025 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Pengentasan Kemiskinan Ekstrem, Permensos No. 3 tahun 2025 pemutakhiran dan penggunaan DTSEN untuk bansos, pemberdayaan sosial dan program penyelenggaraan kesejahteraan sosial; konsekuensi penggunaan DTSEN yaitu adanya Pemingkatan (Desil), Penerima bansos berubah, kuota penerima bansos daerah berubah dan mitigasi resiko (protes)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Koordinasi dengan BPS, Disdukcapil dan lintas sektor lainnya 2. Bersama BPS dan pendamping sosial melakukan ground check
KOLABORASI DAN SINERGI	Belum semua PPKS bisa tertangani karena keterbatasan kuota	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kerjasama dengan Panti / Balai / RS / RSJ untuk penanganan PPKS dan penambahan kuota 2. membangun Sinergi dengan Lembaga Kesejahteraan Sosial dan lembaga philantropy (kemanusiaan) untuk meningkatkan pelayanan sosial

Diharapkan untuk beberapa tahun kedepan masa pelaksanaan Renstra 2025-2029, jumlah Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) dapat menurun secara signifikan, yang menandakan indikator perbaikan kondisi sosial ekonomi masyarakat semakin membaik dan dapat mendukung sasaran prioritas Pengentasan Kemiskinan.



3.1.6 Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Analisis efisiensi penggunaan sumber daya dalam LKjIP mengevaluasi rasio antara realisasi anggaran dengan capaian kinerja. Ini bertujuan memastikan output maksimal dicapai dengan input minimal, dan mengoptimalkan SDM dan keuangan, guna menunjukkan akuntabilitas instansi dalam mengelola anggaran

Tabel 3.11
Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

SASARAN	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA			CAPAIAN SERAPAN ANGGARAN			TINGKAT EFISIENSI
		TARGET	REALISASI	CAPAIAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	
Meningkatkan Penanganan terhadap Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang Tertangani	Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang Tertangani	100%	97,04%	97,04%	1.244.431.200,00	1.053.157.519,00	84,63%	12,41
Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Dinas Sosial Kabupaten Seruyan	Nilai SAKIP Dinas Sosial	58	60,70	104,66	5.240.643.128,00	5.067.762.026,00	96,70%	7,95

Tingkat efisiensi pada pelaksanaan sasaran kinerja ke 1 Meningkatkan Penanganan terhadap Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) pada tahun 2025 sebesar 12,41% dari capaian kinerja 5 (lima) program pendukung 97,04% berbanding capaian anggaran 84,63%. Menggambarkan efisiensi pelaksanaan anggaran belanja berdasarkan kesesuaian dengan perencanaan, terjadi penghematan yang wajar atas pencapaian sasaran kinerja.

Tingkat efisiensi pada pelaksanaan sasaran kinerja ke 2 Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Dinas Sosial Kabupaten Seruyan pada tahun 2025 sebesar 7,95% dari capaian kinerja 2 (dua) program penunjang 104,66% berbanding capaian anggaran 96,70%. Menggambarkan efisiensi pelaksanaan anggaran belanja berdasarkan kesesuaian dengan perencanaan, terjadi penghematan yang wajar atas pencapaian sasaran kinerja.



3.1.7 Analisis Program/Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan Ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Dinas Sosial merupakan SKPD yang terkait langsung dengan pelayanan publik, maka telaahan terhadap usulan masyarakat lebih diutamakan dalam upaya penyusunan kegiatan yang lebih baik dan akuntabel. Adapun program, kegiatan dan sub kegiatan yang terkait dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Dinas Sosial Kabupaten Seruyan dan dibutuhkan untuk meningkatkan Pelayanan Dinas Sosial adalah sebagai berikut :

1. Program Pemberdayaan Sosial
2. Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan
3. Program Rehabilitasi Sosial
4. Program Perlindungan dan Jaminan Sosial
5. Program Penanganan Bencana
6. Program Pengelolaan Taman makam Pahlawan
7. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Perbandingan antara capaian realisasi indicator kinerja dan capaian realisasi keuangan Dinas Sosial Kabupaten Seruyan pada 7 (tujuh) program , 14 (empat belas) kegiatan dan 52 (lima puluh dua) sub kegiatan dengan rincian sebagai berikut :



Tabel 3.12
Analisis Program Kegiatan yang mendukung keberhasilan / kegagalan

Kode Rekening	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	% REALISASI KEUANGAN	TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	Penjelasan Singkat Atas Realisasi Belanja dan Realisasi Kinerja
01:06:01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	96,80	100 %	99,30 %	Realisasi Belanja Optimal, target kinerja tercapai
1.06.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	96,21	100 %	104 %	Realisasi Belanja Optimal, kinerja melampaui target
1.06.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	96,21	25 Orang /bulan	26 Orang /bulan	Realisasi Belanja Optimal, kinerja melampaui target
1.06.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	97,71	100 %	91,78 %	Realisasi Belanja Optimal, target kinerja tercapai
1.06.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	97,56	63 Paket	60 Paket	Realisasi Belanja Optimal, target kinerja tidak tercapai
1.06.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	98,21	10 Orang	7 Orang	Realisasi Belanja Optimal, target kinerja tidak tercapai
1.06.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	99,63	100 %	100 %	Realisasi Belanja Optimal, target kinerja tercapai
1.06.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	95,97	2 Paket	2 Paket	Realisasi Belanja Optimal, target kinerja tercapai
1.06.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	99,70	2 Paket	2 Paket	Realisasi Belanja Optimal, target kinerja tercapai
1.06.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	99,19	2 Paket	2 Paket	Realisasi Belanja Optimal, target kinerja tercapai
1.06.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	98,34	2 Paket	2 Paket	Realisasi Belanja Optimal, target kinerja tercapai
1.06.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	99,92	2 Paket	2 Paket	Realisasi Belanja Optimal, target kinerja tercapai
1.06.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	99,85	50 Laporan	50 Laporan	Realisasi Belanja Optimal, target kinerja tercapai
1.06.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	98,09	100 %	100,00 %	Realisasi Belanja Optimal, target kinerja tercapai
1.06.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	100,00	800 Laporan	800 Laporan	Realisasi Belanja Optimal, target kinerja tercapai
1.06.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	91,72	1 Laporan	1 Laporan	Realisasi Belanja Optimal, target kinerja tercapai
1.06.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	94,54	3 Laporan	3 Laporan	Realisasi Belanja Optimal, target kinerja tercapai
1.06.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	98,90	1 Laporan	1 Laporan	Realisasi Belanja Optimal, target kinerja tercapai
1.06.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	92,18	100 %	100 %	Realisasi Belanja Optimal, target kinerja tercapai
1.06.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	93,45	10 Unit	10 Unit	Realisasi Belanja Optimal, target kinerja tercapai
1.06.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	90,70	4 Unit	4 Unit	Realisasi Belanja Optimal, target kinerja tercapai
01:06:02	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	64,60	100 Persen	99,19 Persen	Realisasi Belanja tidak Optimal, target kinerja indikator program tercapai
1.06.02.2.02	Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	75,54	100 Persen	40 Persen	Realisasi Belanja Kurang Optimal, target kinerja indikator kegiatan tidak tercapai karena karena kurangnya kesadaran penyelenggara PUB/UGB tentang pentingnya perizinan pengumpulan sumbangan
1.06.02.2.02.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	75,54	20 Dokumen	8 Dokumen	Realisasi Belanja Kurang Optimal, target kinerja tidak tercapai karena penyelenggara PUB masih sedikit yang mengajukan rekomendasi PUB
1.06.02.2.03	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	64,15	100 %	113 %	Realisasi Belanja tidak Optimal, target kinerja indikator kegiatan tercapai dengan mengikuti UKOM yang dilaksanakan kemensos



**Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP)
Dinas Sosial Kabupaten Serang Tahun 2025**

1.06.02.2.03.0001	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	87,02	10	Orang	7	Orang	Realisasi Belanja Kurang Optimal, target kinerja tidak tercapai karena tidak semua desa/kelurahan mengangkat PSM
1.06.02.2.03.0002	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	61,40	10	Orang	10	Orang	Realisasi Belanja tidak Optimal, target kinerja tercapai
1.06.02.2.03.0003	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	95,90	2	Keluarga	5	Keluarga	Realisasi Belanja Optimal, kinerja melampaui target
1.06.02.2.03.0004	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	61,38	6	Lembaga	10	Lembaga	Realisasi Belanja tidak Optimal, kinerja melampaui target
1.06.02.2.03.0005	Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	98,49	2	Sertifikat	2	Sertifikat	Realisasi Belanja Optimal, target kinerja tercapai
01:06:03	PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN	92,93	100	%	66,67	%	Realisasi Belanja Optimal, target kinerja tidak tercapai karena menyesuaikan dengan kasus insidental yang terjadi
1.06.03.2.01	Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk Dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal	92,93	100	%	67	%	Realisasi Belanja Optimal, target kinerja tidak tercapai karena menyesuaikan dengan kasus insidental yang terjadi
1.06.03.2.01.0001	Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal	92,93	3	Orang	2	Orang	Realisasi Belanja Optimal, target kinerja tidak tercapai karena menyesuaikan dengan kasus insidental yang terjadi
01:06:04	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	95,82	100	Persen	149	Persen	Realisasi Belanja Optimal, kinerja melampaui target
1.06.04.2.01	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	95,37	100	Persen	128	Persen	Realisasi Belanja Optimal, kinerja melampaui target
1.06.04.2.01.0001	Penyediaan Permakanan	98,58	140	Orang	100	Orang	Realisasi Belanja Optimal, target kinerja tercapai
1.06.04.2.01.0002	Penyediaan Sandang	100,00	25	Orang	6	Orang	Realisasi Belanja Optimal, target kinerja tidak tercapai karena efisiensi anggaran
1.06.04.2.01.0003	Penyediaan Alat Bantu	94,07	20	Orang	28	Orang	Realisasi Belanja Optimal, kinerja melampaui target
1.06.04.2.01.0004	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	98,57	23	Orang	14	Orang	Realisasi Belanja Optimal, target kinerja tercapai
1.06.04.2.01.0005	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	95,46	5	Orang	15	Orang	Realisasi Belanja Optimal, kinerja melampaui target
1.06.04.2.01.0006	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	97,35	10	Orang	5	Orang	Realisasi Belanja Optimal, target kinerja tercapai
1.06.04.2.01.0007	Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak	-	10	Orang	16	Orang	Tidak terealisasi, target kinerja tercapai karena hanya pendampingan di dalam kota
1.06.04.2.01.0008	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	98,10	5	Orang	4	Orang	Realisasi Belanja Optimal, target kinerja tidak tercapai
1.06.04.2.01.0009	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	87,57	10	Orang	90	Orang	Realisasi Belanja Kurang Optimal, kinerja melampaui target
1.06.04.2.01.0010	Pemberian Layanan Kedaruratan	-	5	Orang	27	Orang	Tidak terealisasi, karena kasus layanan kedaruratan hanya memerlukan pendampingan pekerja sosial
1.06.04.2.01.0011	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	-	5	Orang	7	Orang	Tidak terealisasi, karena kasus penelusuran keluarga hanya di dalam kota
1.06.04.2.01.0012	Pemberian Layanan Rujukan	79,59	7	Orang	26	Orang	Realisasi Belanja Kurang Optimal, menyesuaikan dengan kasus insidental yang memerlukan rujukan
1.06.04.2.02	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	98,02	100	Persen	96	Persen	Realisasi Belanja Optimal, target kinerja tercapai
1.06.04.2.02.0003	Penyediaan Permakanan	100,00	20	Orang	5	Orang	Realisasi Belanja Optimal, target kinerja tidak tercapai karena efisiensi anggaran
1.06.04.2.02.0008	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA	97,92	7	Orang	20	Orang	Realisasi Belanja Optimal, kinerja melampaui target
1.06.04.2.02.0014	Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	96,41	1	Dokumen	1	Dokumen	Realisasi Belanja Optimal, target kinerja tercapai
01:06:05	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	96,73	100	Persen	100,00	Persen	Realisasi Belanja Optimal, target kinerja tercapai
1.06.05.2.02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	96,73	100	Persen	100	Persen	Realisasi Belanja Optimal, target kinerja tercapai
1.06.05.2.02.0001	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	98,60	40.000	Orang	82.579	Orang	Realisasi Belanja Optimal, kinerja melampaui target karena adanya transisi penggabungan 3 sumber data kesejahteraan sosial menjadi DTSN



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP)
Dinas Sosial Kabupaten Serang Tahun 2025

1.06.05.2.02.0002	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	96,14	18.084	Keluarga	11.232	Keluarga	Realisasi Belanja Optimal, target kinerja tercapai karena jumlah KPM idealnya menurun dengan pemutakhiran data
1.06.05.2.02.0003	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	95,53	7.814	Keluarga	11.232	Keluarga	Realisasi Belanja Optimal, kinerja melampaui target karena fasilitasi bansos PKH, Sembako dan PBI
1.06.05.2.02.0004	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	98,17	50	Orang	38	Orang	Realisasi Belanja Optimal, target kinerja tercapai
01:06:06	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	99,16	100	Persen	100,00	Persen	Realisasi Belanja Optimal, target kinerja tercapai
1.06.06.2.01	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	99,48	100	Persen	100	Persen	Realisasi Belanja Optimal, target kinerja tercapai
1.06.06.2.01.0001	Penyediaan Makanan	99,99	100	Orang	134	Orang	Realisasi Belanja Optimal, kinerja melampaui target menyesuaikan dengan kejadian bencana alam / non alam
1.06.06.2.01.0002	Penyediaan Sandang	99,69	60	Orang	127	Orang	Realisasi Belanja Optimal, kinerja melampaui target menyesuaikan dengan kejadian bencana alam / non alam
1.06.06.2.01.0003	Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	96,92	10	Unit	-	Unit	Realisasi Belanja Optimal, target kinerja tidak tercapai karena kejadian bencana tidak memerlukan pembangunan tenda pengungsi
1.06.06.2.01.0004	Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	99,83	20	Orang	56	Orang	Realisasi Belanja Optimal, kinerja melampaui target menyesuaikan dengan kejadian bencana alam / non alam
1.06.06.2.01.0005	Pelayanan Dukungan Psikososial	97,81	100	Orang	122	Orang	Realisasi Belanja Optimal, kinerja melampaui target menyesuaikan dengan kejadian bencana alam / non alam
1.06.06.2.02	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	98,02	100	Persen	100	Persen	Realisasi Belanja Optimal, target kinerja tercapai
1.06.06.2.02.0001	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana	98,44	2	Kampung	2	Kampung	Realisasi Belanja Optimal, target kinerja tercapai
1.06.06.2.02.0002	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	97,68	69	Orang	69	Orang	Realisasi Belanja Optimal, target kinerja tercapai
01:06:07	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	87,24	100	Persen	100,00	Persen	Realisasi Belanja Kurang Optimal, target kinerja tercapai
1.06.07.2.01	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	87,24	100	Persen	100	Persen	Realisasi Belanja Kurang Optimal, target kinerja tercapai
1.06.07.2.01.0001	Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	97,56	2	Dokumen	2	Dokumen	Realisasi Belanja Optimal, target kinerja tercapai
1.06.07.2.01.0002	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	35,82	1	Makam	1	Makam	Realisasi Belanja tidak Optimal, target kinerja tercapai
1.06.07.2.01.0003	Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	92,50	1	Makam	1	Makam	Realisasi Belanja Optimal, target kinerja tercapai
JUMLAH		94,38			95,69	%	



3.2 REALISASI ANGGARAN DINAS SOSIAL TAHUN 2025

Realisasi pendapatan tahun 2025 sebesar Rp.1.000.000.000,00 dari target pendapatan sebesar Rp.0,00. Dinas Sosial Kabupaten Seruyan merupakan salah satu dari Perangkat Daerah yang tidak mempunyai target Pendapatan Asli Daerah bersumber dari Pendapatan Pajak Daerah, Pendapatan Retribusi Daerah dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah. Namun pada Tahun 2025 mendapat Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah berupa pendapatan Hibah Barang Milik Daerah berupa asset tanah dari Pemerintah Desa Sandul kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Seruyan untuk pembangunan sarana pendidikan Sekolah Rakyat (SR), berdasarkan SK Bupati Seruyan Nomor 100.3.3.2/245/2025 tentang Penetapan Nilai dan Pencatatan Aset Tetap Tanah pada Daftar Barang Pengguna Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Dinas Sosial dan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Seruyan.

Anggaran Belanja Daerah Dinas Sosial Kabupaten Seruyan pada Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp. 6.485.074.328,00 dan direalisasikan sebesar Rp. 6.120.919.545,00 atau 94,38%, dimana belanja tersebut terdiri dari Belanja Operasi dan Belanja Modal, sebagaimana rincian tabel dibawah ini:

Tabel 3.13
Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Daerah TA 2025

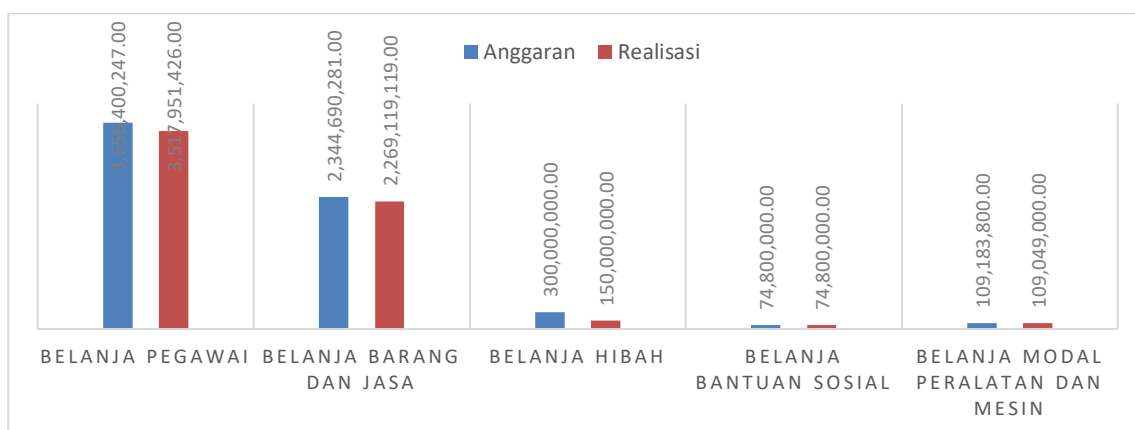
NO	JENIS BELANJA	ANGGARAN	REALISASI	%
1	BELANJA OPERASI	6.375.890.528,00	6.011.870.545,00	94,29
	Belanja Pegawai	3.656.400.247,00	3.517.951.426,00	96,21
	Belanja Barang dan Jasa	2.344.690.281,00	2.269.119.119,00	96,78
	Belanja Hibah	300.000.000,00	150.000.000,00	50,00
	Belanja Bantuan Sosial	74.800.000,00	74.800.000,00	100,00
2	BELANJA MODAL	109.183.800,00	109.049.000,00	99,88
	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	109.183.800,00	109.049.000,00	99,88
	JUMLAH BELANJA	6.485.074.328,00	6.120.919.545,00	94,38

Pencapaian kinerja belanja daerah, dapat dilihat pada masing-masing jenis belanja pada grafik dibawah ini dimana Belanja Operasi yang dianggarkan sebesar Rp. 6.375.890.528,00 mencapai realisasi sebesar



Rp.6.011.870.545,00 atau sebesar 94,29%. Belanja Modal dianggarkan sebesar Rp. 109.183.800,00 dengan realisasi sebesar Rp.109.049.000,00 atau sebesar 99,88%. Kenaikan dan penurunan kinerja belanja daerah dapat kita baca pada laju grafik dibawah ini :

Gambar 3.3
Grafik Anggaran dan Realisasi Belanja Dinas Sosial TA 2025



Dari alokasi anggaran belanja yang telah ditetapkan, capaian realisasi yang berhasil dicapai selama tahun anggaran 2025 adalah sebesar Rp. 6.120.919.545,00 atau 94,38% dari alokasi anggaran sebesar Rp. 6.485.074.328,00. Jika dibandingkan dengan realisasi belanja Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp. 7.525.106.680,00 atau 85,17% dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 3.14
Perbandingan Anggaran dan Realisasi Belanja TA 2025 dan 2024

KODERING	JENIS BELANJA	ANGGARAN	REALISASI 2025	REALISASI 2024	TAMBAH / KURANG
5.1	BELANJA OPERASI	6.375.890.528,00	6.011.870.545,00	7.421.777.180,00	-1.409.906.635,00
5.1.01	Belanja Pegawai	3.656.400.247,00	3.517.951.426,00	3.539.404.445,00	-21.453.019,00
5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	2.082.878.721,00	1.975.214.431,00	1.895.822.206,00	79.392.225,00
5.1.01.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	1.573.521.526,00	1.542.736.995,00	1.503.947.239,00	38.789.756,00
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	0,00	0,00	139.635.000,00	-139.635.000,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.344.690.281,00	2.269.119.119,00	3.806.834.985,00	-1.537.715.866,00
5.1.02.01	Belanja Barang	663.083.050,00	648.735.200,00	1.005.710.000,00	-356.974.800,00
5.1.02.02	Belanja Jasa	726.634.231,00	697.211.890,00	718.530.864,00	-21.318.974,00
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan	119.340.000,00	118.219.600,00	328.146.250,00	-209.926.650,00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	832.633.000,00	804.952.429,00	1.754.447.871,00	-949.495.442,00
5.1.05	Belanja Hibah	300.000.000,00	150.000.000,00	23.365.250,00	126.634.750,00
5.1.05.05	Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	300.000.000,00	150.000.000,00	23.365.250,00	126.634.750,00
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	74.800.000,00	74.800.000,00	52.172.500,00	22.627.500,00
5.1.06.01	Belanja Bantuan Sosial kepada Individu	74.800.000,00	74.800.000,00	52.172.500,00	22.627.500,00



5.2	BELANJA MODAL	109.183.800,00	109.049.000,00	103.329.500,00	5.719.500,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	109.183.800,00	109.049.000,00	103.329.500,00	5.719.500,00
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	27.472.800,00	27.471.000,00	27.999.500,00	-528.500,00
5.2.02.07	Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan	0,00	0,00	4.930.000,00	-4.930.000,00
5.2.02.10	Belanja Modal Komputer	81.711.000,00	81.578.000,00	70.400.000,00	11.178.000,00
JUMLAH BELANJA		6.485.074.328,00	6.120.919.545,00	7.525.106.680,00	-1.404.187.135,00

Kendala dan permasalahan yang dihadapi dalam tahun 2025 dalam kaitannya dengan pencapaian penyerapan pagu anggaran belanja yang telah ditetapkan untuk mewujudkan indikator kinerja yang diharapkan. Kendala dan permasalahan tersebut didasarkan pada kondisi nyata gambaran umum, dengan uraian sebagai berikut.

1. Adanya efisiensi anggaran yang menyebabkan pelaksanaan program kegiatan dinas sosial tidak maksimal dalam pelayanan kesejahteraan sosial;
2. Terbatasnya tersedianya dana pada Kas Daerah untuk sumber dana PAD pada 3 (tiga) triwulan awal, menyebabkan bidang teknis menunda pelaksanaan kegiatan / tidak melaksanakan kegiatan sehingga percepatan realisasi anggaran menumpuk pada triwulan terakhir dan penyerapan anggaran tidak maksimal;
3. Transisi perubahan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) menjadi Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) yang merupakan penggabungan dari beberapa data terkait kesejahteraan sosial, seperti Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), Regsosek, dan P3KE, mengakibatkan data yang dikelola Dinas Sosial meningkat dan perlu verifikasi dan validasi data kembali.

Upaya mengatasi permasalahan agar kedepannya penyerapan anggaran dan capaian kinerja lebih optimal dengan tindak lanjut sebagai berikut :

1. Perlu penganggaran dana untuk verifikasi dan validasi data Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) dan pemutakhiran Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN);



2. Perlu ditingkatkan keakuratan perhitungan kebutuhan anggaran sehingga pada saat perubahan anggaran tidak lagi terjadi kelebihan / kekurangan penganggaran.
3. Mengoptimalkan konsultasi dan koordinasi dalam proses administrasi penatausahaan keuangan untuk meminimalisir kekurangan-kekurangan administrasi dalam proses pencairan dana,

Sedangkan faktor-faktor penunjang dalam pencapaian kinerja adalah:

1. Adanya perbaikan sistem kerja dan sarana dan prasarana yang mendukung pencapaian target kinerja;
2. Adanya peningkatan kapasitas sumber daya aparatur baik melalui pembinaan dan pelatihan internal, ataupun melalui peningkatan jenjang pendidikan;
3. Semakin meningkatnya koordinasi antara dinas/kantor/badan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi;
4. Adanya kegiatan Asistensi / Pendampingan dan Rekonsiliasi sehingga pelaporan dapat lebih akurat dan tepat waktu.



Perbandingan antara anggaran dan realisasi belanja APBD Dinas Sosial Kabupaten Seruyan pada 7 (tujuh) program, 14 (empat belas) kegiatan dan 52 (lima puluh dua) sub kegiatan dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 3.15
Rincian Realisasi Belanja Per Program Kegiatan Dan Sub Kegiatan Dinas Sosial Kabupaten Seruyan TA. 2025

Kode Rekening	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI				SISA ANGGARAN	Penjelasan Singkat Atas Realisasi Belanja (Melampaui Target, Optimal, Kurang Optimal, Tidak Optimal, Tidak Terealisasi)
			OPERASIONAL	MODAL	TOTAL	%		
01:06:01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5.187.444.928,00	5.021.350.726,00	-	5.021.350.726,00	96,80	166.094.202,00	Realisasi Belanja Optimal, target kinerja tercapai
1.06.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.656.400.247,00	3.517.951.426,00	-	3.517.951.426,00	96,21	138.448.821,00	Realisasi Belanja Optimal, target kinerja tercapai
1.06.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.656.400.247,00	3.517.951.426,00	-	3.517.951.426,00	96,21	138.448.821,00	Realisasi Belanja Optimal, target kinerja tercapai
1.06.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	35.928.000,00	35.105.226,00	-	35.105.226,00	97,71	822.774,00	Realisasi Belanja Optimal, target kinerja tercapai
1.06.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	27.675.000,00	27.000.000,00	-	27.000.000,00	97,56	675.000,00	Realisasi Belanja Optimal, target kinerja tercapai
1.06.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	8.253.000,00	8.105.226,00	-	8.105.226,00	98,21	147.774,00	Realisasi Belanja Optimal, target kinerja tercapai
1.06.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	659.842.850,00	657.389.584,00	-	657.389.584,00	99,63	2.453.266,00	Realisasi Belanja Optimal, target kinerja tercapai
1.06.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	14.176.400,00	13.605.000,00	-	13.605.000,00	95,97	571.400,00	Realisasi Belanja Optimal, target kinerja tercapai
1.06.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	218.321.750,00	108.617.500,00	109.049.000,00	217.666.500,00	99,70	655.250,00	Realisasi Belanja Optimal, target kinerja tercapai
1.06.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	20.716.000,00	20.548.000,00	-	20.548.000,00	99,19	168.000,00	Realisasi Belanja Optimal, target kinerja tercapai
1.06.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	33.713.000,00	33.155.000,00	-	33.155.000,00	98,34	558.000,00	Realisasi Belanja Optimal, target kinerja tercapai
1.06.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	77.256.700,00	77.192.500,00	-	77.192.500,00	99,92	64.200,00	Realisasi Belanja Optimal, target kinerja tercapai
1.06.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	295.659.000,00	295.222.584,00	-	295.222.584,00	99,85	436.416,00	Realisasi Belanja Optimal, target kinerja tercapai
1.06.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	693.169.231,00	679.908.990,00	-	679.908.990,00	98,09	13.260.241,00	Realisasi Belanja Optimal, target kinerja tercapai
1.06.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	15.015.000,00	15.015.000,00	-	15.015.000,00	100,00	-	Realisasi Belanja Optimal, target kinerja tercapai
1.06.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	68.369.958,00	62.705.900,00	-	62.705.900,00	91,72	5.664.058,00	Realisasi Belanja Optimal, target kinerja tercapai
1.06.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	20.520.000,00	19.399.600,00	-	19.399.600,00	94,54	1.120.400,00	Realisasi Belanja Optimal, target kinerja tercapai
1.06.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	589.264.273,00	582.788.490,00	-	582.788.490,00	98,90	6.475.783,00	Realisasi Belanja Optimal, target kinerja tercapai
1.06.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	142.104.600,00	130.995.500,00	-	130.995.500,00	92,18	11.109.100,00	Realisasi Belanja Optimal, target kinerja tercapai
1.06.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	76.424.100,00	71.421.300,00	-	71.421.300,00	93,45	5.002.800,00	Realisasi Belanja Optimal, target kinerja tercapai
1.06.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	65.680.500,00	59.574.200,00	-	59.574.200,00	90,70	6.106.300,00	Realisasi Belanja Optimal, target kinerja tercapai
01:06:02	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	482.160.100,00	311.482.200,00	-	311.482.200,00	64,60	170.677.900,00	Realisasi Belanja tidak Optimal, karena pelaksanaan sosialisasi PUB dan Peningkatan kompetensi PSKS perorangan tidak terlaksana sesuai target
1.06.02.2.02	Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	18.944.000,00	14.310.800,00	-	14.310.800,00	75,54	4.633.200,00	Realisasi Belanja Kurang Optimal, karena sosialisasi tertib perizinan PUB tidak maksimal dilaksanakan
1.06.02.2.02.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	18.944.000,00	14.310.800,00	-	14.310.800,00	75,54	4.633.200,00	Realisasi Belanja Kurang Optimal, karena pelaksanaan sosialisasi PUB melalui media cetak / pamflet tidak terlaksana
1.06.02.2.03	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	463.216.100,00	297.171.400,00	-	297.171.400,00	64,15	166.044.700,00	Realisasi Belanja tidak Optimal, karena pelaksanaan pertemuan peningkatan kapasitas PSKS perorangan tidak terlaksana sesuai target
1.06.02.2.03.0001	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	18.106.600,00	15.756.200,00	-	15.756.200,00	87,02	2.350.400,00	Realisasi Belanja Kurang Optimal, karena pertemuan peningkatan kompetensi PSM tidak terlaksana sesuai target
1.06.02.2.03.0002	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	11.228.000,00	6.893.800,00	-	6.893.800,00	61,40	4.334.200,00	Realisasi Belanja tidak Optimal, karena pertemuan peningkatan kompetensi TKSK tidak terlaksana sesuai target



**Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP)
Dinas Sosial Kabupaten Serang Tahun 2025**

1.06.02.2.03.0003	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	18.935.500,00	18.158.200,00	-	18.158.200,00	95,90	777.300,00	Realisasi Belanja Optimal, target kinerja tercapai
1.06.02.2.03.0004	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	410.406.000,00	251.891.800,00	-	251.891.800,00	61,38	158.514.200,00	Realisasi Belanja tidak Optimal, karena Hibah untuk karang Taruna Tahap 2 tidak tersalur
1.06.02.2.03.0005	Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	4.540.000,00	4.471.400,00	-	4.471.400,00	98,49	68.600,00	Realisasi Belanja Optimal, target kinerja tercapai
01:06:03	PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN	2.663.000,00	2.474.700,00	-	2.474.700,00	92,93	188.300,00	Realisasi Belanja Optimal, target kinerja tercapai
1.06.03.2.01	Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk Dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal	2.663.000,00	2.474.700,00	-	2.474.700,00	92,93	188.300,00	Realisasi Belanja Optimal, target kinerja tercapai
1.06.03.2.01.0001	Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal	2.663.000,00	2.474.700,00	-	2.474.700,00	92,93	188.300,00	Realisasi Belanja Optimal, target kinerja tercapai
01:06:04	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	259.008.000,00	248.179.350,00	-	248.179.350,00	95,82	10.828.650,00	Realisasi Belanja Optimal, target kinerja tercapai
1.06.04.2.01	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	214.975.500,00	205.019.850,00	-	205.019.850,00	95,37	9.955.650,00	Realisasi Belanja Optimal, target kinerja tercapai
1.06.04.2.01.0001	Penyediaan Permakanan	43.604.000,00	42.983.400,00	-	42.983.400,00	98,58	620.600,00	Realisasi Belanja Optimal, target kinerja tercapai
1.06.04.2.01.0002	Penyediaan Sandang	3.696.500,00	3.696.500,00	-	3.696.500,00	100,00	-	Realisasi Belanja Optimal, target kinerja tercapai
1.06.04.2.01.0003	Penyediaan Alat Bantu	45.239.000,00	42.554.800,00	-	42.554.800,00	94,07	2.684.200,00	Realisasi Belanja Optimal, target kinerja tercapai
1.06.04.2.01.0004	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	39.723.000,00	39.153.350,00	-	39.153.350,00	98,57	569.650,00	Realisasi Belanja Optimal, target kinerja tercapai
1.06.04.2.01.0005	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	15.613.000,00	14.904.100,00	-	14.904.100,00	95,46	708.900,00	Realisasi Belanja Optimal, target kinerja tercapai
1.06.04.2.01.0006	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	39.513.000,00	38.466.100,00	-	38.466.100,00	97,35	1.046.900,00	Realisasi Belanja Optimal, target kinerja tercapai
1.06.04.2.01.0007	Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak	400.000,00	-	-	-	-	400.000,00	Tidak terealisasi, target kinerja tercapai karena hanya pendampingan di dalam kota
1.06.04.2.01.0008	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	10.500.000,00	10.300.000,00	-	10.300.000,00	98,10	200.000,00	Realisasi Belanja Optimal, target kinerja tercapai
1.06.04.2.01.0009	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	1.979.000,00	1.733.100,00	-	1.733.100,00	87,57	245.900,00	Realisasi Belanja Kurang Optimal, menyesuaikan dengan kasus insidental yang terjadi
1.06.04.2.01.0010	Pemberian Layanan Kedaruratan	200.000,00	-	-	-	-	200.000,00	Tidak terealisasi, karena kasus layanan kedaruratan hanya memerlukan pendampingan pekerja sosial
1.06.04.2.01.0011	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	400.000,00	-	-	-	-	400.000,00	Tidak terealisasi, karena kasus penelusuran keluarga hanya di dalam kota
1.06.04.2.01.0012	Pemberian Layanan Rujukan	14.108.000,00	11.228.500,00	-	11.228.500,00	79,59	2.879.500,00	Realisasi Belanja Kurang Optimal, menyesuaikan dengan kasus insidental yang memerlukan rujukan
1.06.04.2.02	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	44.032.500,00	43.159.500,00	-	43.159.500,00	98,02	873.000,00	Realisasi Belanja Optimal, target kinerja tercapai
1.06.04.2.02.0003	Penyediaan Permakanan	5.310.000,00	5.310.000,00	-	5.310.000,00	100,00	-	Realisasi Belanja Optimal, target kinerja tercapai
1.06.04.2.02.0008	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA	34.188.500,00	33.478.100,00	-	33.478.100,00	97,92	710.400,00	Realisasi Belanja Optimal, target kinerja tercapai
1.06.04.2.02.0014	Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	4.534.000,00	4.371.400,00	-	4.371.400,00	96,41	162.600,00	Realisasi Belanja Optimal, target kinerja tercapai
01:06:05	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	221.566.000,00	214.319.069,00	-	214.319.069,00	96,73	7.246.931,00	Realisasi Belanja Optimal, target kinerja tercapai
1.06.05.2.02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	221.566.000,00	214.319.069,00	-	214.319.069,00	96,73	7.246.931,00	Realisasi Belanja Optimal, target kinerja tercapai
1.06.05.2.02.0001	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	60.271.000,00	59.426.300,00	-	59.426.300,00	98,60	844.700,00	Realisasi Belanja Optimal, target kinerja tercapai
1.06.05.2.02.0002	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	105.766.000,00	101.683.569,00	-	101.683.569,00	96,14	4.082.431,00	Realisasi Belanja Optimal, target kinerja tercapai
1.06.05.2.02.0003	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	49.459.000,00	47.250.400,00	-	47.250.400,00	95,53	2.208.600,00	Realisasi Belanja Optimal, target kinerja tercapai
1.06.05.2.02.0004	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	6.070.000,00	5.958.800,00	-	5.958.800,00	98,17	111.200,00	Realisasi Belanja Optimal, target kinerja tercapai
01:06:06	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	279.034.100,00	276.702.200,00	-	276.702.200,00	99,16	2.331.900,00	Realisasi Belanja Optimal, target kinerja tercapai
1.06.06.2.01	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	219.012.100,00	217.867.500,00	-	217.867.500,00	99,48	1.144.600,00	Realisasi Belanja Optimal, target kinerja tercapai
1.06.06.2.01.0001	Penyediaan Makanan	53.654.000,00	53.649.100,00	-	53.649.100,00	99,99	4.900,00	Realisasi Belanja Optimal, target kinerja tercapai
1.06.06.2.01.0002	Penyediaan Sandang	58.023.300,00	57.842.700,00	-	57.842.700,00	99,69	180.600,00	Realisasi Belanja Optimal, target kinerja tercapai



**Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP)
Dinas Sosial Kabupaten Seruyan Tahun 2025**

1.06.06.2.01.0003	Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	15.321.000,00	14.848.400,00	-	14.848.400,00	96,92	472.600,00	Realisasi Belanja Optimal, target kinerja tercapai
1.06.06.2.01.0004	Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	75.801.000,00	75.670.000,00	-	75.670.000,00	99,83	131.000,00	Realisasi Belanja Optimal, target kinerja tercapai
1.06.06.2.01.0005	Pelayanan Dukungan Psikososial	16.212.800,00	15.857.300,00	-	15.857.300,00	97,81	355.500,00	Realisasi Belanja Optimal, target kinerja tercapai
1.06.06.2.02	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	60.022.000,00	58.834.700,00	-	58.834.700,00	98,02	1.187.300,00	Realisasi Belanja Optimal, target kinerja tercapai
1.06.06.2.02.0001	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana	26.836.000,00	26.418.300,00	-	26.418.300,00	98,44	417.700,00	Realisasi Belanja Optimal, target kinerja tercapai
1.06.06.2.02.0002	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	33.186.000,00	32.416.400,00	-	32.416.400,00	97,68	769.600,00	Realisasi Belanja Optimal, target kinerja tercapai
01:06:07	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	53.198.200,00	46.411.300,00	-	46.411.300,00	87,24	6.786.900,00	Realisasi Belanja Kurang Optimal, pemeliharaan TMP tidak terlaksana sesuai target
1.06.07.2.01	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	53.198.200,00	46.411.300,00	-	46.411.300,00	87,24	6.786.900,00	Realisasi Belanja Kurang Optimal, pemeliharaan TMP tidak terlaksana sesuai target
1.06.07.2.01.0001	Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	39.522.200,00	38.558.800,00	-	38.558.800,00	97,56	963.400,00	Realisasi Belanja Optimal, target kinerja tercapai
1.06.07.2.01.0002	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	8.464.000,00	3.031.400,00	-	3.031.400,00	35,82	5.432.600,00	Realisasi Belanja tidak Optimal, karena ada kegiatan pemeliharaan yang tidak terlaksana
1.06.07.2.01.0003	Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	5.212.000,00	4.821.100,00	-	4.821.100,00	92,50	390.900,00	Realisasi Belanja Optimal, target kinerja tercapai
JUMLAH		6.485.074.328,00	6.011.870.545,00	109.049.000,00	6.120.919.545,00	94,38	364.154.783,00	



3.3 CAPAIAN KINERJA STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM) BIDANG SOSIAL TAHUN 2025 (CAPAIAN KINERJA LAINNYA)

Upaya mewujudkan kesejahteraan sosial telah tercantum dalam Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial. Rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial dan perlindungan sosial termasuk dalam upaya penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Berdasarkan lampiran Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, dalam pembagian kewenangannya maka kebijakan umum SPM Bidang Sosial Kabupaten/Kota yaitu :

1. Rehabilitasi Sosial Dasar di Luar Panti (bagi Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Gelandangan dan Pengemis); serta
2. Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Provinsi

Standar Nasional penanganan terhadap Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) diatur secara ketat melalui instrumen Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan Standar Nasional Rehabilitasi Sosial. Penerapan Norma, Standar, Prosedur, Dan Kriteria (NSPK) SPM Sosial sesuai dengan Permendagri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM). Pengumpulan data sesuai dengan Standar Teknis SPM ditujukan untuk pencapaian 100 seratus persen dari Target dan Indikator Kinerja pencapaian SPM setiap tahun.

SPM Bidang Sosial merupakan penjabaran dari target yang telah ditetapkan oleh Kementerian Sosial RI berdasarkan Peraturan Menteri Sosial RI Nomor Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota. SPM Bidang Sosial kabupaten/Kotai mencakup 5 (lima) pelayanan dasar yaitu:

1. Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di Luar Panti;
2. Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Luar Panti;
3. Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di Luar Panti;
4. Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti; dan



5. Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota
Target penerima layanan SPM bidang Sosial tahun 2025 termuat dalam Keputusan Bupati Seruyan Nomor 100.3.3.2/105/2024 tentang Target Capaian Standar Pelayanan Minimal Pemerintah Kabupaten Seruyan Tahun 2025. Adapun realisasi SPM Bidang Sosial dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 3.16
Realisasi SPM Bidang Sosial Tahun 2025

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target NSPK	Target	Realisasi	Capaian	Kategori
1.	Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti	Jumlah Warga Negara penyandang disabilitas yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	100 %	30	50	100 %	Tuntas Paripurna
2.	Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti	Jumlah Warga Negara anak terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	100 %	16	15	93,75 %	Tuntas Pratama
3.	Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti	Jumlah Warga Negara lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	100 %	10	23	100 %	Tuntas Paripurna
4.	Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti	Jumlah Warga Negara/ gelandangan dan pengemis yang mendapatkan rehabilitasisosial di luar panti	100 %	4	4	100 %	Tuntas Paripurna
5.	Perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana Kabupaten/Kota.	Jumlah Warga Negara korban bencana Kab/Kota yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana Kabupaten/Kota.	100 %	100	1391	100 %	Tuntas Paripurna

Permasalahan dan Kendala dalam penerapan Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial Tahun 2025 antara lain :

1. Pengelolaan Data : BNBA penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis belum akurat sehingga memerlukan assesment ulang atau Verifikasi dan Validasi (verivali) ulang. Karena banyak penerima layanan SPM bersifat insidental sehingga menyulitkan perhitungan kebutuhan dan pada akhirnya antara target dan realisasi terdapat perbedaan. Data belum sepenuhnya terintegrasi dalam DTSEN
2. Minim SDM : Rasio SDM Kesejahteraan Sosial yang tidak sebanding dengan jumlah PPKS
3. Sarana : Belum tersedianya rumah singgah atau shelter sementara bagi PPKS sehingga terkadang kesulitan ketika mengevakuasi atau memberikan pelayanan bagi klien ppks disebabkan minimnya anggaran



- dalam Pembangunan rumah singgah, keterbatasan SDM professional, belum adanya Perda / Perbup yang mengatur pelayanan rumah singgah
4. Prasarana :Kondisi Kendaraan Operasional untuk penyaluran Bantuan Korban Bencana yang tidak maksimal Tenda pengungsi dalam kondisi kurang layak
 5. Bentuk adanya Tim Reaksi Cepat (TRC) pelayanan SPM di tingkat desa / kelurahan / kecamatan, sehingga semua permasalahan sosial langsung ke Dinas Sosial
 6. Anggaran untuk pelaksanaan program kegiatan dinas sosial terbatas
 7. Belum semua PPKS penyandang disabilitas mental bisa tertangani karena keterbatasan kuota rehabilitasi pada panti sosial.

3.4 CAPAIAN UPAYA PENGENTASAN KEMISKINAN TAHUN 2025

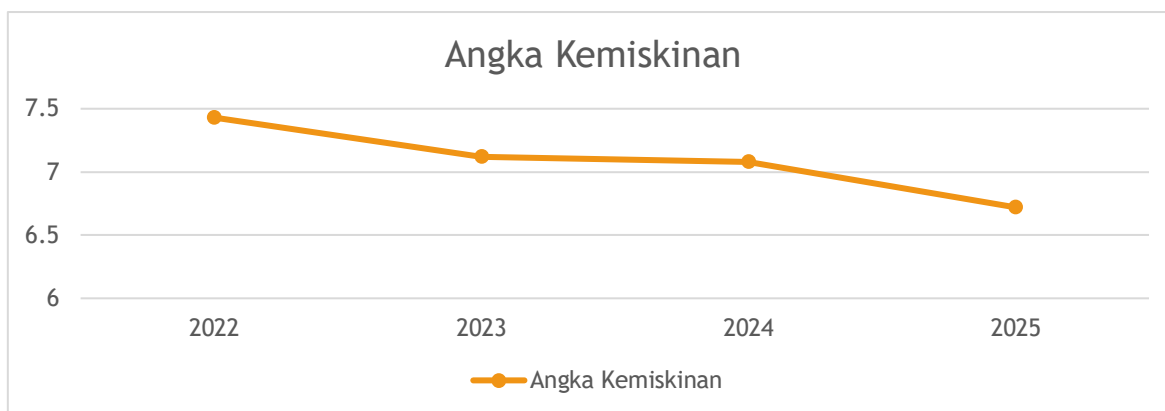
Untuk mengukur kemiskinan, Badan Pusat Statistik (BPS) menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (*basic needs approach*). Dengan pendekatan ini, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Jadi Penduduk Miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita perbulan dibawah garis kemiskinan. Perbandingan data Kemiskinan di Kabupaten Seruyan tahun 2022-2025 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.17
Data Kemiskinan Kabupaten Seruyan

No	Kemiskinan	2022	2023	2024	2025	Kenaikan / Penurunan
1	Persentase Penduduk Miskin (P0) (Persen)	7,43	7,12	7,08	6,72	0,38



Gambar 3.4
Grafik Data Kemiskinan Kabupaten Seruyan Tahun 2022-2025



Dari grafik dapat dilihat Angka Kemiskinan Kabupaten Seruyan pada tahun 2025 mengalami penurunan dibandingkan tahun 2024, terlihat dari Persentase penduduk miskin yang turun 0,38% dari angka kemiskinan Tahun 2025 sebesar 6,72% berbanding Tahun 2024 sebesar 7,08%. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat pendapatan masyarakat mengalami kenaikan sehingga jumlah penduduk miskin yang berada dibawah garis kemiskinan semakin berkurang, berbanding lurus dengan indeks keparahan kemiskinan dan indeks kedalaman kemiskinan yang juga menurun.

Kemiskinan tidak hanya berarti kekurangan finansial, tetapi juga mencakup kurangnya akses terhadap kebutuhan dasar seperti pangan, pendidikan, dan layanan kesehatan. Kemiskinan menjadi isu strategis daerah karena dampaknya yang luas dan mendalam terhadap pembangunan ekonomi, sosial, dan kesejahteraan masyarakat. Dari masalah pangan, kesehatan, pendidikan, hingga ketidakstabilan sosial, dampak kemiskinan merembet ke berbagai sektor dan memperburuk kondisi kehidupan secara keseluruhan.

Pengentasan kemiskinan menjadi tantangan bagi pemerintah yang memerlukan upaya terpadu dan berkelanjutan dari berbagai pihak. Upaya pengentasan kemiskinan haruslah bersifat komprehensif, mencakup penyediaan akses yang lebih baik terhadap kebutuhan dasar, pemberdayaan ekonomi, serta perbaikan infrastruktur dan layanan publik.



Hanya dengan pendekatan yang holistik dan berkelanjutan, siklus kemiskinan dapat diputus dan kesejahteraan masyarakat dapat ditingkatkan.

Peranan Dinas Sosial dalam Pengentasan Kemiskinan di Kabupaten Seruyan terkait dengan Pelayanan Kesejahteraan Sosial terhadap Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) di Kabupaten Seruyan. Tagging Pengentasan Kemiskinan Dinas Sosial dilaksanakan dalam 5 Program 8 Kegiatan dan 27 Sub Kegiatan

Langkah strategis yang dilaksanakan Dinas Sosial yaitu :

1. Menurunkan beban pengeluaran, melalui penyaluran Bansos PKH, Program Sembako, Bansos Penerima Bantuan Iuran (PBI), Bansos ATENSI, Bansos YAPI, Bansos Permakanan, Bansos Sandang, Bansos Alat Bantu penyandang disabilitas, Bansos untuk Korban bencana alam / sosial dan Bansos lainnya.
2. Meningkatkan pendapatan, melalui Pelatihan kewirausahaan, motivasi dan edukasi, Usaha Ekonomi Produktif (UEP) untuk keluarga pioneer, Bansos Barang stimulan usaha, pelatihan bina remaja, pelatihan keterampilan bagi Wanita Rawan Sosial Ekonomi (WRSE).

Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Upaya Pengentasan Kemiskinan dari Dinas Sosial dilaksanakan oleh Bidang Pemberdayaan Sosial, Bidang Rehabilitasi Sosial dan Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial. Dengan klasifikasi permasalahan, sasaran, rencana aksi dan realisasi sebagai berikut :



Tabel 3.18
Laporan Aksi RB Tematik Penguatan Kemiskinan Tahun 2025

Permasalahan	Sasaran	Indikator	Target	Rencana Aksi	Penjelasan Rencana Aksi	Output		Target					Jenis Kegiatan Aksi (Terkait/ Tidak Terkait Langsung Dengan Masyarakat / Stakeholder Utama)	Jumlah Anggaran	Penjelasan Pelaksanaan Renaksi Triwulan IV	Realisasi Anggaran Triwulan IV	Link Data Dukung Renaksi
						Satuan	Indikator	TW I	TW II	TW III	TW IV	Total					
Data kemiskinan belum terpadu (penggunaan basis data yang berbeda antar masing-masing OPD)	Tersedianya Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial - DTKS)	Persentase Pengelolaan Data Fakir Miskin (DTKS) Cakupan Daerah Kabupaten	100%	Pelaksanaan Pendataan dan Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation (SIK-NG)	Pendataan, Verifikasi dan Validasi data terhadap Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS), Penerima Bantuan, Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) dan Perlindungan Sosial yang lengkap dan akurat; Pengelolaan dan pemutakhiran Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS); pemadanan data DTKS dengan NIK	40.000 KPM	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) pada DTKS	0	10.000	10.000	20.000	40.000	Ya	105.766.000	Verifikasi dan validasi data terhadap PPKS, penerima bantuan PSKS dan Perlindungan Sosial yang lengkap dan akurat; Pengelolaan dan pemutakhiran Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS); pemadanan data DTKS dengan NIK	101.683.569	https://drive.google.com/drive/folders/107VUH-GCNQB-VJ00D7ujOK6bf1iPO3V1?usp=drive_link
Perlindungan dan Jaminan Sosial yang belum maksimal (Saldo nol, KPM yang dikeluarkan otomatis dari DTKS, alamat KPM yang tidak ditemukan dan warga miskin yang belum mendapat bantuan sosial)	Terfasilitasinya Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Persentase Keluarga Penerima Manfaat (KPM) pada DTKS yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	100%	Pelaksanaan Fasilitas Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Kegiatan Sosialisasi, pendampingan penyaluran dan monitoring evaluasi bantuan sosial, Program Keluarga Harapan (PKH), Program Sembako, UEP dan Bansos lainnya	7.864 KPM	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	1.500	1.500	2.000	2.864	7.864	Ya	49.459.000	Sosialisasi, pendampingan penyaluran dan monitoring evaluasi bantuan sosial, Program Keluarga Harapan (PKH), Program Sembako, UEP dan Bansos lainnya	47.250.400	https://drive.google.com/drive/folders/18R_M16Pr2o3FEMFZJGzGU2AmRcETbrou?usp=drive_link
Belum maksimalnya pelaksanaan program Rehabilitasi Sosial Dasar terhadap Penyandang disabilitas terlarant, anak terlarant, lanjut usia terlarant, gelandangan pengemis dan PMKS lainnya (aksesibilitas penyandang disabilitas masih rendah, anak terlarant, lanjut usia terlarant, gelandangan pengemis dan PMKS lainnya yang belum terpenuhi kebutuhan dasarnya)	Terlaksananya pemberian bantuan kebutuhan dasar bagi penyandang disabilitas terlarant, anak terlarant, lanjut usia terlarant, gelandangan pengemis dan PMKS lainnya yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di Luar Panti	Persentase Penyandang Disabilitas terlarant, Anak Terlarant, lanjut usia terlarant, gelandangan pengemis dan PMKS lainnya yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di Luar Panti	100%	Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlarant, Anak Terlarant, lanjut Usia Terlarant, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial; dan Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	Pengadaan paket makanan untuk lansia terlarant sesuai standar gizi minimal, Pengadaan sandang / peralatan sholat untuk anak di Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA), Penyediaan Alat Bantu penyandang disabilitas, Pelayanan Reunifikasi Keluarga bagi penyandang disabilitas mental (ODGI) dan orang terlarant, Penjaringan anak-anak terlarant / putus sekolah untuk mendapatkan pelatihan di PSBR, Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga dan bansos barang stimulan usaha, Fasilitas pembuatan identitas diri, fasilitas pembuatan jaminan kesehatan/ BPJS, Layanan Data dan Pengaduan, Layanan Kedaruratan, Pelayanan Penelusuran Keluarga, Layanan Rujukan ke RS/ Panti Sosial / Balai Rehabilitasi dan Kerjasama pelayanan rehabilitasi sosial antara Dinsos - Panti Sosial dan RS / RSJ.	292 Orang	Jumlah orang yang mendapatkan layanan sesuai kebutuhannya	50	50	75	117	292	Ya	259.008.000	Pemberian bantuan kebutuhan dasar bagi penyandang disabilitas terlarant, anak terlarant, lanjut usia terlarant, gelandangan pengemis dan PMKS lainnya diluar panti	248.179.350	https://drive.google.com/drive/folders/12Z569GwvS179z2NIB85O18vgNx6rXAO?usp=drive_link
Rendahnya pemahaman tentang perizinan pengumpulan uang/ barang dan perizinan undian gratis berhadiah, dalam mendukung pelayanan kesejahteraan sosial	Meningkatnya pemahaman dari LKS/Instansi Berhadiah dan Pengumpulan Sumbangan Uang atau Barang	Persentase Rekomendasi Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Sumbangan Uang atau Barang	100%	Pelaksanaan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	Pelaksanaan Sosialisasi penyelenggaraan perizinan pengumpulan uang / barang dan perizinan undian gratis berhadiah, Penertiban PUG dan UGB dalam mendukung pelayanan kesejahteraan sosial	20 Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	5	5	5	5	20	Ya	18.944.000	Sosialisasi penyelenggaraan perizinan pengumpulan uang / barang dan perizinan undian gratis berhadiah, Penertiban PUG dan UGB dalam mendukung pelayanan kesejahteraan sosial	14.310.800	https://drive.google.com/drive/folders/10h-xAZH2wbLpXGxiXfW0m7lowCioce?usp=drive_link
Rendahnya Kompetensi SDM Kesejahteraan Sosial untuk mendukung pelayanan kesejahteraan	Terlaksananya pengembangan kompetensi bagi Pekerja Sosial	Persentase Meningkatnya kompetensi SDM	100%	Pelaksanaan Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia	Peningkatan Kapasitas SDM kesejahteraan sosial melalui pertemuan / pelatihan, pemberian motivasi dan edukasi, pelatihan kewirausahaan dan bantuan barang untuk stimulan usaha untuk	20 orang / 2 keluarga	Jumlah Orang / Keluarga / Lembaga	0	5 orang / 0 keluarga	5 orang / 0 keluarga	10 orang / 2 keluarga	20 orang / 2 keluarga	Ya	410.406.000	Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia Kesejahteraan Sosial (SDM Kessos)	251.891.800	https://drive.google.com/drive/folders/1qg5IFK



**Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP)
Dinas Sosial Kabupaten Seruyan Tahun 2025**

sosial program pengentasan kemiskinan	Masyarakat (PSM), Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK), PSKS Keluarga dan PSKS Kelembagaan Karang Taruna	Kesejahteraan Sosial		Kesejahteraan Sosial (SDM Kessos)	keluarga pioneer dan bantuan hibah operasional Lembaga Karang Taruna Kabupaten	6 lembaga	yang Meningkatkan Kapasitasnya		2 lembaga	2 lembaga	2 lembaga	6 lembaga					6gN_QhWaXG4MLCCe8ybiT0wMb_?usp=drive_link
Rendahnya Kompetensi SDM Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) untuk mendukung pelayanan kesejahteraan sosial terhadap keluarga yang bermasalah	Meningkatnya Pelayanan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) terhadap keluarga yang bermasalah	Jumlah Sumber Daya Manusia dan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) yang mendapat peningkatan Kapasitas dan fasilitasi dalam penanganan kasus Kewenangan Kabupaten/Kota	1 LK3	Pelaksanaan Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	Peningkatan kapasitas Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) yang memberikan pelayanan konsultasi, konseling, pemberian/penyebarluasan informasi, penjangkauan, advokasi dan pemberdayaan keluarga serta rujukan ke lembaga pelayanan lainnya,	2 sertifikat	Sertifikat peningkatan kompetensi anggota LK3	0	0	0	2	2	Ya	4.540.000	Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	4.471.400	https://drive.google.com/drive/folders/1aP8bdUpveMIntg4SRc43yAGy_MWN Eb4_?usp=drive_link
Belum maksimalnya pelaksanaan program penanganan bencana terhadap korban bencana alam dan bencana sosial	Meningkatnya pelayanan terhadap korban bencana alam dan bencana sosial	Persentase Korban Bencana Alam dan bencana sosial yang terpenuhi kebutuhan Keselamatan Pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana Kab/Kota	100%	Pelaksanaan perlindungan sosial bagi korban bencana alam dan bencana sosial	perlindungan sosial bagi korban bencana alam dan bencana sosial berupa penyediaan permukiman, sandang, tempat penampungan pengungsi, penanganan khusus kelompok rentan dan layanan dukungan psikososial	164 orang	Jumlah Korban bencana alam / sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	14	50	50	50	164	ya	219.012.100	Penyaluran Korban Bencana Alam dan bencana sosial yang terpenuhi kebutuhan Dasarnya Pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana	217.867.500	https://drive.google.com/drive/folders/1s7DAJy8WgwhVOly3xUz4hSry1cocrMiB7usp=drive_link
Masih rendahnya kompetensi anggota TAGANA dan KSB	Meningkatnya kesiapsiagaan bencana bagi TAGANA dan masyarakat Kampung Siaga Bencana	Persentase KSB dan Taruna Siaga Bencana) yang siap siaga terhadap bencana yang Kab/Kota	100%	Koordinasi, Sosialisasi dan peningkatan kapasitas TAGANA dan KSB	Pelaksanaan koordinasi, sosialisasi dan peningkatan kapasitas TAGANA dan KSB melalui sosialisasi dan pelatihan mitigasi dan tanggap darurat	64 orang dan 2 KSB	Jumlah TAGANA dan KSB yang meningkatkan kapasitasnya	0	0	64	2	66	Ya	60.022.000	Peningkatan kesiapsiagaan bencana bagi TAGANA dan masyarakat Kampung Siaga Bencana	58.834.700	https://drive.google.com/drive/folders/1p15GEW32yAdUDDdzg3ufcftng2o2XG0?usp=drive_link
Jumlah														1.127.157.100	944.489.519		



3.5 CAPAIAN INDEKS KESEJAHTERAAN SOSIAL (IKESOS) KABUPATEN SERUYAN TAHUN 2025

Indeks Kesejahteraan Sosial (Ikesos/IKS) adalah alat ukur yang dikembangkan Kementerian Sosial (Kemensos) bersama SMERU untuk menilai keberdayaan dan kualitas hidup masyarakat. Indeks ini berfokus pada pemenuhan kebutuhan dasar, peranan sosial, dan keberdayaan ekonomi, yang digunakan dalam Rencana Strategis Kemensos 2020-2024 untuk menanggulangi kemiskinan dan memantau program sosial. Berdasarkan Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 143 / HUK/2025 tentang Pedoman Pengukuran Indeks Kesejahteraan Sosial, komponen utama Indeks Kesejahteraan Sosial (IKESOS/IKS) adalah :

1. Kebutuhan Dasar : Akses pangan, kesehatan, pendidikan, jaminan sosial, tempat tinggal layak, dan rasa aman
2. Peranan Sosial: Partisipasi warga, kohesi sosial, dan kelembagaan inklusif.
3. Keberdayaan Ekonomi: Kemampuan memproduksi, kepemilikan aset, dan daya tahan ekonomi rumah tangga

Tujuan dari penilaian Indeks Kesejahteraan Sosial adalah :

1. Sebagai upaya untuk melakukan pemantauan kondisi kesejahteraan masyarakat
2. Untuk mendukung proses perumusan kebijakan di bidang kesejahteraan sosial dengan berbasis data
3. Mendorong partisipasi stakeholder dalam upaya peningkatan kesejahteraan sosial

Indikator ini berbeda dengan indikator Badan Pusat Statistik (BPS) yang lebih umum, Ikesos dirancang khusus untuk mengukur hasil intervensi kebijakan perlindungan dan jaminan sosial. Indeks Kesejahteraan Sosial (IKESOS) merupakan Strategi yang dijalankan oleh Kementerian Sosial untuk memantau efektivitas program perlindungan dan pemberdayaan sosial di tingkat kabupaten/kota.

Berikut hasil perhitungan Indeks Kesejahteraan Sosial (IKESOS) tahun 2025:



Tabel 3.19
Indeks Kesejahteraan Sosial (Ikesos) Provinsi Kalimantan Tengah per Dimensi

PROVINSI KALIMANTAN TENGAH	IKESOS UMUM	IKESOS DISABILITAS	IKESOS LANSIA
Dimensi Kebutuhan Dasar (27%)	58,14	59,88	55,62
Dimensi Peranan Sosial (31%)	36,47	29,04	36,31
Dimensi Keberdayaan Ekonomi (42%)	55,66	60,95	56,53
NILAI IKESOS PROVINSI	50,38	50,02	50,77

Tabel 3.20
Indeks Kesejahteraan Sosial (Ikesos) Kabupaten Seruyan Tahun 2025

KABUPATEN	IKESOS UMUM	IKESOS DISABILITAS	IKESOS LANSIA
SERUYAN	53,49	55,10	53,94

Tabel 3.31
Kriteria Indeks Kesejahteraan Sosial (Ikesos)

RENTANG NILAI	KATEGORI
0,00 - 20,00	Tidak Sejahtera
20,01-40,00	Berkembang
40,01-60,00	Maju
60,01-80,00	Inklusif
80,01-100	Sejahtera

Pemerintah kabupaten Seruyan (melalui Dinas Sosial) telah menyediakan data primer maupun sekunder yang dibutuhkan dalam penghitungan Indeks Kesejahteraan Sosial, sumber data berasal dari 17 (tujuh belas) SKPD, Kepolisian dan BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan. Sebagian besar indikator Ikesos mencerminkan kondisi sosial masyarakat di tingkat Kabupaten. Dari tabel perhitungan yang dilakukan oleh Kementerian Sosial dapat disimpulkan bahwa kondisi kesejahteraan sosial masyarakat Seruyan dalam kategori **Maju** dalam pemenuhan kebutuhan dasar (pangan, papan, kesehatan, jaminan sosial, rasa aman dan *Physical Mobility*) dan keberdayaan ekonomi (partisipasi ekonomi). Hanya dalam dimensi Peranan Sosial (partisipasi, kohesi sosial dan kelembagaan inklusif) masih dalam tahap berkembang, dengan masih minimnya keterlibatan kelompok rentan (komuniktas anak, wanita, lansia



dan penyandang disabilitas) dalam peranan sosial di Kabupaten Seruyan.

Tindak lanjut hasil Indeks Kesejahteraan Sosial merupakan tanggungjawab kabupaten. Hasil pengukuran indeks seharusnya tidak berhenti sebagai informasi semata, tetapi menjadi dasar dalam merancang intervensi kebijakan, program, dan kegiatan yang sesuai dengan kondisi sosial masyarakat Kabupaten Seruyan.



BAB IV PENUTUP

4.1 KESIMPULAN

Hasil laporan kinerja Dinas Sosial Kabupaten Seruyan tahun 2025 dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Dari analisis sasaran dan indikator kinerja utama sebagai tolak ukur. Sampai dengan Tahun 2025 capaian realisasi kinerja Dinas Sosial pada tahun 2025 mencapai 97,04% dari target kinerja 100% termasuk dalam kategori **Sangat Baik** meskipun mungkin upaya yang dilakukan belum optimal. Dengan perhitungan Penanganan terhadap PPKS sebanyak 53.664 orang dari target PPKS yang terdata 55.302 orang.
2. Capaian kinerja pelayanan urusan administrasi penunjang terealisasi Nilai 60,70 dari target kinerja Nilai 58. Dengan perhitungan nilai 60,70 predikat "**Baik**". Dengan predikat SAKIP Baik terdapat gambaran bahwa Akuntabilitas Kinerja pada Dinas Sosial sudah baik pada 1/3 unit kerja, khususnya pada unit kerja utama., namun demikian masih perlu sedikit perbaikan pada unit kerja serta komitmen dalam manajemen kinerja.
3. Tujuan Dinas Sosial untuk Menurunkan Jumlah Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) masih Tujuan Dinas Sosial untuk Menurunkan Jumlah Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) (pelaksanaan tahun pertama) masih **belum tercapai**, hal ini dipengaruhi oleh banyak faktor dan perlu menjadi perhatian dalam penentuan kebijakan sebagai upaya tindak lanjut penyelesaian permasalahan di tahun 2026. Terdapat peningkatan jumlah PPKS dari tahun sebelumnya 2024 sebanyak 41.893 orang berbanding jumlah PPKS tahun 2025 sebanyak 53.664 orang, dengan kenaikan sebesar 28%. Hal ini dipengaruhi oleh banyak faktor dan perlu menjadi perhatian dalam penentuan kebijakan sebagai upaya tindak lanjut



penyelesaian permasalahan di tahun 2026. Faktor yang mempengaruhi keberhasilan / kegagalan antara lain :

a. Faktor Data :

1. Transisi perubahan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) menjadi Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) yang merupakan penggabungan dari beberapa data terkait kesejahteraan sosial, seperti Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), Regsosek, dan P3KE, mengakibatkan data yang dikelola Dinas Sosial meningkat dan perlu verifikasi dan validasi data kembali.
2. Pengelolaan Data : BNBA penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis belum akurat sehingga memerlukan assesment ulang atau Verifikasi dan Validasi (verivali) ulang. Karena banyak penerima layanan SPM bersifat insidental sehingga menyulitkan perhitungan kebutuhan dan pada akhirnya antara target dan realisasi terdapat perbedaan. Data belum sepenuhnya terintegrasi dalam DTSEN.
3. Masih ada beberapa Kluster 12 PAS yang belum tertangani yaitu kelompok korban NAPZA dan HIV/AIDS dan warga binaan (Napi/Napiter) karena data yang sensitif / rahasia, PPKS yang tidak mau di akses .

b. Faktor Sumber Daya (SDM Dan Sarpras) :

1. Minim SDM : Rasio SDM Kesejahteraan Sosial yang tidak sebanding dengan jumlah PPKS
2. Aplikasi : Belum terbentuk Sistem Pemutakhiran Data Mandiri dan aplikasi penyaluran bansos. (Mempelajari sistem update data yang melibatkan relawan dan perangkat desa walaupun Dinas sosial sdh ada operator SIKS NG desa/kelurahan)
3. Aplikasi : Digitalisasi Layanan Pengaduan untuk Pelayanan



SPM Sosial

4. Sarana : Belum tersedianya rumah singgah atau shelter sementara bagi PPKS sehingga terkadang kesulitan ketika mengevakuasi atau memberikan pelayanan bagi klien ppks disebabkan minimnya anggaran dalam Pembangunan rumah singgah, keterbatasan SDM professional, belum adanya Perda / Perbup yang mengatur pelayanan rumah singgah.
 5. Prasarana :Kondisi Kendaraan Operasional untuk penyaluran Bantuan Korban Bencana yang tidak maksimal Tenda pengungsi dalam kondisi kurang layak.
 6. Belum terbentuk Sistem Layanan Rujukan Terpadu (SLRT) Pusat Kesejahteraan Sosial (Puskesos)
 7. Bentuk adanya Tim Reaksi Cepat (TRC) pelayanan SPM di tingkat desa / kelurahan / kecamatan, sehingga semua permasalahan sosial langsung ke Dinas Sosial
 8. Belum ada Pembentukan Sekolah Rakyat
- c. Faktor Penganggaran : Anggaran untuk pelaksanaan program kegiatan dinas sosial terbatas
 - d. Faktor Kebijakan dan Regulasi : Inpres No. 4 Tahun 2025 tentang DTSEN, Inpres No. 8 Tahun 2025 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Pengentasan Kemiskinan Ekstrem, Permensos No. 3 tahun 2025 pemutakhiran dan penggunaan DTSEN untuk bansos, pemberdayaan sosial dan program penyelenggaraan kesejahteraan sosial; konsekuensi penggunaan DTSEN yaitu adanya Pemeringkatan (Desil), Penerima bansos berubah, kuota penerima bansos daerah berubah dan mitigasi resiko (protes)
 - e. Faktor Kolaborasi dan Sinergi : Belum semua PPKS bisa tertangani karena keterbatasan kuota.



4.2 REKOMENDASI PENINGKATAN KINERJA

Adapun rekomendasi langkah-langkah perbaikan ke depan sebagai berikut:

1. Pemutakhiran Data dan Manajemen Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN), yang dilaksanakan bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial,
Tindak Lanjut : Melakukan verifikasi dan validasi (verivali) DTSEN secara rutin dan berkala di tingkat desa/kelurahan, Ground Check (GC) langsung ke lapangan.
Aksi : Pembinaan dan monitoring intensif kepada operator SIKS-NG (Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation) agar data tetap *up-to-date* dan akurat.
2. Peningkatan Efektivitas Program Rehabilitasi, Program Perlindungan dan Jaminan Sosial dan Pemberdayaan Sosial, yang dilaksanakan oleh 3(tiga) bidang teknis,
Tindak Lanjut : Fokus pada peningkatan kualitas pelatihan vokasional bagi pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial (PPKS) agar mereka lebih mandiri, bukan hanya fokus pada bantuan konsumtif.
Aksi : Mengembangkan kemitraan dengan sektor swasta (CSR) dan lembaga sosial (LKS) untuk mendukung rehabilitasi sosial dasar bagi penyandang disabilitas, anak terlantar, lansia terlantar dan gepeng. Memaksimalkan upaya peningkatan kemampuan keluarga penerima manfaat melalui P2K2, fasilitasi penyaluran bansos dan assessment lanjutan KPM.
3. Perbaikan Kualitas Pelayanan dan Sarana Prasarana Dinas Sosial,
Tindak Lanjut: Meningkatkan respon cepat terhadap penanganan kasus sosial seperti Orang Terlantar (OT), PPKS bermasalah hukum, dan korban bencana sosial.
Aksi : Penyediaan sarana prasarana rumah singgah dan peningkatan kapasitas SDM Pekerja Sosial dalam pendampingan serta digitalisasi layanan kesejahteraan sosial.



4. Penguatan Tata Kelola SAKIP (Manajemen Kinerja) Dinas Sosial,
Tindak Lanjut: Memanfaatkan LKjIP sebagai bahan perbaikan perencanaan anggaran tahun berikutnya (*refocusing*) untuk memastikan anggaran hanya digunakan pada kegiatan yang berdampak besar (*high impact*).
Aksi : Memastikan indikator kinerja utama (IKU) sudah SMART (*Specific, Measurable, Achievable, Relevant, Time-bound*) dan selaras dengan Renstra (Rencana Strategis).
5. Penguatan Kolaborasi (*Crosscutting*)
Tindak Lanjut: Meningkatkan integrasi penanganan kemiskinan dengan OPD lain (Dinas Kesehatan untuk JKN, Dinas Pendidikan untuk Kartu Indonesia Pintar, dan Dinas UMKM untuk pemberdayaan). Pembinaan kerjasama dengan Balai / Panti Rehabilitasi / SRU / RSJ.
Aksi : Pembuatan Nota Kesepahaman (*Memorandum of Understanding/MoU*) dengan OPD lain, Balai / Panti Rehabilitasi / RSU / RSJ
6. Terkait dengan pengukuran Indeks Kesejahteraan Sosial (IKESOS), tindak lanjut hasil Indeks Kesejahteraan Sosial merupakan tanggungjawab kabupaten. Hasil pengukuran indeks seharusnya tidak berhenti sebagai informasi semata, tetapi menjadi dasar dalam merancang intervensi kebijakan, program, dan kegiatan yang sesuai dengan kondisi sosial masyarakat Kabupaten Seruyan. Tindak lanjut ini mencerminkan keberpihakan pemerintah daerah terhadap penguatan nilai-nilai sosial, kesetaraan, dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan.

Kuala Pembuang, 20 Februari 2025
Kepala Dinas Sosial,



HALIDAH, S.Pi
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 19731004 200604 2 017



LAMPIRAN



PEMERINTAH KABUPATEN SERUYAN
DINAS SOSIAL

Jalan Moh. Hatta Kuala Pembuang, Seruyan (74212)

Kalimantan Tengah

E-Mail : kabseruyandinsos@gmail.com. Website : dinsos.seruyankab.go.id

REKAPITULASI PENANGANAN PPKS
12 PEMERLU ATENSI SOSIAL (PAS)
JANUARI - DESEMBER 2025

Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disebut PSKS adalah perseorangan, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan, atau gangguan, tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya, sehingga memerlukan pelayanan sosial untuk memenuhi kebutuhan hidupnya baik jasmani dan rohani maupun sosial secara memadai dan wajar (permensos no 3 tahun 2025).

NO	PEMERLU ATENSI SOSIAL	TERDATA	TERTANGANI	BIDANG TEKNIS	
1	ANAK - ANAK RENTAN	1. Balita terlantar	0	0	Rehabilitas Sosial
		2. Anak terlantar	15	15	Rehabilitas Sosial
		3. Anak berhadapan dengan hukum (ABH)	17	17	Rehabilitas Sosial
		4. Anak difable,	44	44	Rehabilitas Sosial
		5. Anak korban tindak kekerasan,	13	13	Rehabilitas Sosial
		6. Anak jalanan,	0	0	Rehabilitas Sosial
		7. Anak yang memerlukan perlindungan khusus (AMPK)	23	23	Rehabilitas Sosial
		8. Anak Yatim Piatu (YAPI)	25	25	Rehabilitas Sosial
2	DIFABEL	9. Penyandang Disabilitas	320	156	Rehabilitas Sosial
3	LANSIA TERLANTAR	10. Lanjut Usia Terlantar / Miskin	1694	220	Rehabilitas Sosial
4	BERPENDAPATAN RENDAH	11. Gelandangan / OT	2	2	Rehabilitas Sosial
		12. Pengemis	1	1	Rehabilitas Sosial
		13. Pemulung	3	3	Rehabilitas Sosial
5	KORBAN BENCANA	14. Bencana Alam	1235	1235	Penanganan Bencana
		15. Bencana Sosial	156	156	Penanganan Bencana
6	AFIRMASIS KHUSUS	16. Kelompok Adat Terpencil (KAT)	tdk ada	tdk ada	Pemberdayaan Sosial
7	WARGA BINAAN / Bekas Warga Binaan Lembaga Pemasarakatan (BWBLP)	17. Narapidana (NAPI)	0	0	Rehabilitas Sosial
		18. Narapidana Teroris (NAPITER)	0	0	Rehabilitas Sosial
8	KORBAN KEKERASAN	19. Korban tindak kekerasan	0	0	Rehabilitas Sosial
		20. Korban trafficking	0	0	Rehabilitas Sosial
		21. Pekerja migran bermasalah sosial	2	2	Rehabilitas Sosial

9	KORBAN NAPZA DAN HIV/AIDS	22. Korban penyalahgunaan NAPZA	0	0	Rehabilitas Sosial
		23. Penderita HIV/AIDS	0	0	Rehabilitas Sosial
10	BERMASALAH SOSIAL	24. Kelompok minoritas	0	0	Rehabilitas Sosial
		25. Keluarga bermasalah sosial psikologis	3	3	Resos dan Dayasos
11	PEREMPUAN RENTAN	26. Perempuan yang rawan ekonomi (WRSE)	20	20	Rehabilitas Sosial
		27. Tuna Susila	0	0	Rehabilitas Sosial
12	FAKIR MISKIN	28. Fakir Miskin / rentan (penerima bansos)	51,729	51,729	Perlindungan dan Jaminan Sosial
JUMLAH			55,302	53,664	

link https://drive.google.com/drive/folders/1XpIEHEVT_w6YH7hYP5zxfDu_PArs7Pcs?usp=drive_link

PPKS yang tertangani Tahun n-1 (2024)	41,893
PPKS yang tertangani Tahun n (2025)	53,664
Persentase PPKS yang tertangani	97.04

PMKS YANG TERTANGANI TAHUN N-1
41,893

PMKS YANG TERTANGANI TAHUN N
53,664

PERSENTASE PMKS YANG DITANGANI
97.04 %

-11,771
41,893
-0.28
-28.10 tingkat kenaikan

capaian kinerja :
target
capaian

100%
97.04

Kuala Pembuang, 23 Januari 2026

Kepala Dinas Sosial,



Halidah, S.Pi
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 19731004 200604 2 017



LAPORAN HASIL EVALUASI SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP) TAHUN ANGGARAN 2025

DINAS SOSIAL



NOMOR 700.1.2.1/6.32/E-SAKIP/INSP/V/2025
TANGGAL 28 MEI 2025



PEMERINTAH KABUPATEN SERUYAN
INSPEKTORAT

Jl. JENDERAL AKHMAD YANI KUALA PEMBUANG (74212) KALIMANTAN TENGAH
Telepon (0538) 2707199 Email. inspektorat.sry@gmail.com
www.inspektorat.seruyankab.go.id

LAPORAN EVALUASI SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP)
DINAS SOSIAL
KABUPATEN SERUYAN
TAHUN ANGGARAN 2025

NOMOR : 700.1.2.1/6.32/E.SAKIP/V/2025

TANGGAL : 28 Mei 2025



PEMERINTAH KABUPATEN SERUYAN
INSPEKTORAT

Jl. JENDERAL AKHMAD YANI KUALA PEMBUANG | 74212 | KALIMANTAN TENGAH
Telepon (0538) 2707199 Email. inspektorat.srv@gmail.com
www.inspektorat.seruyankab.go.id

Kuala Pembuang, 28 Mei 2025

Nomor : 700.1.2.1/6.32/E.SAKIP/V/2025

Lampiran : 1 (Satu) lampiran

Perihal : Laporan Evaluasi Sistem
Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah (SAKIP)
Dinas Sosial
Kabupaten Seruyan
Tahun Anggaran 2025

Kepada:

Yth. Bupati Seruyan
u.p Kepala Dinas
Sosial
di-
Kuala Pembuang

1. Pendahuluan

a. Dasar Hukum Evaluasi

- 1) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
- 2) Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
- 3) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1569);
- 4) Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Seruyan (Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2016 Nomor 31 Seri D);

- 5) Peraturan Bupati Seruyan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, dan Uraian Tugas Inspektorat Kabupaten Seruyan (Berita Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2016 Nomor 37);
- 6) Peraturan Bupati Seruyan Nomor 2 Tahun 2024 tentang Pedoman Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Seruyan.

b. Latar Belakang Evaluasi

Pemerintah Kabupaten Seruyan pada tahun 2025 menargetkan predikat nilai SAKIP B dengan nilai 69,00. Target ini merupakan langkah Pemerintah Kabupaten Seruyan untuk menciptakan reformasi birokrasi yang baik dengan melakukan perbaikan terhadap perencanaan, pengukuran serta memiliki akuntabilitas kinerja yang baik. Pemerintah Kabupaten pada penilaian SAKIP tahun 2024 memperoleh predikat B dengan nilai 64,51. Berkenaan dengan hal tersebut, pada tahun 2025 berdasarkan hasil penilaian, ***Dinas Sosial memperoleh predikat "B" dengan nilai 60,70***. Dengan predikat SAKIP Baik (B) terdapat gambaran bahwa Akuntabilitas Kinerja pada Dinas Sosial sudah baik pada 1/3 unit kerja, khususnya pada unit kerja utama. Terlihat masih perlu adanya sedikit perbaikan pada unit kerja, serta komitmen dalam manajemen kinerja. Pengukuran kinerja baru dilaksanakan sampai dengan level eselon 2/unit kerja.

c. Tujuan Evaluasi

- 1) Memperoleh informasi tentang implementasi SAKIP;
- 2) Menilai tingkat implementasi SAKIP;
- 3) Menilai tingkat akuntabilitas kinerja;
- 4) Memberikan saran perbaikan untuk peningkatan implementasi SAKIP; dan
- 5) Memonitor tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi periode sebelumnya.

d. Ruang Lingkup Evaluasi

Ruang lingkup evaluasi SAKIP mencakup, antarlain:

- 1) Penilaian kualitas perencanaan kinerja yang selaras yang akan dicapai untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan;
- 2) Penilaian pengukuran kinerja berjenjang dan berkelanjutan yang telah menjadi kebutuhan dalam penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja;
- 3) Penilaian pelaporan kinerja yang menggambarkan kualitas atas pencapaian kinerja, baik keberhasilan/kegagalan kinerja serta upaya perbaikan/penyempurnaannya yang memberikan dampak besar dalam penyesuaian strategi/kebijakan dalam mencapai kinerja berikutnya;
- 4) Penilaian evaluasi akuntabilitas kinerja internal yang memberikan kesan nyata (dampak) dalam peningkatan implementasi SAKIP untuk efektifitas dan efisiensi kinerja; dan
- 5) Penilaian capaian kinerja atas output maupun outcome serta kinerja lainnya.

e. Metodologi Evaluasi

Penilaian dilakukan pada sub-komponen evaluasi AKIP, dan setiap sub-komponen dinilai berdasarkan pemenuhan kualitas dari kriteria. Sub-komponen akan dinilai dengan pilihan jawaban AA/A/BB/B/CC/C/D/E, jika kondisi atau gambaran criteria sesuai dengan gradasi nilai sebagai berikut:

AA (Bobot nilai 100)	Jika kualitas seluruh kriteria telah terpenuhi (100%) dan terdapat upaya inovatif serta layak menjadi percontohan secara nasional.
A (Bobot nilai 90)	Jika kualitas seluruh kriteria telah terpenuhi (100%) dan terdapat beberapa upaya yang bisa dihargai dari pemenuhan kriteria tersebut.
BB (Bobot nilai 80)	Jika kualitas seluruh kriteria telah terpenuhi (100%) sesuai dengan mandat kebijakan.
B (bobot nilai 70)	Jika kualitas sebagian besar kriteria telah terpenuhi (>75%-100%).

CC (Bobot nilai 60)	Jika kualitas sebagian besar kriteria telah terpenuhi (>50%-75%).
C (Bobot nilai 50)	Jika kualitas sebagian kecil kriteria telah terpenuhi (>25%-50%).
D (Bobot nilai 30)	Jika kriteria penilaian akuntabilitas kinerja telah mulai dipenuhi (>0%-25%).
E (Bobot nilai 0)	Jika sama sekali tidak ada upaya dalam pemenuhan kriteria penilaian akuntabilitas kinerja.

Setiap sub-komponen kriteria yang telah diberikan nilai dalam pemenuhan criteria harus dilengkapi dengan catatan berupa keterangan beserta bukti daftar dokumen yang mendukung dan relevan.

Nilai pada sub-komponen yang telah terisi akan terakumulasi sehingga diperoleh nilai total (hasil akhir) di setiap komponen.

Lembar Kerja Evaluasi (LKE) SAKIP Instansi adalah sebagaimana terlampir.

Nilai hasil akhir dari penjumlahan komponen-komponen memberikan gambaran tingkat SAKIP, dengan kategori predikat sebagai berikut:

Predikat	Interpretasi
AA (Nilai > 90-100)	Sangat Memuaskan , Telah terwujud Good Governance. Seluruh kinerja dikelola dengan sangat memuaskan diseluruh unit kerja. Telah terbentuk pemerintah yang dinamis, adaptif, dan efisien (Reform). Pengukuran kinerja telah dilakukan sampai kelevel individu.
A (Nilai >80-90)	Memuaskan , Terdapat gambaran bahwa instansi pemerintah/unit kerja dapat memimpin perubahan dalam mewujudkan pemerintahan berorientasi hasil, karena pengukuran kinerja telah dilakukan sampai kelevel eselon 4/pengawas/subkoordinator.
BB (Nilai >70-80)	Sangat Baik , Terdapat gambaran bahwa AKIP sangat baik pada 2/3 unit kerja, baik itu unit kerja utama, maupun unit kerja pendukung. Akuntabilitas yang sangat baik ditandai dengan mulai terwujudnya efisiensi penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja, memiliki sistem manajemen kinerja yang

	andal dan berbasis teknologi informasi, serta pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level eselon 3/coordinator.
B (Nilai >60-70)	Baik , Terdapat gambaran bahwa AKIP sudah baik pada 1/3 unit kerja, khususnya pada unit kerja utama. Terlihat masih perlu adanya sedikit perbaikan pada unit kerja, serta komitmen dalam manajemen kinerja. Pengukuran kinerja baru dilaksanakan sampai dengan level eselon 2/unit kerja.
CC (Nilai >50-60)	Cukup (Memadai) , Terdapat gambaran bahwa AKIP cukup baik. Namun demikian, masih perlu banyak perbaikan walaupun tidak mendasar khususnya akuntabilitas kinerja pada unit kerja.
C (Nilai >30-50)	Kurang , Sistem dan tatanan dalam AKIP kurang dapat diandalkan. Belum terimplementasi sistem manajemen kinerja sehingga masih perlu banyak perbaikan mendasar di level pusat.
D (Nilai >0-30)	Sangat Kurang , Sistem dan tatanan dalam AKIP sama sekali tidak dapat diandalkan. Sama sekali belum terdapat penerapan manajemen kinerja sehingga masih perlu banyak perbaikan/perubahan yang sifatnya sangat mendasar, khususnya dalam implementasi SAKIP.

f. Gambaran Umum Instansi Pemerintah/Unit Kerja

Sebagai gambaran umum Dinas Sosial Kabupaten Seruyan dalam penerapan SAKIP adalah sebagai berikut:

- 1) Nama Pimpinan : **ANGGA, SE**
- 2) Tugas dan fungsi Instansi :

Tugas dan fungsi Dinas Sosial adalah sebagai berikut:

- a) Dinas Sosial mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam menyelenggarakan urusan pemerintah dibidang sosial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b) Tugas Dinas Sosial adalah:
 - i. Pemberdayaan Sosial Komunitas Adat Terpencil (KAT);
 - ii. Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota;

- iii. Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota;
- iv. Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal;
- v. Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial;
- vi. Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial;
- vii. Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar;
- viii. Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota;
- ix. Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota;
- x. Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota;
- xi. Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota

3) Anggaran Tahun 2025 :-

g. Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Tahun Sebelumnya

Berdasarkan hasil penilaian Laporan Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Dinas Sosial Kabupaten Seruyan pada Tahun 2024 masih banyak ditemukan kekurangan dan catatan yang perlu diperbaiki. Rekomendasi-rekomendasi tersebut sebagian besar sudah ditindaklanjuti oleh Dinas Sosial, dibuktikan dengan adanya peningkatan nilai dari nilai tahun sebelumnya yaitu 58,30 cukup (memadai) menjadi 60,70 predikat (B) Baik pada penilaian Tahun 2025.

2. Gambaran Hasil Evaluasi

1) Evaluasi atas Perencanaan Kinerja

Evaluasi atas perencanaan kinerja pada Dinas Sosial Kabupaten Seruyan menggunakan bobot penilaian 30,00 dengan hasil Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Tahun 2025 memperoleh nilai 21,90.

Adapun sub komponen dan kriteria termasuk dalam perencanaan kinerja yang harus di evaluasi dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja sebagai berikut:

1.a. Dokumen Perencanaan kinerja telah tersedia

Evaluasi atas sub komponen dokumen perencanaan kinerja telah tersedia pada Dinas Sosial Kabupaten Seruyan menggunakan bobot penilaian 6,00.

Hasil evaluasi atas dokumen perencanaan kinerja telah tersedia dengan kriteria yang ditentukan memperoleh nilai 6, artinya dokumen perencanaan telah tersedia.

1.b. Dokumen Perencanaan kinerja telah memenuhi standar yang baik, yaitu untuk mencapai hasil, dengan ukuran kinerja yang SMART, menggunakan penyelarasan (cascading) disetiap level secara logis, serta memperhatikan kinerja bidang lain (crosscutting).

Evaluasi atas sub komponen dokumen perencanaan kinerja telah memenuhi standar yang baik, yaitu untuk mencapai hasil, dengan ukuran kinerja yang SMART, menggunakan penyelarasan (cascading) disetiap level secara logis, serta memperhatikan kinerja bidang lain (crosscutting) pada Dinas Sosial Kabupaten Seruyan menggunakan bobot penilaian 9,00.

Hasil evaluasi atas dokumen perencanaan kinerja secara kualitas memperoleh nilai 5,40. Berdasarkan hasil evaluasi diperoleh beberapa catatan sebagai berikut:

- 1) Dokumen perencanaan belum dipublikasikan seluruhnya;
- 2) Belum setiap bidang dan pegawai merumuskan dan menetapkan Perencanaan Kinerja. Bukti dukung yang dilampirkan hanya

memuat kegiatan perencanaan kinerja pada satu bidang dan tidak dihadiri seluruh pegawai;

- 3) Target yang ditetapkan dalam Perencanaan Kinerja belum *achievable*, menantang, dan realistis. Penetapan target IKU untuk Nilai SAKIP kurang spesifik karena target memakai predikat (tidak dilengkapi dengan nilai). Selain itu IKU Persentase PPKS dan Nilai SAKIP realisasinya tidak mencapai target tahun 2024.

1.c. Perencanaan Kinerja telah dimanfaatkan untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan.

Evaluasi atas sub komponen perencanaan kinerja pada Dinas Sosial Kabupaten Seruyan menggunakan bobot penilaian 15,00.

Hasil Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja atas Dokumen Perencanaan kinerja yang telah dimanfaatkan untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan memperoleh nilai 10,50, artinya bahwa sebagian besar kriteria telah terpenuhi (>50% - 75%). Berdasarkan hasil evaluasi diperoleh beberapa catatan sebagai berikut:

- 1) Target yang ditetapkan dalam Perencanaan Kinerja belum dapat dicapai dengan baik, Terdapat beberapa indikator kinerja yang realisasinya pada Tahun 2024 tidak mencapai target, terutama 2 sasaran utama;
- 2) Rencana aksi kinerja belum berjalan dinamis karena capaian kinerja belum dipantau secara berkala. Bukti dukung yang dilampirkan belum lengkap, belum melampirkan laporan monitoring rencana aksi pada setiap triwulan.

2) Evaluasi atas Pengukuran Kinerja

Evaluasi atas pengukuran kinerja pada Dinas Sosial Kabupaten Seruyan menggunakan bobot penilaian 30,00, dengan hasil evaluasi Tahun 2025 memperoleh nilai 20,10.

Adapun sub. komponen dan kriteria termasuk dalam Evaluasi atas Pengukuran Kinerja yang harus di evaluasi dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja sebagai berikut:

a. Pengukuran Kinerja telah dilakukan

Evaluasi atas sub komponen yaitu pengukuran kinerja yang telah dilakukan pada Dinas Sosial Kabupaten Seruyan menggunakan bobot penilaian 6,00.

Hasil evaluasi atas pengukuran kinerja memperoleh nilai 3,60, artinya sebagian besar kriteria telah terpenuhi (>50% - 75%). Dari hasil evaluasi, masih terdapat catatan pada sub komponen ini yaitu:

- 1) Tidak terdapat Definisi Operasional yang jelas atas kinerja dan cara mengukur indikator kinerja.

b. Pengukuran Kinerja telah menjadi kebutuhan dalam mewujudkan Kinerja secara Efektif dan Efisien dan telah dilakukan secara berjenjang dan berkelanjutan.

Evaluasi atas sub komponen pengukuran kinerja yang menjadi kebutuhan dalam mewujudkan kinerja secara efektif dan efisien dan telah dilakukan secara berjenjang dan berkelanjutan pada Dinas Sosial Kabupaten Seruyan menggunakan bobot penilaian 9,00.

Adapun hasil evaluasi pada 7 (tujuh) kriteria penilaian dengan memperoleh nilai 4,50. Berdasarkan hasil evaluasi, masih ditemukan beberapa catatan sebagai berikut:

- 1) Pengukuran kinerja belum dilakukan secara berkala. Belum melampirkan pengukuran kinerja pada setiap triwulannya;
- 3) Pengumpulan data kinerja belum menggunakan teknologi (Aplikasi). Aplikasi yang dimaksud ialah yang terkait dengan pengumpulan data kinerja di internal Dinas sebagai bahan penyusunan laporan kinerja;
- 4) Pengukuran capaian kinerja belum menggunakan teknologi (Aplikasi). Aplikasi yang dimaksud ialah yang terkait dengan pengukuran capaian kinerja di internal Dinas sebagai bahan penyusunan laporan kinerja.

c. Pengukuran Kinerja telah dijadikan dasar dalam pemberian Reward dan Punishment, serta penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja yang efektif dan efisien.

Evaluasi atas sub komponen pengukuran kinerja yang menjadi dasar dalam pemberian reward dan punishment, serta penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja yang efektif dan efisien pada Dinas Sosial Kabupaten Seruyan menggunakan bobot penilaian 15,00.

Adapun hasil evaluasi pada 10 (sepuluh) kriteria penilaian dilakukan dengan memperoleh nilai 12,00. Berdasarkan hasil evaluasi diperoleh beberapa catatan sebagai berikut:

- 1) Tidak setiap unit kerja/bidang memahami dan peduli atas hasil pengukuran kinerja, bukti dukung yang dilampirkan hanya memuat 1 bidang yang melaksanakan pengukuran kinerja (tidak seluruh bidang);
- 2) Tidak setiap pegawai memahami dan peduli atas hasil pengukuran kinerja, bukti dukung menunjukkan bahwa tidak seluruh pegawai hadir dan terlibat rapat pengukuran kinerja.

3) Evaluasi atas Pelaporan Kinerja

Evaluasi atas pelaporan kinerja pada Dinas Sosial Kabupaten Seruyan menggunakan bobot penilaian 15,00, dengan hasil evaluasi kinerja tahun 2025 memperoleh nilai 8,70.

Adapun sub komponen dan Kriteria evaluasi atas pelaporan kinerja sebagai berikut:

a. Terdapat Dokumen Laporan yang menggambarkan Kinerja.

Evaluasi atas sub komponen terdapatnya dokumen laporan yang menggambarkan kinerja pada Dinas Sosial Kabupaten Seruyan menggunakan bobot penilaian 3,00.

Adapun hasil evaluasi pada 6 (enam) kriteria penilaian diperoleh nilai 1,80. Berdasarkan hasil evaluasi diperoleh beberapa catatan sebagai berikut:

- 1) Dokumen Laporan Kinerja belum disusun secara berkala, dokumen/bukti dukung yang dilampirkan menunjukkan laporan monev hanya memuat laporan triwulan III, tidak terdapat laporan

triwulan I dan II yang dilampirkan. Seharusnya dapat melampirkan seluruh triwulan;

- 2) Penyampaian LKjIP tidak tepat waktu ke Pemerintah Daerah melalui Bagian Organisasi. Dokumen disampaikan pada bulan Maret, berdasarkan Permenpan 53 tahun 2014 LKjIP sudah disampaikan maksimal 2 bulan setelah tahun anggaran berakhir.

b. Dokumen laporan kinerja telah memenuhi Standar menggambarkan kualitas atas pencapaian kinerja, informasi keberhasilan/ kegagalan kinerja serta upaya perbaikan/ penyempurnaannya.

Evaluasi atas sub komponen dokumen laporan kinerja yang telah memenuhi standar dan menggambarkan kualitas atas pencapaian kinerja, informasi keberhasilan/kegagalan kinerja serta upaya perbaikan/penyempurnaannya pada Dinas Sosial Kabupaten Seruyan menggunakan bobot penilaian 4,50.

adapun hasil evaluasi pada 9 (sembilan) kriteria penilaian diperoleh nilai 3,15. Berdasarkan hasil evaluasi diperoleh catatan sebagai berikut:

- 1) Penyusunan laporan kinerja belum memenuhi standar, LKjIP belum menginformasikan efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja. Telah terdapat sub-bab mengenai efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja. Namun, sub-bab tersebut hanya memuat informasi jumlah pegawai dan tidak terdapat informasi mengenai efisiensi yang terjadi dengan penggunaan sumber daya yang dimiliki baik SDM, Sumber Daya Anggaran, Peralatan, dan sebagainya.

c. Pelaporan Kinerja telah memberikan dampak yang besar dalam penyesuaian strategi/kebijakan dalam mencapai kinerja berikutnya.

Evaluasi atas sub komponen pelaporan kinerja yang telah memberikan dampak yang besar dalam penyesuaian

strategi/kebijakan dalam mencapai kinerja berikutnya pada Dinas Sosial Kabupaten Seruyan menggunakan bobot penilaian 7,50.

Adapun hasil evaluasi pada 7 (tujuh) kriteria penilaian diperoleh nilai 3,75. Dari hasil evaluasi, masih ditemukan catatan pada sub komponen ini yaitu:

- 1) Informasi dalam laporan kinerja belum menjadi kepedulian seluruh pegawai. Bukti dukung menunjukkan bahwa rapat yang dilakukan tidak dihadiri oleh seluruh pegawai;
- 2) Laporan kinerja belum disusun secara berkala, sehingga tidak dapat digunakan untuk penyesuaian aktifitas dan penyesuaian anggaran untuk mencapai kinerja.

4) Evaluasi atas Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal

Evaluasi akuntabilitas kinerja internal pada Dinas Sosial Kabupaten Seruyan menggunakan bobot penilaian 25,00, dengan hasil evaluasi kinerja tahun 2025 memperoleh nilai 10,00.

Adapun sub komponen dan Kriteria atas evaluasi akuntabilitas kinerja internal sebagai berikut:

a. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan

Evaluasi atas sub komponen evaluasi akuntabilitas kinerja internal pada Dinas Sosial Kabupaten Seruyan menggunakan bobot penilaian 5,00.

Adapun hasil evaluasi pada 3 (tiga) kriteria penilaian diperoleh nilai 0,00. Berdasarkan hasil evaluasi diperoleh beberapa catatan sebagai berikut:

- 1) Pedoman teknis Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal dalam hal ini bukti dukung yang dilampirkan belum sesuai, pedoman yang diperlukan yaitu mengenai teknis Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal. SOP/Pedoman internal dapat mengacu pada Permenpan RB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Perbup Seruyan Nomor 2 Tahun 2024 tentang Pedoman Evaluasi AKIP di Lingkungan Pemerintah Kab. Seruyan;

- 2) Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal belum dilaksanakan pada seluruh unit/bidang. Pelaksanaan dan laporan hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal harus berpedoman pada Permenpan RB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- 3) Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal belum dilaksanakan secara berjenjang. Pelaksanaan dan laporan hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal harus berpedoman pada Permenpan RB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

b. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan secara berkualitas dengan Sumber Daya yang memadai

Evaluasi atas sub komponen evaluasi akuntabilitas kinerja internal yang telah dilaksanakan secara berkualitas dengan Sumber Daya yang memadai pada Dinas Sosial Kabupaten Seruyan menggunakan bobot penilaian 7,50.

adapun hasil evaluasi pada 5 (lima) kriteria penilaian memperoleh nilai 0,00. Berdasarkan hasil evaluasi, seluruh penyediaan dokumen pada komponen ini belum sesuai, sehingga berpengaruh pada hasil evaluasi sub komponen dibawahnya.

c. Implementasi SAKIP telah meningkat karena evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal sehingga memberikan kesan yang nyata (dampak) dalam efektifitas dan efisiensi Kinerja

Evaluasi atas sub komponen implementasi SAKIP yang telah meningkat karena evaluasi akuntabilitas kinerja internal sehingga memberikan kesan yang nyata (dampak) dalam efektifitas dan efisiensi kinerja pada Dinas Sosial Kabupaten Seruyan menggunakan bobot penilaian 12,50.

Adapun hasil evaluasi pada 5 (lima) kriteria penilaian memperoleh nilai 10,00. Dari hasil evaluasi, masih ditemukan catatan pada sub komponen ini yaitu:

- 1) Belum seluruh rekomendasi atas hasil evaluasi tahun sebelumnya ditindaklanjuti.

Berdasarkan catatan-catatan yang ditemukan dalam pelaksanaan evaluasi kinerja Dinas Sosial Kabupaten Seruyan, Inspektorat merekomendasikan kepada Kepala Dinas Sosial Kabupaten Seruyan agar menindaklanjuti catatan dimaksud yaitu:

1) Perencanaan Kinerja

- a) Mempublikasikan seluruh dokumen perencanaan;
- b) Melakukan reviu dokumen perencanaan, merumuskan kembali target IKU secara spesifik dan menganalisa penyebab tidak tercapainya perencanaan kinerja terutama pada sasaran utama;
- c) Melakukan monitoring terhadap rencana aksi secara berkala (triwulanan);
- c) Memastikan setiap unit/bidang merumuskan dan menetapkan Perencanaan Kinerja.

2) Pengukuran Kinerja

- a) Memformulasikan/merumuskan Definisi Operasional yang jelas untuk mengukur indikator kinerja dalam Dokumen IKU;
- b) Melakukan monitoring capaian kinerja secara berkala terhadap rencana aksi IKU dibuktikan dengan penyajiannya kedalam laporan monitoring capaian kinerja yang sekurang-kurangnya memuat informasi yang jelas, ulasan/penjelasan dan terdapat laporan setiap triwulannya;
- c) Membahas pengukuran kinerja pada bidang-bidang dengan melibatkan seluruh pegawai yang ada. Selain itu pastikan dokumen/bukti dukung yang dilampirkan telah sesuai, baik agenda rapat, dokumentasi rapat, dan semisalnya;
- d) Mendorong atau memaksimalkan teknologi atas pengumpulan dan pengukuran data kinerja berupa penggunaan aplikasi internal di lingkungan Dinas Sosial.

3) Pelaporan Kinerja

- a) Agar dalam penyusunan LKjIP dapat disusun secara berkala, melampirkan laporan kinerja seluruh triwulan;
- b) Agar dalam penyusunan LKjIP dapat melibatkan seluruh jenjang jabatan dan bidang, serta informasi pada LKjIP dapat disampaikan kepada seluruh pegawai;
- c) Menyampaikan LKjIP ke Pemerintah Daerah tepat waktu sesuai dengan Pemenpan RB Nomor 53 Tahun 2014 yaitu maksimal 2 bulan setelah tahun anggaran berakhir yang artinya pada akhir Februari dan pastikan bukti penyampaian telah ditandatangani;
- d) Menyusun LKjIP harus sesuai dengan standar pada Pemenpan RB Nomor 53 Tahun 2014;
- e) Memastikan dokumen laporan kinerja telah menginfokan efisiensi atas penggunaan sumber daya baik itu sumber daya manusia, anggaran maupun peralatan/perlengkapan dalam mencapai kinerja, sekurang-kurangnya terdapat ulasan atau analisis sehingga tidak hanya memuat informasi jumlah pegawai.

4) Evaluasi atas Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal

- a) Agar dapat menyusun Pedoman/SOP Evaluasi Akuntabilitas Kinerja internal. SOP/Pedoman internal dapat mengacu pada Permenpan RB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Perbup Seruyan Nomor 2 Tahun 2024 tentang Pedoman Evaluasi AKIP di Lingkungan Pemerintah Kab. Seruyan;
- b) Melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja internal pada seluruh unit/bidang;
- c) Meningkatkan kualitas SDM terkait SAKIP dengan cara diklat/bimtek/webinar;
- d) Mengoptimalkan penggunaan teknologi aplikasi dalam melakukan evaluasi AKIP internal;
- e) Menindaklanjuti seluruh rekomendasi terkait hasil penilaian evaluasi SAKIP.

3. Penutup

a. Simpulan

Hasil evaluasi atas capaian kinerja dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Tahun 2025 pada **Dinas Sosial memperoleh predikat "B" dengan nilai 60,70. Dengan predikat SAKIP Baik (B)** terdapat gambaran bahwa Akuntabilitas Kinerja pada Dinas Sosial sudah baik pada 1/3 unit kerja, khususnya pada unit kerja utama. Terlihat masih perlu adanya sedikit perbaikan pada unit kerja, serta komitmen dalam manajemen kinerja. Pengukuran kinerja baru dilaksanakan sampai dengan level eselon 2/unit kerja.

b. Dorongan terhadap implementasi SAKIP yang lebih baik.

Demikian disampaikan laporan ini, kami menghargai upaya seluruh jajaran dalam menerapkan manajemen kinerja di lingkungan Dinas Sosial Kabupaten Seruyan. Agar SAKIP di Dinas Sosial Kabupaten Seruyan dapat berjalan dengan baik, dalam penyusunannya dapat berkonsultasi atau berkoordinasi dengan Bappedalitbang, Bag, Organisasi Setda dan Inspektorat.

Atas perhatian dan kerjasama, diucapkan terima kasih.

INSPEKTUR DAERAH,

NOMO KOESWOYO, S.STP.,CGCAE
Pembina Utama Muda, (IV/c)
NIP. 19770325 199612 1 001



PEMERINTAHAN KAB. SERUYAN
DINAS SOSIAL
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2025
01 Januari 2025 Sampai 31 Desember 2025



Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN 2025	REALISASI 2025	% 2025	REALISASI 2024
1	2	3	4	5 = (4 / 3) * 100	6
5	BELANJA DAERAH	6.485.074.328,00	6.120.919.545,00	94,38	7.525.106.680,00
5.1	BELANJA OPERASI	6.375.890.528,00	6.011.870.545,00	94,29	7.421.777.180,00
5.1.01	Belanja Pegawai	3.656.400.247,00	3.517.951.426,00	96,21	3.539.404.445,00
5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	2.082.878.721,00	1.975.214.431,00	94,83	1.895.822.206,00
5.1.01.01.01	Belanja Gaji Pokok ASN	1.396.956.709,00	1.339.860.536,00	95,91	1.368.283.316,00
5.1.01.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS	1.283.489.209,00	1.241.895.736,00	96,76	1.368.283.316,00
5.1.01.01.01.0002	Belanja Gaji Pokok PPPK	113.467.500,00	97.964.800,00	86,34	0,00
5.1.01.01.02	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	133.564.801,00	129.565.936,00	97,01	129.998.474,00
5.1.01.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	129.367.426,00	125.980.560,00	97,38	129.998.474,00
5.1.01.01.02.0002	Belanja Tunjangan Keluarga PPPK	4.197.375,00	3.585.376,00	85,42	0,00
5.1.01.01.03	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	116.818.500,00	115.990.000,00	99,29	115.990.000,00
5.1.01.01.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	116.818.500,00	115.990.000,00	99,29	115.990.000,00
5.1.01.01.04	Belanja Tunjangan Fungsional ASN	46.683.178,00	40.090.000,00	85,88	62.020.000,00
5.1.01.01.04.0001	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	46.683.178,00	40.090.000,00	85,88	62.020.000,00
5.1.01.01.05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	28.774.500,00	27.640.000,00	96,06	20.720.000,00
5.1.01.01.05.0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	21.948.000,00	21.800.000,00	99,33	20.720.000,00
5.1.01.01.05.0002	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK	6.826.500,00	5.840.000,00	85,55	0,00
5.1.01.01.06	Belanja Tunjangan Beras ASN	77.590.450,00	73.578.706,00	94,83	76.765.200,00
5.1.01.01.06.0001	Belanja Tunjangan Beras PNS	72.239.950,00	68.943.826,00	95,44	76.765.200,00
5.1.01.01.06.0002	Belanja Tunjangan Beras PPPK	5.350.500,00	4.634.880,00	86,63	0,00
5.1.01.01.07	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	144.880.156,00	133.590.946,00	92,21	4.237.031,00
5.1.01.01.07.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	144.380.156,00	133.381.652,00	92,38	4.237.031,00
5.1.01.01.07.0002	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PPPK	500.000,00	209.294,00	41,86	0,00
5.1.01.01.08	Belanja Pembulatan Gaji ASN	67.540,00	18.062,00	26,74	18.276,00
5.1.01.01.08.0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS	16.290,00	16.030,00	98,40	18.276,00
5.1.01.01.08.0002	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	51.250,00	2.032,00	3,96	0,00
5.1.01.01.09	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN	125.839.056,00	103.742.400,00	82,44	106.523.283,00
5.1.01.01.09.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	115.372.978,00	96.966.955,00	84,05	106.523.283,00
5.1.01.01.09.0002	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK	10.466.078,00	6.775.445,00	64,74	0,00
5.1.01.01.10	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	2.926.220,00	2.784.451,00	95,16	2.816.676,00
5.1.01.01.10.0001	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	2.649.470,00	2.549.347,00	96,22	2.816.676,00
5.1.01.01.10.0002	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK	276.750,00	235.104,00	84,95	0,00
5.1.01.01.11	Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN	8.777.611,00	8.353.394,00	95,17	8.449.950,00
5.1.01.01.11.0001	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	7.947.361,00	7.648.050,00	96,23	8.449.950,00
5.1.01.01.11.0002	Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK	830.250,00	705.344,00	84,96	0,00
5.1.01.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	1.573.521.526,00	1.542.736.995,00	98,04	1.503.947.239,00
5.1.01.02.01	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	853.861.758,00	839.764.051,00	98,35	585.591.643,00
5.1.01.02.01.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	824.213.337,00	812.691.633,00	98,60	585.591.643,00
5.1.01.02.01.0002	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PPPK	29.648.421,00	27.072.418,00	91,31	0,00

Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN 2025	REALISASI 2025	% 2025	REALISASI 2024
5.1.01.02.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN	70.249.314,00	67.808.817,00	96,53	0,00
5.1.01.02.03.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS	70.249.314,00	67.808.817,00	96,53	0,00
5.1.01.02.05	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN	611.747.954,00	597.714.127,00	97,71	918.355.596,00
5.1.01.02.05.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS	589.511.643,00	577.830.319,00	98,02	918.355.596,00
5.1.01.02.05.0002	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PPPK	22.236.311,00	19.883.808,00	89,42	0,00
5.1.01.02.06	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	37.662.500,00	37.450.000,00	99,44	0,00
5.1.01.02.06.0068	Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Menghasilkan Pendapatan	37.662.500,00	37.450.000,00	99,44	0,00
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	0,00	0,00	0,00	139.635.000,00
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	0,00	0,00	0,00	117.135.000,00
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	0,00	0,00	0,00	117.135.000,00
5.1.01.03.08	Belanja Jasa Pengelolaan BMD	0,00	0,00	0,00	22.500.000,00
5.1.01.03.08.0001	Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Menghasilkan Pendapatan	0,00	0,00	0,00	22.500.000,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.344.690.281,00	2.269.119.119,00	96,78	3.806.834.985,00
5.1.02.01	Belanja Barang	663.083.050,00	648.735.200,00	97,84	1.005.710.000,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	663.083.050,00	648.735.200,00	97,84	1.005.710.000,00
5.1.02.01.01.0001	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	10.650.000,00	10.650.000,00	100,00	5.456.950,00
5.1.02.01.01.0002	Belanja Bahan-Bahan Kimia	9.991.000,00	9.955.000,00	99,64	9.004.000,00
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	45.584.600,00	45.558.000,00	99,94	132.867.500,00
5.1.02.01.01.0010	Belanja Bahan-Isi Tabung Gas	1.440.000,00	1.430.000,00	99,31	1.920.000,00
5.1.02.01.01.0012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	14.128.600,00	13.703.000,00	96,99	2.963.250,00
5.1.02.01.01.0019	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Pertanian	0,00	0,00	0,00	810.000,00
5.1.02.01.01.0022	Belanja Suku Cadang-Persediaan dari Belanja Bantuan Sosial	3.696.500,00	3.696.500,00	100,00	18.105.000,00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	31.970.050,00	30.648.200,00	95,87	36.711.700,00
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	53.860.000,00	53.835.000,00	99,95	50.260.050,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	135.797.000,00	129.761.500,00	95,56	148.986.500,00
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	19.943.000,00	19.910.000,00	99,83	22.541.000,00
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	0,00	0,00	0,00	6.963.000,00
5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	17.500.000,00	17.405.000,00	99,46	1.840.400,00
5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	14.176.400,00	13.605.000,00	95,97	23.288.350,00
5.1.02.01.01.0032	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas	5.100.000,00	5.080.000,00	99,61	21.595.000,00
5.1.02.01.01.0035	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata	400.000,00	400.000,00	100,00	273.500,00
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	10.587.600,00	10.310.000,00	97,38	14.542.550,00
5.1.02.01.01.0039	Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	70.890.300,00	70.806.000,00	99,88	0,00
5.1.02.01.01.0043	Belanja Natura dan Pakan-Natura	60.070.000,00	60.027.000,00	99,93	176.614.450,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	18.318.000,00	18.285.000,00	99,82	51.693.250,00
5.1.02.01.01.0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	20.897.000,00	20.885.000,00	99,94	29.682.550,00
5.1.02.01.01.0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	76.308.000,00	73.485.000,00	96,30	90.787.100,00
5.1.02.01.01.0061	Belanja Pakaian Sipil Harian (PSH)	0,00	0,00	0,00	18.448.800,00
5.1.02.01.01.0063	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	0,00	0,00	0,00	42.170.100,00
5.1.02.01.01.0064	Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	0,00	0,00	0,00	24.000.000,00
5.1.02.01.01.0076	Belanja Pakaian Olahraga	41.775.000,00	39.300.000,00	94,08	74.185.000,00
5.1.02.02	Belanja Jasa	726.634.231,00	697.211.890,00	95,95	718.530.864,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	716.099.945,00	689.500.400,00	96,29	671.429.624,00
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	36.850.000,00	32.750.000,00	88,87	17.400.000,00
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	0,00	0,00	0,00	24.000.000,00

Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN 2025	REALISASI 2025	% 2025	REALISASI 2024
5.1.02.02.01.0008	Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi dan Pengelola Website	15.600.000,00	14.200.000,00	91,03	5.600.000,00
5.1.02.02.01.0016	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum	5.500.000,00	5.400.000,00	98,18	8.300.000,00
5.1.02.02.01.0017	Belanja Jasa Tenaga Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat	0,00	0,00	0,00	2.300.000,00
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	233.500.000,00	229.250.000,00	98,18	277.100.000,00
5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	92.400.000,00	92.400.000,00	100,00	92.400.000,00
5.1.02.02.01.0031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	94.800.000,00	94.800.000,00	100,00	94.800.000,00
5.1.02.02.01.0033	Belanja Jasa Tenaga Supir	60.700.000,00	60.700.000,00	100,00	55.200.000,00
5.1.02.02.01.0047	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	0,00	0,00	0,00	7.950.000,00
5.1.02.02.01.0060	Belanja Tagihan Air	5.009.958,00	4.048.500,00	80,81	4.040.240,00
5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik	49.800.000,00	49.542.200,00	99,48	57.535.634,00
5.1.02.02.01.0062	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	0,00	0,00	0,00	10.560.000,00
5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	13.560.000,00	9.115.200,00	67,22	9.054.150,00
5.1.02.02.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	19.500.000,00	8.417.500,00	43,17	5.189.600,00
5.1.02.02.01.0080	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	88.879.987,00	88.877.000,00	100,00	0,00
5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	3.384.286,00	2.561.490,00	75,69	2.811.240,00
5.1.02.02.02.0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	1.670.716,00	1.138.440,00	68,14	1.249.440,00
5.1.02.02.02.0007	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	1.713.570,00	1.423.050,00	83,05	1.561.800,00
5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	3.950.000,00	1.950.000,00	49,37	2.320.000,00
5.1.02.02.04.0117	Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya	750.000,00	750.000,00	100,00	0,00
5.1.02.02.04.0118	Belanja Sewa Mebel	0,00	0,00	0,00	320.000,00
5.1.02.02.04.0122	Belanja Sewa Alat Dapur	200.000,00	200.000,00	100,00	0,00
5.1.02.02.04.0123	Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	3.000.000,00	1.000.000,00	33,33	2.000.000,00
5.1.02.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	3.200.000,00	3.200.000,00	100,00	3.200.000,00
5.1.02.02.05.0009	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	3.200.000,00	3.200.000,00	100,00	3.200.000,00
5.1.02.02.12	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	0,00	0,00	0,00	38.770.000,00
5.1.02.02.12.0001	Belanja Kursus Singkat/Pelatihan	0,00	0,00	0,00	38.770.000,00
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan	119.340.000,00	118.219.600,00	99,06	328.146.250,00
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	119.340.000,00	118.219.600,00	99,06	171.046.250,00
5.1.02.03.02.0035	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	44.280.000,00	44.280.000,00	100,00	38.979.100,00
5.1.02.03.02.0037	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	43.600.000,00	43.600.000,00	100,00	65.320.150,00
5.1.02.03.02.0038	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua	10.940.000,00	10.940.000,00	100,00	24.850.000,00
5.1.02.03.02.0117	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	7.900.000,00	7.835.000,00	99,18	300.000,00
5.1.02.03.02.0120	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pembersih	1.050.000,00	285.600,00	27,20	700.000,00
5.1.02.03.02.0121	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	4.270.000,00	4.044.000,00	94,71	9.292.000,00
5.1.02.03.02.0405	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	7.300.000,00	7.235.000,00	99,11	21.465.000,00
5.1.02.03.02.0409	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer	0,00	0,00	0,00	10.140.000,00
5.1.02.03.03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	0,00	0,00	0,00	157.100.000,00
5.1.02.03.03.0001	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	0,00	0,00	0,00	157.100.000,00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	832.633.000,00	804.952.429,00	96,68	1.754.447.871,00
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	832.633.000,00	804.952.429,00	96,68	1.754.447.871,00

Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN 2025	REALISASI 2025	% 2025	REALISASI 2024
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	394.764.000,00	386.091.729,00	97,80	924.830.294,00
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	437.869.000,00	418.860.700,00	95,66	829.617.577,00
5.1.02.05	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00
5.1.02.05.02	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00
5.1.02.05.02.0001	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00
5.1.05	Belanja Hibah	300.000.000,00	150.000.000,00	50,00	23.365.250,00
5.1.05.05	Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	300.000.000,00	150.000.000,00	50,00	23.365.250,00
5.1.05.05.01	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	300.000.000,00	150.000.000,00	50,00	23.365.250,00
5.1.05.05.01.0001	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	300.000.000,00	150.000.000,00	50,00	23.365.250,00
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	74.800.000,00	74.800.000,00	100,00	52.172.500,00
5.1.06.01	Belanja Bantuan Sosial kepada Individu	74.800.000,00	74.800.000,00	100,00	52.172.500,00
5.1.06.01.01	Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Individu	30.000.000,00	30.000.000,00	100,00	0,00
5.1.06.01.01.0001	Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Individu	30.000.000,00	30.000.000,00	100,00	0,00
5.1.06.01.02	Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Individu	44.800.000,00	44.800.000,00	100,00	52.172.500,00
5.1.06.01.02.0001	Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Individu	44.800.000,00	44.800.000,00	100,00	52.172.500,00
	JUMLAH BELANJA OPERASI	6.375.890.528,00	6.011.870.545,00	94,29	7.421.777.180,00
5.2	BELANJA MODAL	109.183.800,00	109.049.000,00	99,88	103.329.500,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	109.183.800,00	109.049.000,00	99,88	103.329.500,00
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	27.472.800,00	27.471.000,00	99,99	27.999.500,00
5.2.02.05.02	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	14.512.800,00	14.511.000,00	99,99	27.999.500,00
5.2.02.05.02.0004	Belanja Modal Alat Pendingin	14.512.800,00	14.511.000,00	99,99	27.999.500,00
5.2.02.05.03	Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	12.960.000,00	12.960.000,00	100,00	0,00
5.2.02.05.03.0003	Belanja Modal Kursi Kerja Pejabat	12.960.000,00	12.960.000,00	100,00	0,00
5.2.02.07	Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan	0,00	0,00	0,00	4.930.000,00
5.2.02.07.02	Belanja Modal Alat Kesehatan Umum	0,00	0,00	0,00	4.930.000,00
5.2.02.07.02.0005	Belanja Modal Alat Kesehatan Umum Lainnya	0,00	0,00	0,00	4.930.000,00
5.2.02.10	Belanja Modal Komputer	81.711.000,00	81.578.000,00	99,84	70.400.000,00
5.2.02.10.01	Belanja Modal Komputer Unit	71.783.000,00	71.650.000,00	99,81	70.400.000,00
5.2.02.10.01.0002	Belanja Modal Personal Computer	71.783.000,00	71.650.000,00	99,81	70.400.000,00
5.2.02.10.02	Belanja Modal Peralatan Komputer	9.928.000,00	9.928.000,00	100,00	0,00
5.2.02.10.02.0005	Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya	9.928.000,00	9.928.000,00	100,00	0,00
	JUMLAH BELANJA MODAL	109.183.800,00	109.049.000,00	99,88	103.329.500,00
	JUMLAH BELANJA	6.485.074.328,00	6.120.919.545,00	94,38	7.525.106.680,00
	SURPLUS/DEFISIT	(6.485.074.328,00)	(6.120.919.545,00)	94,38	(7.525.106.680,00)

Kab. Seruyan, 21 Januari 2026
KEPALA DINAS SOSIAL



HALIDAH, S.PI

NIP.197310042006042017

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN SKPD
(SPJ FUNGSIONAL)
Bulan : Desember

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	SPJ - LS Gaji			SPJ - LS Barang & Jasa			SPJ - UP/GU/TU			Jumlah SPJ (LS + UP/GU/TU) s.d Bulan Ini	Sisa Pagu Anggaran
			s.d. Bulan Lalu	Bulan Ini	s.d. Bulan Ini	s.d. Bulan Lalu	Bulan Ini	s.d. Bulan Ini	s.d. Bulan Lalu	Bulan Ini	s.d. Bulan Ini		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13 = (4+9+11)	14 = (3-13)
5	BELANJA DAERAH	Rp6.485.074.328,00	Rp3.034.823.232,00	Rp483.128.194,00	Rp3.517.951.426,00	Rp1.250.362.519,00	Rp739.375.600,00	Rp1.989.738.119,00	Rp473.328.150,00	Rp139.901.850,00	Rp613.230.000,00	Rp6.120.919.545,00	Rp364.154.783,00
5.01	BELANJA DAERAH	Rp6.375.890.528,00	Rp3.034.823.232,00	Rp483.128.194,00	Rp3.517.951.426,00	Rp1.235.012.519,00	Rp645.676.600,00	Rp1.880.689.119,00	Rp473.328.150,00	Rp139.901.850,00	Rp613.230.000,00	Rp6.011.870.545,00	Rp364.094.983,00
5.01.01	Belanja Pegawai	Rp3.656.400.247,00	Rp3.034.823.232,00	Rp483.128.194,00	Rp3.517.951.426,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp3.517.951.426,00	Rp138.448.821,00
5.01.02	Belanja Barang dan Jasa	Rp2.344.690.281,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.040.212.519,00	Rp615.676.600,00	Rp1.655.889.119,00	Rp473.328.150,00	Rp139.901.850,00	Rp613.230.000,00	Rp2.269.119.119,00	Rp75.771.162,00
5.01.05	Belanja Hibah	Rp300.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp150.000.000,00	Rp0,00	Rp150.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp150.000.000,00	Rp0,00
5.01.06	Belanja Bantuan Sosial	Rp74.800.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp4.800.000,00	Rp30.000.000,00	Rp4.800.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp4.800.000,00	Rp0,00
5.02	BELANJA MODAL	Rp109.183.800,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp15.350.000,00	Rp93.699.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp109.049.000,00	Rp134.800,00
5.02.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Rp109.183.800,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp15.350.000,00	Rp93.699.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp109.049.000,00	Rp134.800,00
DINAS SOSIAL		Rp6.485.074.328,00	Rp3.034.823.232,00	Rp483.128.194,00	Rp3.517.951.426,00	Rp1.250.362.519,00	Rp739.375.600,00	Rp1.989.738.119,00	Rp473.328.150,00	Rp139.901.850,00	Rp613.230.000,00	Rp6.120.919.545,00	Rp364.154.783,00
1.06.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rp5.187.444.928,00	Rp3.034.823.232,00	Rp483.128.194,00	Rp3.517.951.426,00	Rp707.010.200,00	Rp349.839.200,00	Rp1.056.849.400,00	Rp380.254.450,00	Rp66.295.450,00	Rp446.549.900,00	Rp5.021.530.726,00	Rp166.094.202,00
1.06.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp3.656.400.247,00	Rp3.034.823.232,00	Rp483.128.194,00	Rp3.517.951.426,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp3.517.951.426,00	Rp138.448.821,00
1.06.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Rp3.656.400.247,00	Rp3.034.823.232,00	Rp483.128.194,00	Rp3.517.951.426,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp3.517.951.426,00	Rp138.448.821,00
5.01	BELANJA OPERASI	Rp3.656.400.247,00	Rp3.034.823.232,00	Rp483.128.194,00	Rp3.517.951.426,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp3.517.951.426,00	Rp138.448.821,00
5.01.01	Belanja Pegawai	Rp3.656.400.247,00	Rp3.034.823.232,00	Rp483.128.194,00	Rp3.517.951.426,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp3.517.951.426,00	Rp138.448.821,00
5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	Rp2.082.878.721,00	Rp1.719.937.085,00	Rp255.277.346,00	Rp1.975.214.431,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.975.214.431,00	Rp107.664.290,00
5.1.01.01.01	Belanja Gaji Pokok ASN	Rp1.396.956.709,00	Rp1.155.743.816,00	Rp184.116.720,00	Rp1.339.860.536,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.339.860.536,00	Rp57.096.173,00
5.1.01.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS	Rp1.283.489.209,00	Rp1.155.743.816,00	Rp86.151.920,00	Rp1.241.895.736,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.241.895.736,00	Rp41.593.473,00
5.1.01.01.01.0002	Belanja Gaji Pokok PPPK	Rp113.467.500,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp97.964.800,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp97.964.800,00	Rp15.502.700,00
5.1.01.01.02	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	Rp133.564.801,00	Rp0,00	Rp117.304.090,00	Rp12.261.840,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp12.261.840,00	Rp3.998.866,00
5.1.01.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	Rp129.367.426,00	Rp0,00	Rp117.304.090,00	Rp8.676.470,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp8.676.470,00	Rp3.286.866,00
5.1.01.01.02.0002	Belanja Tunjangan Keluarga PPPK	Rp4.197.375,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp3.585.370,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp3.585.370,00	Rp1.119.999,00
5.1.01.01.03	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	Rp116.818.500,00	Rp107.705.000,00	Rp8.285.000,00	Rp115.990.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp115.990.000,00	Rp28.500,00
5.1.01.01.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	Rp116.818.500,00	Rp107.705.000,00	Rp8.285.000,00	Rp115.990.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp115.990.000,00	Rp28.500,00
5.1.01.01.04	Belanja Tunjangan Fungsional ASN	Rp46.683.178,00	Rp37.670.000,00	Rp2.420.000,00	Rp40.090.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp40.090.000,00	Rp6.593.178,00
5.1.01.01.04.0001	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	Rp46.683.178,00	Rp37.670.000,00	Rp2.420.000,00	Rp40.090.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp40.090.000,00	Rp6.593.178,00
5.1.01.01.04.0002	Belanja Tunjangan Fungsional PPPK	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00
5.1.01.01.05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	Rp28.774.500,00	Rp20.140.000,00	Rp7.500.000,00	Rp27.640.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp27.640.000,00	Rp1.134.500,00
5.1.01.01.05.0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	Rp21.948.000,00	Rp20.140.000,00	Rp1.600.000,00	Rp20.748.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp20.748.000,00	Rp1.140.000,00
5.1.01.01.05.0002	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK	Rp6.826.500,00	Rp0,00	Rp5.900.000,00	Rp6.900.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp6.900.000,00	Rp0,00
5.1.01.01.06	Belanja Tunjangan Beras ASN	Rp77.590.450,00	Rp64.236.526,00	Rp9.342.180,00	Rp73.578.706,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp73.578.706,00	Rp4.011.744,00
5.1.01.01.06.0001	Belanja Tunjangan Beras PNS	Rp72.239.950,00	Rp64.236.526,00	Rp4.707.300,00	Rp68.943.826,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp68.943.826,00	Rp3.296.124,00
5.1.01.01.06.0002	Belanja Tunjangan Beras PPPK	Rp5.350.500,00	Rp0,00	Rp4.634.880,00	Rp4.634.880,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp4.634.880,00	Rp1.715.620,00
5.1.01.01.07	Belanja Tunjangan PPH/Tunjangan Khusus ASN	Rp144.880.156,00	Rp120.565.151,00	Rp13.025.795,00	Rp133.590.946,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp133.590.946,00	Rp11.289.210,00
5.1.01.01.07.0001	Belanja Tunjangan PPH/Tunjangan Khusus PNS	Rp144.880.156,00	Rp120.565.151,00	Rp13.025.795,00	Rp133.590.946,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp133.590.946,00	Rp11.289.210,00
5.1.01.01.07.0002	Belanja Tunjangan PPH/Tunjangan Khusus PPPK	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00
5.1.01.01.08	Belanja Pembulatan Gaji ASN	Rp67.540,00	Rp14.915,00	Rp3.147,00	Rp18.062,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp18.062,00	Rp49.478,00
5.1.01.01.08.0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS	Rp16.290,00	Rp14.915,00	Rp1.115,00	Rp16.030,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp16.030,00	Rp260,00
5.1.01.01.08.0002	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	Rp51.250,00	Rp0,00	Rp2.032,00	Rp2.032,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp2.032,00	Rp49.418,00
5.1.01.01.09	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN	Rp125.839.056,00	Rp87.187.251,00	Rp16.555.149,00	Rp103.742.400,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp103.742.400,00	Rp22.096.656,00
5.1.01.01.09.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	Rp115.372.978,00	Rp85.438.014,00	Rp11.528.941,00	Rp96.966.955,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp96.966.955,00	Rp18.406.023,00
5.1.01.01.09.0002	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK	Rp10.466.078,00	Rp1.749.237,00	Rp5.026.208,00	Rp6.775.445,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp6.775.445,00	Rp3.690.633,00
5.1.01.01.10	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	Rp2.926.220,00	Rp2.342.582,00	Rp441.869,00	Rp2.784.451,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp2.784.451,00	Rp141.769,00
5.1.01.01.10.0001	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	Rp2.649.470,00	Rp2.342.582,00	Rp406.162,00	Rp2.549.347,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp2.549.347,00	Rp100.133,00
5.1.01.01.10.0002	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK	Rp276.750,00	Rp0,00	Rp235.104,00	Rp235.104,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp235.104,00	Rp41.646,00
5.1.01.01.11	Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN	Rp8.777.611,00	Rp7.027.754,00	Rp1.325.640,00	Rp8.353.394,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp8.353.394,00	Rp424.217,00
5.1.01.01.11.0001	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	Rp7.947.361,00	Rp7.027.754,00	Rp1.290.296,00	Rp7.648.050,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp7.648.050,00	Rp299.311,00
5.1.01.01.11.0002	Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK	Rp830.250,00	Rp0,00	Rp705.344,00	Rp705.344,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp705.344,00	Rp124.906,00
5.1.01.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	Rp1.573.521.526,00	Rp1.314.886.147,00	Rp227.850.848,00	Rp1.542.736.995,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.542.736.995,00	Rp30.784.531,00
5.1.01.02.01	Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja ASN	Rp853.861.758,00	Rp719.239.111,00	Rp120.534.940,00	Rp839.764.051,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp839.764.051,00	Rp14.097.707,00
5.1.01.02.01.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja PNS	Rp849.470,00	Rp797.972.184,00	Rp114.719,00	Rp812.691.183,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp812.691.183,00	Rp11.521.794,00
5.1.01.02.01.0002	Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja PPPK	Rp29.648.421,00	Rp0,00	Rp235.104,00	Rp235.104,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp235.104,00	Rp41.646,00
5.1.01.02.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan kondisi kerja ASN	Rp70.249.314,00	Rp58.623.740,00	Rp9.185.077,00	Rp67.808.817,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp67.808.817,00	Rp2.440.497,00
5.1.01.02.03.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan kondisi kerja PNS	Rp70.249.314,00	Rp58.623.740,00	Rp9.185.077,00	Rp67.808.817,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00					

5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	Rp14.176.400,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp4.495.000,00	Rp4.495.000,00	Rp9.110.000,00	Rp0,00	Rp9.110.000,00	Rp13.605.000,00	Rp571.400,00
1.06.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp218.321.750,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp15.350.000,00	Rp107.659.000,00	Rp123.009.000,00	Rp94.657.500,00	Rp0,00	Rp94.657.500,00	Rp217.666.500,00	Rp655.250,00
5.01	BELANJA OPERASI	Rp109.137.950,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp13.960.000,00	Rp13.960.000,00	Rp94.657.500,00	Rp0,00	Rp94.657.500,00	Rp108.617.500,00	Rp520.450,00
5.01.02	Belanja Barang dan Jasa	Rp109.137.950,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp13.960.000,00	Rp13.960.000,00	Rp94.657.500,00	Rp0,00	Rp94.657.500,00	Rp108.617.500,00	Rp520.450,00
5.1.02.01	Belanja Barang	Rp109.137.950,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp13.960.000,00	Rp13.960.000,00	Rp94.657.500,00	Rp0,00	Rp94.657.500,00	Rp108.617.500,00	Rp520.450,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	Rp109.137.950,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp13.960.000,00	Rp13.960.000,00	Rp94.657.500,00	Rp0,00	Rp94.657.500,00	Rp108.617.500,00	Rp520.450,00
5.1.02.01.01.0012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	Rp1.035.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.020.000,00	Rp0,00	Rp1.020.000,00	Rp1.020.000,00	Rp13.000,00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	Rp18.367.350,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp18.367.350,00	Rp0,00	Rp18.367.350,00	Rp18.367.350,00	Rp184.850,00
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	Rp52.910.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp52.910.000,00	Rp0,00	Rp52.910.000,00	Rp52.910.000,00	Rp25.000,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	Rp25.460.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp4.975.000,00	Rp4.975.000,00	Rp20.475.000,00	Rp0,00	Rp20.475.000,00	Rp25.460.000,00	Rp10.000,00
5.1.02.01.01.0032	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas	Rp5.100.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp3.385.000,00	Rp3.385.000,00	Rp1.695.000,00	Rp0,00	Rp1.695.000,00	Rp5.080.000,00	Rp20.000,00
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	Rp6.267.600,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp6.267.600,00	Rp0,00	Rp6.267.600,00	Rp6.267.600,00	Rp60.000,00
5.02	BELANJA MODAL	Rp109.183.800,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp15.350.000,00	Rp3.699.000,00	Rp109.049.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp109.049.000,00	Rp134.800,00
5.02.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Rp109.183.800,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp15.350.000,00	Rp3.699.000,00	Rp109.049.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp109.049.000,00	Rp134.800,00
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	Rp27.472.800,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp27.472.800,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp27.472.800,00	Rp1.800,00
5.2.02.05.02	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	Rp14.512.800,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp14.512.800,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp14.512.800,00	Rp1.800,00
5.2.02.05.02.0004	Belanja Modal Alat Pendingin	Rp14.512.800,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp14.511.000,00	Rp14.511.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp14.511.000,00	Rp1.800,00
5.2.02.05.03	Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	Rp12.960.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp12.960.000,00	Rp12.960.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp12.960.000,00	Rp0,00
5.2.02.05.03.0003	Belanja Modal Kursi Kerja Pejabat	Rp12.960.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp12.960.000,00	Rp12.960.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp12.960.000,00	Rp0,00
5.2.02.10	Belanja Modal Komputer	Rp81.710.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp15.350.000,00	Rp6.228.000,00	Rp81.578.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp81.578.000,00	Rp133.000,00
5.2.02.10.01	Belanja Modal Komputer Unit	Rp71.783.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp15.350.000,00	Rp6.300.000,00	Rp71.650.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp71.650.000,00	Rp133.000,00
5.2.02.10.01.0002	Belanja Modal Personal Computer	Rp71.783.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp15.350.000,00	Rp6.300.000,00	Rp71.650.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp71.650.000,00	Rp133.000,00
5.2.02.10.02	Belanja Modal Peralatan Komputer	Rp9.928.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp9.928.000,00	Rp9.928.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp9.928.000,00	Rp0,00
5.2.02.10.02.0005	Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya	Rp9.928.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp9.928.000,00	Rp9.928.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp9.928.000,00	Rp0,00
1.06.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Rp20.716.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp4.375.000,00	Rp4.375.000,00	Rp15.517.000,00	Rp666.000,00	Rp16.173.000,00	Rp20.548.000,00	Rp168.000,00
5.01	BELANJA OPERASI	Rp20.716.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp4.375.000,00	Rp4.375.000,00	Rp15.517.000,00	Rp666.000,00	Rp16.173.000,00	Rp20.548.000,00	Rp168.000,00
5.01.02	Belanja Barang dan Jasa	Rp20.716.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp4.375.000,00	Rp4.375.000,00	Rp15.517.000,00	Rp666.000,00	Rp16.173.000,00	Rp20.548.000,00	Rp168.000,00
5.1.02.01	Belanja Barang	Rp20.716.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp4.375.000,00	Rp4.375.000,00	Rp15.517.000,00	Rp666.000,00	Rp16.173.000,00	Rp20.548.000,00	Rp168.000,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	Rp20.716.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp4.375.000,00	Rp4.375.000,00	Rp15.517.000,00	Rp666.000,00	Rp16.173.000,00	Rp20.548.000,00	Rp168.000,00
5.1.02.01.01.0002	Belanja Bahan-Bahan Kimia	Rp9.991.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp3.010.000,00	Rp3.010.000,00	Rp6.945.000,00	Rp0,00	Rp6.945.000,00	Rp9.955.000,00	Rp36.000,00
5.1.02.01.01.0010	Belanja Bahan-Isi Tabung Gas	Rp1.440.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp260.000,00	Rp0,00	Rp260.000,00	Rp1.430.000,00	Rp10.000,00
5.1.02.01.01.0012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	Rp4.965.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.365.000,00	Rp1.365.000,00	Rp3.488.000,00	Rp0,00	Rp3.488.000,00	Rp4.853.000,00	Rp112.000,00
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	Rp4.320.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp3.914.000,00	Rp396.000,00	Rp4.310.000,00	Rp4.310.000,00	Rp10.000,00
1.06.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Rp33.713.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp5.400.000,00	Rp12.965.000,00	Rp18.365.000,00	Rp14.790.000,00	Rp0,00	Rp14.790.000,00	Rp33.155.000,00	Rp558.000,00
5.01	BELANJA OPERASI	Rp33.713.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp5.400.000,00	Rp12.965.000,00	Rp18.365.000,00	Rp14.790.000,00	Rp0,00	Rp14.790.000,00	Rp33.155.000,00	Rp558.000,00
5.01.02	Belanja Barang dan Jasa	Rp33.713.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp5.400.000,00	Rp12.965.000,00	Rp18.365.000,00	Rp14.790.000,00	Rp0,00	Rp14.790.000,00	Rp33.155.000,00	Rp558.000,00
5.1.02.01	Belanja Barang	Rp33.713.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp5.400.000,00	Rp12.965.000,00	Rp18.365.000,00	Rp14.790.000,00	Rp0,00	Rp14.790.000,00	Rp33.155.000,00	Rp558.000,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	Rp33.713.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp5.400.000,00	Rp12.965.000,00	Rp18.365.000,00	Rp14.790.000,00	Rp0,00	Rp14.790.000,00	Rp33.155.000,00	Rp558.000,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	Rp5.010.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp4.080.000,00	Rp4.080.000,00	Rp900.000,00	Rp0,00	Rp900.000,00	Rp4.980.000,00	Rp30.000,00
5.1.02.01.01.0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	Rp20.897.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp8.885.000,00	Rp8.885.000,00	Rp12.000.000,00	Rp0,00	Rp12.000.000,00	Rp20.885.000,00	Rp12.000,00
5.1.02.01.01.0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	Rp7.806.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp5.400.000,00	Rp0,00	Rp1.890.000,00	Rp0,00	Rp1.890.000,00	Rp7.290.000,00	Rp516.000,00	
1.06.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Pengandaan	Rp77.256.700,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp32.437.000,00	Rp32.437.000,00	Rp44.755.500,00	Rp0,00	Rp44.755.500,00	Rp77.192.500,00	Rp64.200,00
5.01	BELANJA OPERASI	Rp77.256.700,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp32.437.000,00	Rp32.437.000,00	Rp44.755.500,00	Rp0,00	Rp44.755.500,00	Rp77.192.500,00	Rp64.200,00
5.01.02	Belanja Barang dan Jasa	Rp77.256.700,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp32.437.000,00	Rp32.437.000,00	Rp44.755.500,00	Rp0,00	Rp44.755.500,00	Rp77.192.500,00	Rp64.200,00
5.1.02.01	Belanja Barang	Rp77.256.700,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp32.437.000,00	Rp32.437.000,00	Rp44.755.500,00	Rp0,00	Rp44.755.500,00	Rp77.192.500,00	Rp64.200,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	Rp77.256.700,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp32.437.000,00	Rp32.437.000,00	Rp44.755.500,00	Rp0,00	Rp44.755.500,00	Rp77.192.500,00	Rp64.200,00
5.1.02.01.01.0012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	Rp3.064.200,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp3.000.000,00	Rp0,00	Rp3.000.000,00	Rp3.000.000,00	Rp4.200,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	Rp4.192.500,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp32.437.000,00	Rp32.437.000,00	Rp41.755.500,00	Rp0,00	Rp41.755.500,00	Rp4.192.500,00	Rp0,00
1.06.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rp295.659.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp169.363.484,00	Rp79.311.200,00	Rp248.674.684,00	Rp46.547.900,00	Rp0,00	Rp295.222.584,00	Rp436.416,00
5.01	BELANJA OPERASI	Rp295.659.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp169.363.484,00	Rp79.311.200,00	Rp248.674.684,00	Rp46.547.900,00	Rp0,00	Rp295.222.584,00	Rp436.416,00
5.01.02	Belanja Barang dan Jasa	Rp295.659.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp169.363.484,00	Rp79.311.200,00	Rp248.674.684,00	Rp46.547.900,00	Rp0,00	Rp295.222.584,00	Rp436.416,00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	Rp295.659.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp169.363.484,00	Rp79.311.200,00	Rp248.674.684,00	Rp46.547.900,00	Rp0,00	Rp295.222.584,00	Rp436.416,00
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	Rp295.659.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp169.363.484,00	Rp79.311.200,00	Rp248.674.684,00	Rp46.547.900,00	Rp0,00	Rp295.222.584,00	Rp436.416,00
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	Rp176.965.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp107.454.684,00	Rp23.469.600,00	Rp130.924.284,00	Rp45.707.900,00	Rp0,00	Rp176.632.184,00	Rp32.816,00
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	Rp118.694.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp61.908.800,00	Rp55.841.600,00	Rp117.750.400,00	Rp840.000,00	Rp0,00	Rp118.590.400,00	Rp0,00

1.06.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp46.341.300,00	Rp25.080.000,00	Rp71.421.300,00	Rp71.421.300,00	Rp5.002.800,00
501	BELANJA OPERASI	Rp76.424.100,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp46.341.300,00	Rp25.080.000,00	Rp71.421.300,00	Rp71.421.300,00	Rp5.002.800,00
5.01.02	Belanja Barang dan Jasa	Rp76.424.100,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp46.341.300,00	Rp25.080.000,00	Rp71.421.300,00	Rp71.421.300,00	Rp5.002.800,00
5.1.02.01	Belanja Barang	Rp24.644.100,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp3.000.000,00	Rp21.630.000,00	Rp24.630.000,00	Rp24.630.000,00	Rp4.100,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	Rp24.644.100,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp3.000.000,00	Rp21.630.000,00	Rp24.630.000,00	Rp24.630.000,00	Rp4.100,00
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	Rp24.644.100,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp3.000.000,00	Rp21.630.000,00	Rp24.630.000,00	Rp24.630.000,00	Rp4.100,00
5.1.02.02	Belanja Jasa Kantor	Rp7.500.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp7.511.300,00	Rp0,00	Rp7.511.300,00	Rp7.511.300,00	Rp4.988.700,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	Rp7.500.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp7.511.300,00	Rp0,00	Rp7.511.300,00	Rp7.511.300,00	Rp4.988.700,00
5.1.02.02.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	Rp7.500.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp2.511.300,00	Rp0,00	Rp2.511.300,00	Rp2.511.300,00	Rp4.988.700,00
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan	Rp44.280.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp40.830.000,00	Rp3.450.000,00	Rp44.280.000,00	Rp44.280.000,00	Rp0,00
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	Rp44.280.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp40.830.000,00	Rp3.450.000,00	Rp44.280.000,00	Rp44.280.000,00	Rp0,00
5.1.02.03.02.0035	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	Rp44.280.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp40.830.000,00	Rp3.450.000,00	Rp44.280.000,00	Rp44.280.000,00	Rp0,00
1.06.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau	Rp65.680.500,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp43.654.200,00	Rp15.920.000,00	Rp59.574.200,00	Rp59.574.200,00	Rp6.106.300,00
501	BELANJA OPERASI	Rp65.680.500,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp43.654.200,00	Rp15.920.000,00	Rp59.574.200,00	Rp59.574.200,00	Rp6.106.300,00
5.01.02	Belanja Barang dan Jasa	Rp65.680.500,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp43.654.200,00	Rp15.920.000,00	Rp59.574.200,00	Rp59.574.200,00	Rp6.106.300,00
5.1.02.01	Belanja Barang	Rp20.940.500,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp18.960.000,00	Rp1.968.000,00	Rp20.928.000,00	Rp20.928.000,00	Rp12.500,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	Rp20.940.500,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp18.960.000,00	Rp1.968.000,00	Rp20.928.000,00	Rp20.928.000,00	Rp12.500,00
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	Rp20.940.500,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp18.960.000,00	Rp1.968.000,00	Rp20.928.000,00	Rp20.928.000,00	Rp12.500,00
5.1.02.02	Belanja Jasa	Rp12.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp5.906.200,00	Rp0,00	Rp5.906.200,00	Rp5.906.200,00	Rp6.093.800,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	Rp12.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp5.906.200,00	Rp0,00	Rp5.906.200,00	Rp5.906.200,00	Rp6.093.800,00
5.1.02.02.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	Rp12.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp5.906.200,00	Rp0,00	Rp5.906.200,00	Rp5.906.200,00	Rp6.093.800,00
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan	Rp32.740.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp18.788.000,00	Rp13.952.000,00	Rp32.740.000,00	Rp32.740.000,00	Rp0,00
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	Rp32.740.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp18.788.000,00	Rp13.952.000,00	Rp32.740.000,00	Rp32.740.000,00	Rp0,00
5.1.02.03.02.0037	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	Rp21.800.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp18.788.000,00	Rp3.012.000,00	Rp21.800.000,00	Rp21.800.000,00	Rp0,00
5.1.02.03.02.0038	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua	Rp10.940.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0.940.000,00	Rp10.940.000,00	Rp10.940.000,00	Rp10.940.000,00	Rp0,00
1.06.02	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Rp482.160.100,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp176.069.600,00	Rp122.897.200,00	Rp298.966.800,00	Rp0,00	Rp12.515.400,00	Rp12.515.400,00	Rp311.482.200,00	Rp311.482.200,00	Rp170.677.900,00
1.06.02.2.02	Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Rp9.944.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp6.999.400,00	Rp3.271.400,00	Rp10.270.800,00	Rp0,00	Rp4.040.000,00	Rp4.040.000,00	Rp4.130.800,00	Rp4.130.800,00	Rp4.633.200,00
1.06.02.2.02.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	Rp18.944.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp6.999.400,00	Rp3.271.400,00	Rp10.270.800,00	Rp0,00	Rp4.040.000,00	Rp4.040.000,00	Rp4.130.800,00	Rp4.130.800,00	Rp4.633.200,00
501	BELANJA OPERASI	Rp18.944.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp6.999.400,00	Rp3.271.400,00	Rp10.270.800,00	Rp0,00	Rp4.040.000,00	Rp4.040.000,00	Rp4.130.800,00	Rp4.130.800,00	Rp4.633.200,00
5.01.02	Belanja Barang dan Jasa	Rp18.944.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp6.999.400,00	Rp3.271.400,00	Rp10.270.800,00	Rp0,00	Rp4.040.000,00	Rp4.040.000,00	Rp4.130.800,00	Rp4.130.800,00	Rp4.633.200,00
5.1.02.01	Belanja Barang	Rp6.750.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp3.240.000,00	Rp3.240.000,00	Rp3.240.000,00	Rp3.240.000,00	Rp3.510.000,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	Rp6.750.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp3.240.000,00	Rp3.240.000,00	Rp3.240.000,00	Rp3.240.000,00	Rp3.510.000,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	Rp3.750.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp240.000,00	Rp240.000,00	Rp240.000,00	Rp240.000,00	Rp3.510.000,00
5.1.02.01.01.0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	Rp3.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp3.000.000,00	Rp3.000.000,00	Rp3.000.000,00	Rp3.000.000,00	Rp0,00
5.1.02.02	Belanja Jasa	Rp2.600.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp800.000,00	Rp800.000,00	Rp1.700.000,00	Rp1.700.000,00	Rp900.000,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	Rp1.800.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.800.000,00	Rp0,00	Rp1.800.000,00	Rp1.800.000,00	Rp900.000,00
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	Rp1.800.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.800.000,00	Rp1.800.000,00	Rp900.000,00
5.1.02.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	Rp800.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp800.000,00	Rp800.000,00	Rp800.000,00	Rp800.000,00	Rp0,00
5.1.02.02.05.0009	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	Rp800.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp800.000,00	Rp800.000,00	Rp800.000,00	Rp800.000,00	Rp0,00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	Rp9.594.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp6.999.400,00	Rp2.371.400,00	Rp9.370.800,00	Rp0,00	Rp9.370.800,00	Rp0,00	Rp9.370.800,00	Rp9.370.800,00	Rp223.200,00
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	Rp4.168.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp4.168.000,00	Rp0,00	Rp4.168.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp4.168.000,00	Rp4.168.000,00	Rp0,00
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	Rp4.168.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp4.168.000,00	Rp0,00	Rp4.168.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp4.168.000,00	Rp4.168.000,00	Rp0,00
1.06.02.2.03	Peningkatan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Rp463.216.100,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp5.436.000,00	Rp2.371.400,00	Rp7.807.400,00	Rp0,00	Rp5.436.000,00	Rp2.371.400,00	Rp7.807.400,00	Rp7.807.400,00	Rp3.233.000,00
1.06.02.2.03.0001	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Rp18.106.600,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp169.070.200,00	Rp119.625.800,00	Rp288.696.000,00	Rp0,00	Rp8.475.400,00	Rp8.475.400,00	Rp297.171.400,00	Rp297.171.400,00	Rp166.044.700,00
501	BELANJA OPERASI	Rp18.106.600,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp18.106.600,00	Rp0,00	Rp18.106.600,00	Rp0,00	Rp4.510.400,00	Rp4.510.400,00	Rp15.756.200,00	Rp15.756.200,00	Rp2.350.400,00
5.01.02	Belanja Barang dan Jasa	Rp18.106.600,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp18.106.600,00	Rp0,00	Rp18.106.600,00	Rp0,00	Rp4.510.400,00	Rp4.510.400,00	Rp15.756.200,00	Rp15.756.200,00	Rp2.350.400,00
5.1.02.01	Belanja Barang	Rp3.055.600,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp2.640.000,00	Rp2.640.000,00	Rp2.640.000,00	Rp2.640.000,00	Rp415.600,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	Rp3.055.600,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp2.640.000,00	Rp2.640.000,00	Rp2.640.000,00	Rp2.640.000,00	Rp415.600,00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	Rp15.600,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp15.600,00	Rp15.600,00	Rp0,00
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	Rp340.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp340.000,00	Rp0,00	Rp340.000,00	Rp0,00	Rp240.000,00	Rp240.000,00	Rp240.000,00	Rp240.000,00	Rp0,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	Rp2.400.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp2.400.000,00	Rp0,00	Rp2.400.000,00	Rp0,00	Rp2.400.000,00	Rp2.400.000,00	Rp2.400.000,00	Rp2.400.000,00	Rp0,00
5.1.02.02	Belanja Jasa	Rp2.700.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp2.150.000,00	Rp2.150.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp2.150.000,00	Rp2.150.000,00	Rp550.000,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	Rp2.700.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp2.150.000,00	Rp2.150.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp2.150.000,00	Rp2.150.000,00	Rp550.000,00
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator,													

5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	Rp0,00	Rp0,00	Rp250,000,000	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp250,000,000	Rp250,000,000	Rp250,000,000	Rp0,00
5.1.02.01.01.0043	Belanja Natur dan Pakan-Natur	Rp19,772,000,000	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp19,772,000,000	Rp19,772,000,000	Rp0,00	Rp0,00	Rp19,772,000,000	Rp2,000,000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00
5.1.02.01.01.0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	Rp25,200,000,000	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp24,600,000,000	Rp24,600,000,000	Rp0,00	Rp0,00	Rp24,600,000,000	Rp600,000,000
5.1.02.01.01.0076	Belanja Pakalan Olahraga	Rp7,800,000,000	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp6,000,000,000	Rp6,000,000,000	Rp0,00	Rp0,00	Rp6,000,000,000	Rp1,800,000,000
5.1.02.02	Belanja Jasa	Rp14,400,000,000	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp11,400,000,000	Rp11,400,000,000	Rp0,00	Rp950,000,000	Rp12,350,000,000	Rp2,050,000,000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	Rp10,650,000,000	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp10,650,000,000	Rp10,650,000,000	Rp0,00	Rp0,00	Rp10,650,000,000	Rp50,000,000
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	Rp10,650,000,000	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp10,650,000,000	Rp10,650,000,000	Rp0,00	Rp0,00	Rp10,650,000,000	Rp50,000,000
5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	Rp2,950,000,000	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp2,950,000,000	Rp2,950,000,000	Rp0,00	Rp0,00	Rp2,950,000,000	Rp2,000,000,000
5.1.02.02.04.0117	Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya	Rp750,000,000	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp750,000,000	Rp750,000,000	Rp0,00	Rp0,00	Rp750,000,000	Rp0,00
5.1.02.02.04.0122	Belanja Sewa Alat Dapur	Rp200,000,000	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp200,000,000	Rp200,000,000	Rp0,00	Rp0,00	Rp200,000,000	Rp0,00
5.1.02.02.04.0123	Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	Rp2,000,000,000	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp2,000,000,000	Rp2,000,000,000	Rp0,00	Rp0,00	Rp2,000,000,000	Rp0,00
5.1.02.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	Rp800,000,000	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp800,000,000	Rp800,000,000	Rp0,00	Rp0,00	Rp800,000,000	Rp0,00
5.1.02.02.05.0009	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	Rp800,000,000	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp800,000,000	Rp800,000,000	Rp0,00	Rp0,00	Rp800,000,000	Rp0,00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	Rp19,500,000,000	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp18,337,800,000	Rp18,337,800,000	Rp0,00	Rp0,00	Rp18,337,800,000	Rp1,162,200,000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	Rp19,500,000,000	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp18,437,800,000	Rp18,437,800,000	Rp0,00	Rp0,00	Rp18,437,800,000	Rp1,062,200,000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	Rp4,735,000,000	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp4,471,400,000	Rp4,471,400,000	Rp0,00	Rp0,00	Rp4,471,400,000	Rp263,600,000
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	Rp14,765,000,000	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp13,966,400,000	Rp13,966,400,000	Rp0,00	Rp0,00	Rp13,966,400,000	Rp798,600,000
5.1.02.05	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	Rp3,000,000,000	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp3,000,000,000	Rp3,000,000,000	Rp0,00	Rp0,00	Rp3,000,000,000	Rp0,00
5.1.02.05.02	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	Rp3,000,000,000	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp3,000,000,000	Rp3,000,000,000	Rp0,00	Rp0,00	Rp3,000,000,000	Rp0,00
5.01.05	Belanja Hibah	Rp300,000,000,000	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp150,000,000,000	Rp150,000,000,000	Rp0,00	Rp0,00	Rp150,000,000,000	Rp150,000,000,000
5.1.05.05	Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	Rp300,000,000,000	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp150,000,000,000	Rp150,000,000,000	Rp0,00	Rp0,00	Rp150,000,000,000	Rp150,000,000,000
5.1.05.05.01	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nir laba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdas	Rp300,000,000,000	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp150,000,000,000	Rp150,000,000,000	Rp0,00	Rp0,00	Rp150,000,000,000	Rp150,000,000,000
5.1.05.05.01.0001	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nir laba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk B	Rp300,000,000,000	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp150,000,000,000	Rp150,000,000,000	Rp0,00	Rp0,00	Rp150,000,000,000	Rp150,000,000,000
5.01.06	Belanja Bantuan Sosial	Rp20,000,000,000	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp20,000,000,000	Rp20,000,000,000	Rp0,00	Rp0,00	Rp20,000,000,000	Rp0,00
5.1.06.01	Belanja Bantuan Sosial kepada Individu	Rp20,000,000,000	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp20,000,000,000	Rp20,000,000,000	Rp0,00	Rp0,00	Rp20,000,000,000	Rp0,00
5.1.06.01.01	Belanja Bantuan Sosial yang direncanakan kepada Individu	Rp20,000,000,000	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp20,000,000,000	Rp20,000,000,000	Rp0,00	Rp0,00	Rp20,000,000,000	Rp0,00
5.1.06.01.01.0001	Belanja Bantuan Sosial yang direncanakan kepada Individu	Rp20,000,000,000	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp20,000,000,000	Rp20,000,000,000	Rp0,00	Rp0,00	Rp20,000,000,000	Rp0,00
1.06.02.2.03.0005	Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga	Rp4,540,000,000	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp4,471,400,000	Rp4,471,400,000	Rp0,00	Rp0,00	Rp4,471,400,000	Rp68,600,000
5.01	BELANJA OPERASI	Rp4,540,000,000	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp4,471,400,000	Rp4,471,400,000	Rp0,00	Rp0,00	Rp4,471,400,000	Rp68,600,000
5.01.02	Belanja Barang dan Jasa	Rp4,540,000,000	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp4,471,400,000	Rp4,471,400,000	Rp0,00	Rp0,00	Rp4,471,400,000	Rp68,600,000
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	Rp4,540,000,000	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp4,471,400,000	Rp4,471,400,000	Rp0,00	Rp0,00	Rp4,471,400,000	Rp68,600,000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	Rp4,540,000,000	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp4,471,400,000	Rp4,471,400,000	Rp0,00	Rp0,00	Rp4,471,400,000	Rp68,600,000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	Rp4,540,000,000	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp4,471,400,000	Rp4,471,400,000	Rp0,00	Rp0,00	Rp4,471,400,000	Rp68,600,000
1.06.03	PELAYANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN	Rp2,663,000,000	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp2,474,700,000	Rp2,474,700,000	Rp0,00	Rp0,00	Rp2,474,700,000	Rp188,300,000
1.06.03.2.01	Penulisan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debaraksi di Daerah Kabupaten/Kota	Rp2,663,000,000	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp2,474,700,000	Rp2,474,700,000	Rp0,00	Rp0,00	Rp2,474,700,000	Rp188,300,000
1.06.03.2.01.0001	Fasilitas Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debaraksi di Daerah Kabud	Rp2,663,000,000	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp2,474,700,000	Rp2,474,700,000	Rp0,00	Rp0,00	Rp2,474,700,000	Rp188,300,000
5.01	BELANJA OPERASI	Rp2,663,000,000	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp2,474,700,000	Rp2,474,700,000	Rp0,00	Rp0,00	Rp2,474,700,000	Rp188,300,000
5.01.02	Belanja Barang dan Jasa	Rp2,663,000,000	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp2,474,700,000	Rp2,474,700,000	Rp0,00	Rp0,00	Rp2,474,700,000	Rp188,300,000
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	Rp2,663,000,000	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp2,474,700,000	Rp2,474,700,000	Rp0,00	Rp0,00	Rp2,474,700,000	Rp188,300,000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	Rp2,663,000,000	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp2,474,700,000	Rp2,474,700,000	Rp0,00	Rp0,00	Rp2,474,700,000	Rp188,300,000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	Rp2,663,000,000	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp2,474,700,000	Rp2,474,700,000	Rp0,00	Rp0,00	Rp2,474,700,000	Rp188,300,000
1.06.04	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Rp259,008,000,000	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp156,868,450,000	Rp156,868,450,000	Rp0,00	Rp0,00	Rp156,868,450,000	Rp99,655,600,000
1.06.04.2.01	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gela	Rp214,975,500,000	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp156,868,450,000	Rp156,868,450,000	Rp0,00	Rp0,00	Rp156,868,450,000	Rp99,655,600,000
1.06.04.2.01.0001	Pemediaan Perumahan	Rp43,604,000,000	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp33,010,800,000	Rp33,010,800,000	Rp0,00	Rp0,00	Rp33,010,800,000	Rp10,593,200,000
5.01	BELANJA OPERASI	Rp43,604,000,000	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp40,475,300,000	Rp40,475,300,000	Rp0,00	Rp0,00	Rp40,475,300,000	Rp3,128,700,000
5.01.02	Belanja Barang dan Jasa	Rp43,604,000,000	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp40,475,300,000	Rp40,475,300,000	Rp0,00	Rp0,00	Rp40,475,300,000	Rp3,128,700,000
5.1.02.01	Belanja Barang	Rp24,750,000,000	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp24,750,000,000	Rp24,750,000,000	Rp0,00	Rp0,00	Rp24,750,000,000	Rp0,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	Rp24,750,000,000	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp24,750,000,000	Rp24,750,000,000	Rp0,00	Rp0,00	Rp24,750,000,000	Rp0,00
5.1.02.01.01.0039	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	Rp24,750,000,000	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp24,750,000,000	Rp24,750,000,000	Rp0,00	Rp0,00	Rp24,750,000,000	Rp0,00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	Rp18,854,000,000	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp18,260,800,000	Rp18,260,800,000	Rp0,00	Rp0,00	Rp18,260,800,000	Rp593,200,000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	Rp18,854,000,000	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp18,260,800,000	Rp18,260,800,000	Rp0,00	Rp0,00	Rp18,260,800,000	Rp593,200,000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	Rp18,854,000,000	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp18,260,800,000	Rp18,260,800,000	Rp0,00	Rp0,00	Rp18,260,800,000	Rp593,200,000
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	Rp5,199,000,000	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp5,128,500,000	Rp5,128,500,000	Rp0,00	Rp0,00	Rp5,128,500,000	Rp70,700,000
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	Rp13,655,000,000	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp13,132,300,000	Rp13,132,300,000	Rp0,00	Rp0,00	Rp13,132,300,000	Rp64,900,000
1.06.04.2.01.0002	Pemediaan Sandang	Rp3,696,500,000	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp3,696,500,000	Rp3,696,500,000	Rp0,00	Rp0,00	Rp3,696,500,000	Rp0,00
5.01	BELANJA OPERASI	Rp3,696,500,000	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp3,696,500,000	Rp3,696,500,000	Rp0,00	Rp0,00	Rp3,696,500,000	Rp0,00
5.01.02	Belanja Barang dan Jasa	Rp3,696,500,000	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00</							

5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	Rp944,000.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp944,000.00	Rp0.00	Rp944,000.00	Rp0.00	Rp0.00
5.1.02.01.01.0039	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	Rp10,206,000.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp10,206,000.00	Rp0.00	Rp10,206,000.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp10,206,000.00	Rp0.00	Rp0.00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	Rp900,000.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp900,000.00	Rp0.00	Rp900,000.00	Rp0.00	Rp900,000.00	Rp0.00	Rp900,000.00	Rp0.00	Rp0.00
5.1.02.01.01.0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	Rp3,420,000.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp3,420,000.00	Rp0.00	Rp3,420,000.00	Rp0.00	Rp3,420,000.00	Rp0.00	Rp3,420,000.00	Rp0.00	Rp0.00
5.1.02.02	Belanja Jasa	Rp4,400,000.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp4,400,000.00	Rp0.00	Rp4,400,000.00	Rp0.00	Rp4,400,000.00	Rp0.00	Rp4,400,000.00	Rp0.00	Rp0.00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	Rp3,600,000.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp3,600,000.00	Rp0.00	Rp3,600,000.00	Rp0.00	Rp3,600,000.00	Rp0.00	Rp3,600,000.00	Rp0.00	Rp0.00
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	Rp3,600,000.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp3,600,000.00	Rp0.00	Rp3,600,000.00	Rp0.00	Rp3,600,000.00	Rp0.00	Rp3,600,000.00	Rp0.00	Rp0.00
5.1.02.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	Rp800,000.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp800,000.00	Rp0.00	Rp800,000.00	Rp0.00	Rp800,000.00	Rp0.00	Rp800,000.00	Rp0.00	Rp0.00
5.1.02.02.05.0009	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	Rp800,000.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp800,000.00	Rp0.00	Rp800,000.00	Rp0.00	Rp800,000.00	Rp0.00	Rp800,000.00	Rp0.00	Rp0.00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	Rp19,160,000.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp19,160,000.00	Rp0.00	Rp19,160,000.00	Rp0.00	Rp19,160,000.00	Rp0.00	Rp19,160,000.00	Rp0.00	Rp0.00
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	Rp19,160,000.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp19,160,000.00	Rp0.00	Rp19,160,000.00	Rp0.00	Rp19,160,000.00	Rp0.00	Rp19,160,000.00	Rp0.00	Rp0.00
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	Rp7,047,000.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp7,047,000.00	Rp0.00	Rp7,047,000.00	Rp0.00	Rp7,047,000.00	Rp0.00	Rp7,047,000.00	Rp0.00	Rp0.00
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	Rp12,113,000.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp12,113,000.00	Rp0.00	Rp12,113,000.00	Rp0.00	Rp12,113,000.00	Rp0.00	Rp12,113,000.00	Rp0.00	Rp0.00
1.06.04.2.01.0007	Fasilitas Pembuatan Nomor induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak	Rp400,000.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp400,000.00	Rp0.00	Rp400,000.00	Rp0.00	Rp400,000.00	Rp0.00	Rp400,000.00	Rp0.00	Rp0.00
5.01	BELANJA OPERASI	Rp400,000.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp400,000.00	Rp0.00	Rp400,000.00	Rp0.00	Rp400,000.00	Rp0.00	Rp400,000.00	Rp0.00	Rp0.00
5.01.02	Belanja Barang dan Jasa	Rp400,000.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp400,000.00	Rp0.00	Rp400,000.00	Rp0.00	Rp400,000.00	Rp0.00	Rp400,000.00	Rp0.00	Rp0.00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	Rp400,000.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp400,000.00	Rp0.00	Rp400,000.00	Rp0.00	Rp400,000.00	Rp0.00	Rp400,000.00	Rp0.00	Rp0.00
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	Rp400,000.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp400,000.00	Rp0.00	Rp400,000.00	Rp0.00	Rp400,000.00	Rp0.00	Rp400,000.00	Rp0.00	Rp0.00
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	Rp400,000.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp400,000.00	Rp0.00	Rp400,000.00	Rp0.00	Rp400,000.00	Rp0.00	Rp400,000.00	Rp0.00	Rp0.00
1.06.04.2.01.0008	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Rp10,500,000.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp10,500,000.00	Rp0.00	Rp10,500,000.00	Rp0.00	Rp10,500,000.00	Rp0.00	Rp10,500,000.00	Rp0.00	Rp0.00
5.01	BELANJA OPERASI	Rp10,500,000.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp10,500,000.00	Rp0.00	Rp10,500,000.00	Rp0.00	Rp10,500,000.00	Rp0.00	Rp10,500,000.00	Rp0.00	Rp0.00
5.01.02	Belanja Barang dan Jasa	Rp200,000.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp200,000.00	Rp0.00	Rp200,000.00	Rp0.00	Rp200,000.00	Rp0.00	Rp200,000.00	Rp0.00	Rp0.00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	Rp200,000.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp200,000.00	Rp0.00	Rp200,000.00	Rp0.00	Rp200,000.00	Rp0.00	Rp200,000.00	Rp0.00	Rp0.00
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	Rp200,000.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp200,000.00	Rp0.00	Rp200,000.00	Rp0.00	Rp200,000.00	Rp0.00	Rp200,000.00	Rp0.00	Rp0.00
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	Rp200,000.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp200,000.00	Rp0.00	Rp200,000.00	Rp0.00	Rp200,000.00	Rp0.00	Rp200,000.00	Rp0.00	Rp0.00
5.01.06	Belanja Bantuan Sosial	Rp10,300,000.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp10,300,000.00	Rp0.00	Rp10,300,000.00	Rp0.00	Rp10,300,000.00	Rp0.00	Rp10,300,000.00	Rp0.00	Rp0.00
5.1.06.01	Belanja Bantuan Sosial kepada Individu	Rp10,300,000.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp10,300,000.00	Rp0.00	Rp10,300,000.00	Rp0.00	Rp10,300,000.00	Rp0.00	Rp10,300,000.00	Rp0.00	Rp0.00
5.1.06.01.02	Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Individu	Rp10,300,000.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp10,300,000.00	Rp0.00	Rp10,300,000.00	Rp0.00	Rp10,300,000.00	Rp0.00	Rp10,300,000.00	Rp0.00	Rp0.00
1.06.04.2.01.0009	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	Rp1,979,000.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp1,979,000.00	Rp0.00	Rp1,979,000.00	Rp0.00	Rp1,979,000.00	Rp0.00	Rp1,979,000.00	Rp0.00	Rp0.00
5.01	BELANJA OPERASI	Rp1,979,000.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp1,979,000.00	Rp0.00	Rp1,979,000.00	Rp0.00	Rp1,979,000.00	Rp0.00	Rp1,979,000.00	Rp0.00	Rp0.00
5.01.02	Belanja Barang dan Jasa	Rp1,979,000.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp1,979,000.00	Rp0.00	Rp1,979,000.00	Rp0.00	Rp1,979,000.00	Rp0.00	Rp1,979,000.00	Rp0.00	Rp0.00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	Rp1,979,000.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp1,979,000.00	Rp0.00	Rp1,979,000.00	Rp0.00	Rp1,979,000.00	Rp0.00	Rp1,979,000.00	Rp0.00	Rp0.00
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	Rp1,979,000.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp1,979,000.00	Rp0.00	Rp1,979,000.00	Rp0.00	Rp1,979,000.00	Rp0.00	Rp1,979,000.00	Rp0.00	Rp0.00
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	Rp1,979,000.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp1,979,000.00	Rp0.00	Rp1,979,000.00	Rp0.00	Rp1,979,000.00	Rp0.00	Rp1,979,000.00	Rp0.00	Rp0.00
1.06.04.2.01.0010	Pemenuhan Kebutuhan Kedaruratan	Rp200,000.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp200,000.00	Rp0.00	Rp200,000.00	Rp0.00	Rp200,000.00	Rp0.00	Rp200,000.00	Rp0.00	Rp0.00
5.01	BELANJA OPERASI	Rp200,000.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp200,000.00	Rp0.00	Rp200,000.00	Rp0.00	Rp200,000.00	Rp0.00	Rp200,000.00	Rp0.00	Rp0.00
5.01.02	Belanja Barang dan Jasa	Rp200,000.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp200,000.00	Rp0.00	Rp200,000.00	Rp0.00	Rp200,000.00	Rp0.00	Rp200,000.00	Rp0.00	Rp0.00
5.1.02.01	Belanja Barang	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00
5.1.02.01.01.0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	Rp200,000.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp200,000.00	Rp0.00	Rp200,000.00	Rp0.00	Rp200,000.00	Rp0.00	Rp200,000.00	Rp0.00	Rp0.00
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	Rp200,000.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp200,000.00	Rp0.00	Rp200,000.00	Rp0.00	Rp200,000.00	Rp0.00	Rp200,000.00	Rp0.00	Rp0.00
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	Rp200,000.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp200,000.00	Rp0.00	Rp200,000.00	Rp0.00	Rp200,000.00	Rp0.00	Rp200,000.00	Rp0.00	Rp0.00
5.02	BELANJA MODAL	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00
5.02.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00
5.02.02.07	Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00
5.02.02.07.02	Belanja Modal Alat Kesehatan Umum	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00
5.02.02.07.02.0005	Belanja Modal Alat Kesehatan Umum Lainnya	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00
1.06.04.2.01.0011	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Rp400,000.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp400,000.00	Rp0.00	Rp400,000.00	Rp0.00	Rp400,000.00	Rp0.00	Rp400,000.00	Rp0.00	Rp0.00
5.01	BELANJA OPERASI	Rp400,000.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp400,000.00	Rp0.00	Rp400,000.00	Rp0.00	Rp400,000.00	Rp0.00	Rp400,000.00	Rp0.00	Rp0.00
5.01.02	Belanja Barang dan Jasa	Rp400,000.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp400,000.00	Rp0.00	Rp400,000.00	Rp0.00	Rp400,000.00	Rp0.00	Rp400,000.00	Rp0.00	Rp0.00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	Rp400,000.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp400,000.00	Rp0.00	Rp400,000.00	Rp0.00	Rp400,000.00	Rp0.00	Rp400,000.00	Rp0.00	Rp0.00
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	Rp400,000.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp400,000.00	Rp0.00	Rp400,000.00	Rp0.00	Rp400,000.00	Rp0.00	Rp400,000.00	Rp0.00	Rp0.00
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	Rp400,000.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp400,000.00	Rp0.00	Rp400,000.00	Rp0.00	Rp400,000.00	Rp0.00	Rp400,000.00	Rp0.00	Rp0.00
1.06.04.2.01.0012	Pemberian Layanan Rujukan	Rp14,108,000.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp14,108,000.00	Rp0.00	Rp14,108,000.00	Rp0.00	Rp14,108,000.00	Rp0.00	Rp14,108,000.00	Rp0.00	Rp0.00
5.01	BELANJA OPERASI	Rp14,108,000.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp14,108,000.00	Rp0.00	Rp14,108,000.00	Rp0.00	Rp14,108,000.00	Rp0.00	Rp14,108,000.00	Rp0.00	Rp0.00
5.01.02	Belanja Barang dan Jasa	Rp14,108,000.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp14,108,000.00	Rp0.00	Rp14,108,000.00	Rp0.00	Rp14,108,000.00	Rp0.00	Rp14,108,000.00	Rp0.00	Rp0.00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	Rp14,108,000.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp14,108,000.00	Rp0.00	Rp14,108,000.00	Rp					

5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	Rp18.801.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp16.299.800,00	Rp16.299.800,00	Rp1.790.800,00	Rp0,00	Rp1.790.800,00	Rp18.090.600,00	Rp710.400,00	
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	Rp18.801.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp16.299.800,00	Rp16.299.800,00	Rp1.790.800,00	Rp0,00	Rp1.790.800,00	Rp18.090.600,00	Rp710.400,00	
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	Rp2.349.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp2.336.000,00	Rp2.336.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp2.336.000,00	Rp13.000,00		
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	Rp16.452.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp13.963.800,00	Rp13.963.800,00	Rp1.790.800,00	Rp0,00	Rp1.790.800,00	Rp15.754.600,00	Rp697.400,00	
1.06.04.2.02.0012	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.790.800,00	Rp0,00	Rp0,00	
5.01	BELANJA OPERASI	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	
5.01.02	Belanja Barang dan Jasa	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	
1.06.04.2.02.0014	Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	Rp4.534.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp4.371.400,00	Rp4.371.400,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp4.371.400,00	Rp162.600,00	
5.01	BELANJA OPERASI	Rp4.534.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp4.371.400,00	Rp4.371.400,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp4.371.400,00	Rp162.600,00	
5.01.02	Belanja Barang dan Jasa	Rp4.534.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp4.371.400,00	Rp4.371.400,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp4.371.400,00	Rp162.600,00	
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	Rp4.534.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp4.371.400,00	Rp4.371.400,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp4.371.400,00	Rp162.600,00	
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	Rp4.534.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp4.371.400,00	Rp4.371.400,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp4.371.400,00	Rp162.600,00	
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	Rp4.534.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp4.371.400,00	Rp4.371.400,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp4.371.400,00	Rp162.600,00	
1.06.05.2.02.0001	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Rp221.566.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp101.298.369,00	Rp93.924.000,00	Rp195.222.369,00	Rp19.096.700,00	Rp0,00	Rp19.096.700,00	Rp214.319.069,00	Rp7.246.931,00
1.06.05.2.02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Rp221.566.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp101.298.369,00	Rp93.924.000,00	Rp195.222.369,00	Rp19.096.700,00	Rp0,00	Rp19.096.700,00	Rp214.319.069,00	Rp7.246.931,00
1.06.05.2.02.0001	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Rp35.850.900,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp20.055.400,00	Rp20.055.400,00	Rp55.906.300,00	Rp3.520.000,00	Rp0,00	Rp5.926.300,00	Rp484.700,00	
5.01	BELANJA OPERASI	Rp60.271.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp35.850.900,00	Rp20.055.400,00	Rp55.906.300,00	Rp3.520.000,00	Rp0,00	Rp3.520.000,00	Rp59.426.300,00	Rp4.700,00
5.01.02	Belanja Barang dan Jasa	Rp60.271.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp35.850.900,00	Rp20.055.400,00	Rp55.906.300,00	Rp3.520.000,00	Rp0,00	Rp3.520.000,00	Rp59.426.300,00	Rp4.700,00
5.1.02.01	Belanja Barang	Rp53.531.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp45.312.669,00	Rp45.894.200,00	Rp1.206.869,00	Rp10.476.700,00	Rp0,00	Rp10.476.700,00	Rp4.082.431,00	
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	Rp3.531.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp3.520.000,00	Rp0,00	Rp3.520.000,00	Rp11.000,00	
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	Rp3.531.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp3.520.000,00	Rp0,00	Rp3.520.000,00	Rp11.000,00	
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	Rp56.740.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp35.850.900,00	Rp20.055.400,00	Rp55.906.300,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp55.906.300,00	Rp833.700,00	
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	Rp56.740.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp35.850.900,00	Rp20.055.400,00	Rp55.906.300,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp55.906.300,00	Rp833.700,00	
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	Rp56.740.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp35.850.900,00	Rp20.055.400,00	Rp55.906.300,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp55.906.300,00	Rp833.700,00	
1.06.05.2.02.0002	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Rp105.766.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp45.312.669,00	Rp45.894.200,00	Rp1.206.869,00	Rp10.476.700,00	Rp0,00	Rp10.476.700,00	Rp4.082.431,00	
5.01	BELANJA OPERASI	Rp105.766.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp45.312.669,00	Rp45.894.200,00	Rp1.206.869,00	Rp10.476.700,00	Rp0,00	Rp10.476.700,00	Rp4.082.431,00	
5.01.02	Belanja Barang dan Jasa	Rp105.766.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp45.312.669,00	Rp45.894.200,00	Rp1.206.869,00	Rp10.476.700,00	Rp0,00	Rp10.476.700,00	Rp4.082.431,00	
5.1.02.01	Belanja Barang	Rp34.229.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp11.700.000,00	Rp15.184.000,00	Rp26.884.000,00	Rp5.785.000,00	Rp0,00	Rp5.785.000,00	Rp3.669.000,00	Rp1.560.000,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	Rp34.229.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp11.700.000,00	Rp15.184.000,00	Rp26.884.000,00	Rp5.785.000,00	Rp0,00	Rp5.785.000,00	Rp3.669.000,00	Rp1.560.000,00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	Rp7.200.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp7.200.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp7.200.000,00	Rp0,00	
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	Rp950.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp950.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp950.000,00	Rp0,00	
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	Rp2.002.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp4.500.000,00	Rp7.704.000,00	Rp7.204.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp7.798.000,00	Rp4.000,00	
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan Kantor-Benda Pos	Rp1.837.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.837.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.837.000,00	Rp0,00	
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	Rp1.200.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.200.000,00	Rp0,00	Rp1.200.000,00	Rp0,00	
5.1.02.01.01.0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	Rp14.040.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp12.480.000,00	Rp12.480.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp12.480.000,00	Rp1.560.000,00	
5.1.02.02	Belanja Jasa	Rp11.900.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp10.100.000,00	Rp10.100.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp10.100.000,00	Rp1.800.000,00	
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	Rp11.900.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp10.100.000,00	Rp10.100.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp10.100.000,00	Rp1.800.000,00	
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	Rp1.900.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.000.000,00	Rp1.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.000.000,00	Rp1.800.000,00	
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Sewa Gedung dan Bangunan	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	
5.1.02.02.05.0009	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	Rp59.637.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp33.612.669,00	Rp20.610.200,00	Rp54.222.869,00	Rp4.691.700,00	Rp0,00	Rp4.691.700,00	Rp58.914.569,00	Rp722.431,00
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	Rp59.637.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp33.612.669,00	Rp20.610.200,00	Rp54.222.869,00	Rp4.691.700,00	Rp0,00	Rp4.691.700,00	Rp58.914.569,00	Rp722.431,00
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	Rp38.742.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp24.639.069,00	Rp9.043.400,00	Rp33.682.469,00	Rp4.691.700,00	Rp0,00	Rp4.691.700,00	Rp38.374.169,00	Rp367.831,00
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	Rp20.895.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp8.973.600,00	Rp11.566.800,00	Rp20.540.400,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp20.540.400,00	Rp354.600,00	
1.06.05.2.02.0003	Fasilitas Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Rp49.459.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp20.134.800,00	Rp22.015.600,00	Rp42.150.400,00	Rp5.100.000,00	Rp0,00	Rp5.100.000,00	Rp2.208.600,00	
5.01	BELANJA OPERASI	Rp49.459.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp20.134.800,00	Rp22.015.600,00	Rp42.150.400,00	Rp5.100.000,00	Rp0,00	Rp5.100.000,00	Rp2.208.600,00	
5.01.02	Belanja Barang dan Jasa	Rp49.459.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp20.134.800,00	Rp22.015.600,00	Rp42.150.400,00	Rp5.100.000,00	Rp0,00	Rp5.100.000,00	Rp2.208.600,00	
5.1.02.01	Belanja Barang	Rp16.632.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp10.352.000,00	Rp10.352.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp10.352.000,00	Rp1.180.000,00	
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	Rp16.632.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp10.352.000,00	Rp10.352.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp10.352.000,00	Rp1.180.000,00	
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	Rp5.148.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp4.052.000,00	Rp4.052.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp4.052.000,00	Rp0,00	
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	Rp2.400.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp2.400.000,00	Rp0,00	Rp2.400.000,00	Rp0,00	
5.1.02.01.01.0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	Rp9.084.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp6.300.000,00	Rp6.300.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp6.300.000,00	Rp84.000,00	
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	Rp32.827.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp20.134.800,00	Rp11.663.600,00	Rp31.798.400,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp31.798.400,00	Rp1.028.600,00	
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	Rp32.827.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp20.134.800,00	Rp11.663.600,00	Rp31.798.400,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp31.798.400,00	Rp1.028.600,00	
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	Rp15.005.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp27.129.300,00	Rp27.129.300,00	Rp49.344.100,00</					

UP/GU	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp446,297,289.10	Rp131,977,189.00	Rp578,274,478.10	Rp578,274,478.10	Rp0.00
TU	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00
LS	Rp2,710,284,232.00	Rp436,754,297.00	Rp3,147,038,529.00	Rp1,225,933,741.00	Rp706,486,283.00	Rp1,932,420,024.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp5,079,458,553.00	Rp0.00
GU-KKPD	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00
Pengembalian ke Kasda (STS)	Rp360,000.00	Rp0.00	Rp360,000.00	Rp0.00	Rp4,250,000.00	Rp4,250,000.00	Rp0.00	Rp10,509,350.00	Rp10,509,350.00	Rp15,119,350.00	Rp15,119,350.00	Rp0.00
JUMLAH PENGELUARAN	Rp3,035,183,232.00	Rp483,128,194.00	Rp3,518,311,426.00	Rp1,250,362,519.00	Rp743,625,600.00	Rp1,993,988,119.00	Rp473,328,150.00	Rp139,901,850.00	Rp613,230,000.00	Rp6,125,529,545.00	Rp6,125,529,545.00	Rp0.00
Saldo Kas UP/GU/TU	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp1,870,350.00	Rp1,870,350.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00
Saldo Kas KKPD	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00
Saldo Kas	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp1,870,350.00	Rp1,870,350.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00

Menyetujui,
 PENGGUNA ANGGARAN

 HALIDAH S.PI
 NIP. 197310042006042017

Disiapkan oleh,
 BENDAHARA PENGELUARAN

 DIAN ANDINI, S.A.P
 NIP. 198508252006042005